

2023

LAPORAN KETERCAPAIAN STANDAR MUTU
SPMI PENELITIAN STANDAR 17-24
AUDIT PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



GUGUS PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOPEMBER 2023

HALAMAN PENGESAHAN

Menyatakan Laporan Audit Mutu Internal (AMI) Audit Pengaduan Masyarakat Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum Universitas Negeri Surabaya, dibuat dengan sebenarnya.

Surabaya, 4 Desember 2023

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum



Dr. Bambang Sigit Widodo, M.Pd.NIP
197303032006041002

Ketua Gugus Penjaminan Mutu

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Muzayah', is written over the text of the official.

Dr. Muzayah, ST, MT
NIP. 197012162005012001

Laporan Audit Mutu Internal Standar Pengabdian kepada Masyarakat

1. Tujuan

Audit Mutu Internal standar pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk memastikan pemenuhan kriteria minimal tentang pengabdian kepada masyarakat yang mencakup standar hasil pengabdian kepada masyarakat (17), isi pengabdian kepada masyarakat (18), proses pengabdian kepada masyarakat (19), penilaian pengabdian kepada masyarakat (20), pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat (21), sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat (22), pengelolaan pengabdian kepada masyarakat (23), dan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat (24).

2. Hasil Rapat Tinjauan Manajemen (Tahun 2022)

a. Hasil Temuan yang ditindaklanjuti berdasarkan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dan penyelesaian Rencana Tindak Lanjut (RTL) TS-1

- Mengesahkan peta jalan pengabdian prodi oleh fakultas
- Mendokumentasikan hasil kontribusi prodi dalam pelaksanaan PKM dosen oleh tim administrasi prodi
- Form evaluasi hasil pemanfaatan PKM dosen yang di buat oleh GPM

b. Tindakan yang diambil

Tindakan yang diambil Fakultas dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dalam menindaklanjuti Rencana Tindak Lanjut (RTL) TS-1

- Mengesahkan peta jalan pengabdian prodi oleh fakultas
- Mendokumentasikan hasil kontribusi prodi dalam pelaksanaan PKM dosen oleh tim administrasi prodi.
- Form evaluasi hasil pemanfaatan PKM dosen yang di buat oleh GPM

c. Program kerja prodi

(Sudah/belum unggah di SIMUTU)

3. Evaluasi Standar Pengabdian kepada Masyarakat

Berikut adalah tabel hasil AMI berdasarkan hasil Audit Mutu Internal Standar Pengabdian kepada Masyarakat (17-24) yang telah dilaksanakan pada tanggal 6-14 Nopember tahun 2023 di Program Studi selingkung Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum (FISH). Hasil audit penelitian sebagai berikut:

a. Prodi S1 Pendidikan Geografi

Hasil audit PkM prodi S1 Pendidikan Geografi tidak ditemukan OB maupun KTS.

b. Prodi S2 Pendidikan Geografi

Hasil audit PkM prodi S2 Pendidikan Geografi tidak ditemukan OB maupun KTS

c. Prodi S1 PPKn

Hasil audit PkM prodi S1 PPKn tidak ditemukan OB maupun KTS

d. Prodi S1 Pendidikan Sejarah

Hasil audit PkM prodi S1 Pendidikan Sejarah tidak ditemukan OB maupun KTS

e. Prodi S1 AN

Hasil audit PkM prodi S1 AN tidak ditemukan OB maupun KTS

f. Prodi S1 Sosiologi

Tabel 1. Hasil AMI Standar Penelitian Prodi Sosiologi

No	Uraian kegiatan	Hasil Observasi	Hasil KTS	Keterangan	Rencana Penyelesaian
1.	Lebih dari 25% hasil PkM digunakan dalam pembelajaran		KTS	Tidak memenuhi indikator dalam standar	Semester genap 2023/2024
2.	Adanya kegiatan pembelajaran dari hasil kegiatan PkM dosen, tenaga pendidikan dan mahasiswa setidaknya sejumlah dosen pada tiga tahun		KTS	Tidak memenuhi indikator dalam standar	Semester genap 2023/2024

Hasil audit PkM prodi S1 Sosiologi adalah KTS = 2. Rencana tindak lanjut adalah:

- Dosen diarahkan untuk menggunakan hasil PkM pada pembelajaran
- Pengadaan kegiatan pembelajaran dari hasil kegiatan PkM dosen, tendik dan mahasiswa setidaknya sejumlah dosen pada 3 tahun.

g. Prodi S1 Ilmu Hukum

Hasil audit PkM prodi S1 Ilmu Hukum tidak ditemukan OB maupun KTS

h. Prodi S2 Ilmu Hukum

Tabel 2. Hasil AMI Standar Penelitian Prodi S2 Ilmu Hukum

No	Uraian kegiatan	Hasil Observasi	Hasil KTS	Keterangan	Rencana Penyelesaian
1.	Prodi menganalisis hasil kegiatan PkM dengan ketercapain standar prodi dan peta jalan PkM dosen dan mahasiswa		KTS	Tidak memenuhi indikator dalam standar	Semester genap 2023/2024
2.	Lebih dari 25% hasil PkM digunakan dalam pembelajaran.		KTS	Tidak memenuhi indikator dalam standar	Semester genap 2023/2024
3	Ada lebih dari 25% hasil PkM yang melibatkan mahasiswa		KTS	Tidak memenuhi indikator dalam standar	Semester genap 2023/2024
4	Ada dokumen kebijakan peta jalan, standar dan pedoman pelaksanaan PkM di LPPM dan prodi yang mampu digunakan dalam menjamin mutu isi PkM		KTS	Tidak memenuhi indikator dalam standar	Semester genap 2023/2024
5	Adanya kegiatan pembelajaran dari hasil kegiatan PkM dosen, tenaga pendidikan dan mahasiswa setidaknya sejumlah dosen pada tiga tahun		KTS	Tidak memenuhi indikator dalam standar	Semester genap 2023/2024
6	Adanya dokumen penggunaan sarana dan prasarana kegiatan PkM di prodi		KTS	Tidak memenuhi indikator dalam standar	Semester genap 2023/2024
7	Adanya catatan keterlibatan prodi dalam pelaksanaan kegiatan PkM sesuai dengan peta jalan kegiatan PkM di prodi.		KTS	Tidak memenuhi indikator dalam standar	Semester genap 2023/2024

Jumlah temuan hasil AMI Standar PkM adalah KTS = 7. Rencana tindak lanjut prodi adalah:

- Prodi menganalisis hasil kegiatan PkM dengan ketercapaian standar prodi dan peta jalan PkM dosen dan mahasiswa
- Dosen memasukkan hasil PkM dalam pembelajaran
- Dosen melibatkan mahasiswa dalam kegiatan PkM
- Menyusun dokumen kebijakan peta jalan, standar dan pedoman pelaksanaan PkM Prodi yang mampu digunakan dalam menjamin mutu isi PkM
- Pengadaan kegiatan pembelajaran dari hasil kegiatan PkM dosen, tenaga pendidikan dan mahasiswa setidaknya sejumlah dosen pada tiga tahun
- Penyusunan dokumen penggunaan sarana dan prasarana kegiatan PkM di prodi
- Prodi mencatat keterlibatan prodi dalam pelaksanaan kegiatan PkM sesuai dengan peta jalan kegiatan PkM di prodi.

i. Prodi S1 PIPS

Tabel 3. Hasil AMI Standar Penelitian Prodi S1 PIPS

No	Uraian kegiatan	Hasil Observasi	Hasil KTS	Keterangan	Rencana Penyelesaian
1.	Prodi menganalisis hasil kegiatan PkM dengan ketercapaian standar prodi dan peta jalan PkM dosen dan mahasiswa		KTS	Tidak memenuhi indikator dalam standar	Semester genap 2023/2024
2.	Adanya dokumen penggunaan sarana dan prasarana kegiatan PkM di prodi		KTS	Tidak memenuhi indikator dalam standar	Semester genap 2023/2024

Jumlah temuan hasil AMI Standar Penelitian adalah KTS = 2. Rencana tindak lanjut prodi adalah:

- Prodi menganalisis hasil kegiatan PkM dengan ketercapaian standar prodi dan peta jalan PkM dosen dan mahasiswa
- Penyusunan dokumen penggunaan sarana dan prasarana kegiatan PkM di prodi

j. Prodi S2 PIPS

k. Tabel 4. Hasil AMI Standar Penelitian Prodi S1 PIPS

No	Uraian kegiatan	Hasil Observasi	Hasil KTS	Keterangan	Rencana Penyelesaian
1.	Adanya kegiatan pembelajaran dari hasil kegiatan PkM dosen, tenaga pendidikan dan mahasiswa setidaknya sejumlah dosen pada tiga tahun		KTS	Tidak memenuhi indikator dalam standar	Semester genap 2023/2024

Hasil audit PkM prodi S2 PIPS tidak ditemukan KTS = 0

l. Prodi S1 Ilmu Komunikasi

Jumlah temuan hasil AMI Standar PkM adalah KTS = 0.

m. Prodi S1 Ilmu Politik

Tabel 5. Hasil AMI Standar Penelitian Prodi S1 Ilmu Politik

No	Uraian kegiatan	Hasil Observasi	Hasil KTS	Keterangan	Rencana Penyelesaian
1.	Prodi menganalisis hasil kegiatan PkM dengan ketercapaian standar prodi dan peta jalan PkM dosen dan mahasiswa		KTS	Tidak memenuhi indikator dalam standar	Semester genap 2023/2024
2.	Lebih dari 25% hasil PkM digunakan dalam pembelajaran.		KTS	Tidak memenuhi indikator dalam standar	Semester genap 2023/2024
3	Ada lebih dari 25% hasil PkM yang melibatkan mahasiswa		KTS	Tidak memenuhi indikator dalam standar	Semester genap 2023/2024
4	Ada dokumen kebijakan peta jalan, standar dan pedoman pelaksanaan PkM di LPPM dan prodi yang mampu digunakan dalam menjamin mutu isi PkM		KTS	Tidak memenuhi indikator dalam standar	Semester genap 2023/2024
5	Adanya kegiatan pembelajaran dari hasil kegiatan PkM dosen, tenaga pendidikan dan mahasiswa setidaknya sejumlah dosen pada tiga tahun		KTS	Tidak memenuhi indikator dalam standar	Semester genap 2023/2024
6	Adanya dokumen penggunaan sarana dan prasarana kegiatan PkM di prodi		KTS	Tidak memenuhi indikator dalam standar	Semester genap 2023/2024
7	Adanya catatan keterlibatan prodi dalam pelaksanaan kegiatan PkM sesuai dengan peta jalan kegiatan PkM di prodi.		KTS	Tidak memenuhi indikator dalam standar	Semester genap 2023/2024

Jumlah temuan hasil AMI Standar PkM adalah KTS = 7. Rencana tindak lanjut prodi adalah:

- Prodi menganalisis hasil kegiatan PkM dengan ketercapaian standar prodi dan peta jalan PkM dosen dan mahasiswa
- Dosen memasukkan hasil PkM dalam pembelajaran
- Dosen melibatkan mahasiswa dalam kegiatan PkM
- Menyusun dokumen kebijakan peta jalan, standar dan pedoman pelaksanaan PkM Prodi yang mampu digunakan dalam menjamin mutu isi PkM
- Pengadaan kegiatan pembelajaran dari hasil kegiatan PkM dosen, tenaga pendidikan dan mahasiswa setidaknya sejumlah dosen pada tiga tahun
- Penyusunan dokumen penggunaan sarana dan prasarana kegiatan PkM di prodi
- Prodi mencatat keterlibatan prodi dalam pelaksanaan kegiatan PkM sesuai dengan peta jalan kegiatan PkM di prodi.

Secara ringkas temuan per Prodi disajikan pada Tabel berikut:

4. Pengendalian Temuan KTS Melalui Rapat Tinjauan Manajemen

Berita Acara Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)

- Tanggal dan Tempat : Rabu, 27 Desember 2023, bertempat di Gedung I8 Lt. 2
- Agenda RTM : 1. RTM hasil audit Penelitian dan PKM
- Peserta RTM : 1. Pimpinan Dekanat
2. Kalab Pendidikan dan Non Pendidikan
 3. Koorprod S1 Pendidikan Geografi
 4. Koorprod S2 Pendidikan Geografi
 5. Koorprod S1 PPkN
 6. Koorprod S1 Pendidikan Sejarah
 7. Koorprod S1 AN
 8. Koorprod Sosiologi
 9. Koorprod S1 Ilmu Hukum
 10. Koorprod S2 Ilmu Hukum
 11. Koorprod S1 PIPS
 12. Koorprod S2 PIPS
 13. Koorprod S1 Ilmu Komunikasi
 14. Koorprod S1 Ilmu Politik
 15. GPM

Pengendalian temuan KTS disajikan pada tabel berikut:

No.	Permasalahan	Akar Penyebab	Akibat masalah	Penyelesaian masalah	Rencana penyelesaian masalah	Penanggungjawab
1	Prodi menganalisis hasil kegiatan PkM dengan ketercapaian standar prodi dan peta jalan PkM dosen dan mahasiswa	Prodi tidak menganalisis hasil kegiatan PkM dengan ketercapaian standar prodi dan peta jalan PkM dosen dan mahasiswa	Tidak ada hasil kegiatan PkM dengan ketercapaian standar prodi dan peta jalan PkM dosen dan mahasiswa	Prodi menganalisis hasil kegiatan PkM dengan ketercapaian standar prodi dan peta jalan PkM dosen dan mahasiswa	semester genap 2023/2024	Koorprod
2	Lebih dari 25 % hasil PkM digunakan dalam pembelajaran	Dosen belum tahu jika hasil PkM harus digunakan dalam pembelajaran	Hasil PkM yang digunakan dalam pembelajaran kurang dari 25 %	Semua hasil PkM digunakan dalam pembelajaran	semester genap 2023/2024	Koorprod
3	Ada lebih dari 25 % hasil PkM yang melibatkan mahasiswa	Dosen tidak tahu acuan ini	PkM yang melibatkan mahasiswa kurang dari 25 %	Pelibatan mahasiswa dalam PkM	semester genap 2023/2024	Koorprod
4	Ada dokumen kebijakan peta jalan, standar dan pedoman pelaksanaan PkM di LPPM dan prodi yang mampu digunakan dalam menjamin mutu isi PkM	Prodi belum menyusun dokumen ini	Tidak ada dokumen kebijakan peta jalan, standar dan pedoman pelaksanaan PkM di LPPM dan prodi yang mampu digunakan dalam menjamin mutu isi PkM	Penyusunan dokumen kebijakan peta jalan, standar dan pedoman pelaksanaan PkM di LPPM dan prodi yang mampu digunakan dalam menjamin mutu isi PkM	semester genap 2023/2024	Koorprod
5	Adanya kegiatan pembelajaran dari hasil kegiatan PkM dosen, tenaga pendidikan dan mahasiswa setidaknya sejumlah dosen pada tiga tahun	Prodi belum melakukan PKM yang hasilnya bisa digunakan dalam pembelajaran	Belum ada hasil PKM yang digunakan dalam pembelajaran	Pengadaan kegiatan pembelajaran dari hasil kegiatan PkM dosen, tenaga pendidikan dan mahasiswa setidaknya sejumlah dosen pada tiga tahun	semester genap 2023/2024	Koorprod
6	Adanya dokumen penggunaan sarana dan prasarana kegiatan PkM di prodi	Belum menyusun dokumen penggunaan sarana dan prasarana kegiatan PkM di prodi	tidak ada dokumentasi dokumen penggunaan sarana dan prasarana kegiatan PkM di prodi	Penyusunan dokumen penggunaan sarana dan prasarana kegiatan PkM di prodi	semester genap 2023/2024	Koorprod
7	Adanya catatan keterlibatan prodi dalam pelaksanaan kegiatan PkM sesuai dengan peta jalan kegiatan PkM di prodi	Catatan keterlibatan prodi dalam pelaksanaan kegiatan PkM sesuai dengan peta jalan kegiatan PkM di prodi	Tidak ada catatan keterlibatan prodi dalam pelaksanaan kegiatan PkM sesuai dengan peta jalan kegiatan PkM di prodi	Dokumentasi keterlibatan prodi dalam pelaksanaan kegiatan PkM sesuai dengan peta jalan kegiatan PkM	semester genap 2023/2024	Koorprod

Kesimpulan RTM:

Kesimpulan RTM audit Pengabdian kepada Masyarakat sebagai berikut:

- Prodi menganalisis hasil kegiatan PkM dengan ketercapaian standar prodi dan peta jalan PkM dosen dan mahasiswa
- Semua hasil PkM digunakan dalam pembelajaran
- Pelibatan mahasiswa dalam PkM
- Penyusunan dokumen kebijakan peta jalan, standar dan pedoman pelaksanaan PkM di LPPM dan prodi yang mampu digunakan dalam menjamin mutu isi PkM
- Pengadaan kegiatan pembelajaran dari hasil kegiatan PkM dosen, tenaga pendidikan dan mahasiswa setidaknya sejumlah dosen pada tiga tahun
- Penyusunan dokumen penggunaan sarana dan prasarana kegiatan PkM di prodi
- Dokumentasi keterlibatan prodi dalam pelaksanaan kegiatan PkM sesuai dengan peta jalan kegiatan PkM

5. Peningkatan dan Tindak Lanjut (Lampiran RTL)

Berdasarkan kesimpulan maka peningkatan dan tindak lanjut adalah sebagai berikut:

- Prodi menganalisis hasil kegiatan PkM dengan ketercapaian standar prodi dan peta jalan PkM
- Semua hasil PkM digunakan dalam pembelajaran
- Pelibatan mahasiswa dalam PkM
- Penyusunan dokumen kebijakan peta jalan yang mampu digunakan dalam menjamin mutu isi PkM dan mensahkan dengan SK
- Penyusunan dokumen penggunaan sarana dan prasarana kegiatan PkM di prodi
- Dokumentasi keterlibatan prodi dalam pelaksanaan kegiatan PkM

Lampiran:

- 1. Undangan RTM AMI Standar Penelitian Dan Pengabdian**
- 2. Daftar Hadir RTM AMI Standar Penelitian Dan Pengabdian**
- 3. Dokumentasi Kegiatan**
- 4. ST audit PKM dan Penelitian**
- 5. Instrumen Hasil AMI Standar Pengabdian kepada Masyarakat (Form 1, Form 4 dan Form 5 yang telah tertandatangani Auditor dan Auditee) FISH**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM
Kampus Unesa 1, Jalan Ketintang, Surabaya 60231
Laman: <https://fish.unesa.ac.id>, email: fish@unesa.ac.id

Nomor : B/112933/UN38.4/TU.00.01/2023 20 Desember 2023
Lampiran : 1 Lembar
Perihal : Undangan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)

Yth, Bapak/Ibu..... (**Daftar Terlampir**).

Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum.

Universitas Negeri Surabaya.

Menindaklanjuti surat dari Ketua GPM nomor:02/GPM/XII/2023 tentang Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Penelitian & PKM dan Monev Pembelajaran, bersama ini kami mengharap kehadiran Bapak/Ibu dalam kegiatan yang akan dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Rabu, 27 Desember 2023
Pukul : 11.00 WIB – Selesai
Tempat : Ruang Rapat Gedung Dekanat I8 Lt.2
Agenda : 1. RTM Audit Penelitian dan PKM.
2. RTM Monev Pembelajaran Semester Gasal Tahun 2023/2024.
3. RTM ACKP Semester 1 Tahun 2023.

Atas perhatian dan kehadirannya disampaikan terima kasih.



Dekan,
D. Bambang Sigit Widodo, M.Pd.
NIP 197303032006041002

Lampiran Surat;

Nomor : B/112933/UN38.4/TU.00.01/2023

Tanggal : 20 Desember 2023

Daftar Undangan:

1. Dr. Bambang Sigit Widodo, M.Pd. (Dekan)
2. Dr. Wiwik Sri Utami, M.P. (Wakil Dekan Bidang I)
3. Indah Prabawati, S.Sos., M.Si. (Wakil Dekan Bidang II)
4. Maya Mustika Kartika Sari, S.Sos., M.IP. (Koord. Prodi S1 PPKn)
5. Dr. Nugroho Hari Purnomo, S.P., M.Si. (Koord. Prodi S1 Pend. Geografi)
6. Dr. Wisnu, M.Hum. (Koord. Prodi S1 Pend. Sejarah)
7. Eva Hany Fanida, S.AP., M.AP. (Koord. Prodi S1 Ilmu Adm. Negara)
8. Arinto Nugroho, S.Pd., S.H., M.H. (Koord. Prodi S1 Ilmu Hukum)
9. Dr. Agus Machfud, S.Ag., M.Si. (Koord. Prodi S1 Sosiologi)
10. Dr. Anam Miftahul Huda, S.Kom., M.I.Kom. (Koord. Prodi S1 Ilmu Komunikasi)
11. Dr. Nuansa Bayu Segara, S.Pd., M.Pd. (Koord. Prodi S1 Pendidikan IPS)
12. Dr. Moch. Mubarak Muharam, M.IP. (Koord. Prodi S1 Ilmu Politik)
13. Dr. Agus Suprijono, M.Si. (Koord. Prodi S2 Pendidikan IPS)
14. Dr. Sukma Perdana Prasetya, S.Pd., M.T. (Koord. Prodi S2 Pend. Geografi)
15. Dr. Pudji Astuti, S.H., M.H. (Koord. Prodi S2 Hukum)
16. Prof. Drs. Nasution, M.Hum., M.Ed., Ph.D. (Kalab. Pendidikan Ilmu – Ilmu Sosial)
17. Dra. Meirinawati, M.AP. (Kalab. Ilmu – Ilmu Sosial)
18. Tri Joko Martono, S.Kom. (Kepala Kantor)
19. Erwin Yuningsih, S.E. (Kasi Bidang I)
20. Tara Satyawati, S.P., M.M. (Kasi Bidang II)
21. Dr. Muzayanah, S.T., M.T. (Ketua GPM)
22. Muh. Ali Masnun, S.H., M.H. (Sekretaris)
23. Dr. Hj. Rr. Nanik Setyowati, M.Si. (Divisi Akreditasi Internasional)
24. Galih Wahyu Pradana, S.AP., M.Si. (Divisi Data dan Sistem Informasi)
25. Putri Aisyiyah R D, S.Sos., M.Med.Kom. (Divisi Akreditasi Internasional)
26. Septina Alrianingrum, S.S., M.Pd. (Divisi Monev)
27. Agus Satmoko, S.S., M.Si. (UPM S1 PPKn)
28. Dian Ayu Larasati, S.Pd., M.Sc. (UPM S1 Pend. Geografi)
29. Agus Trilaksana, M.Hum. (UPM S1 Pend. Sejarah)
30. Badrudin Kurniawan, S.AP., M.AP. (UPM S1 Ilmu Administrasi Negara)
31. Nurul Hikmal, L.c., M.Hi. (UPM S1 Ilmu Hukum)
32. Pambudi Handoyo, S.Sos., M.A. (UPM S1 Sosiologi)
33. Mutiah, S.Sos., M.Ikom. (UPM S1 Ilmu Komunikasi)
34. Ali Imron, S. Sos., M.A. (UPM S1 Pend. IPS)
35. Dr. Kusnul Khotimah, S.Pd., M.Pd. (UPM S2 Pend. IPS)



PRESENSI

Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Audit Penelitian dan PKM 2023
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Unesa

Hari/Tanggal : Rabu, 27 Desember 2023
Waktu : Pukul 11.00 – selesai
Tempat : Lantai 2 Gedung I8

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1	Dr. Bambang Sigit Widodo, M.Pd.	
2	Dr. Wiwik Sri Utami, M.P.	
3	Indah Prabawati, S.Sos., M.Si.	
4	Prof. Drs. Nasution, M.Hum., M.Ed., Ph.D.	
5	Dra. Meirinawati, M.AP.	
6	Maya Mustika Kartika Sari, S.Sos., M.IP.	
7	Dr. Nugroho Hari Purnomo, S.P., M.Si.	
8	Dr. Nuansa Bayu Segara, S.Pd., M.Pd.	
9	Dr. Wisnu, M.Hum.	
10	Eva Hany Fanida, S.AP., M.AP.	
11	Arinto Nugroho, S.Pd, S.H., M.H	
12	Dr. Anam Miftakhul Huda, S.Kom., M.I.Kom.	
13	Dr. Agus Machfud Fauzi, S.Ag., M.Si.	
14	Dr. Moch Mubarak Muharam, S.IP., M.IP.	
15	Dr. Sukma Perdana Prasetya, S.Pd., M.T.	
16	Dr. Pudji Astuti, S.H., M.H	
17	Dr. Agus Suprijono, M.Si.	
18	Tri Joko Martono, S.Kom	



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM
GUGUS PENJAMINAN MUTU
Kampus Ketintang, Jalan Ketintang, Surabaya 60231
Telepon : +6231 - 8280009 pes. 400 - 410, Faksimil: +6231 - 8281466
Laman : <https://fish.unesa.ac.id>, email : fish@unesa.ac.id

NO	NAMA	TANDA TANGAN
19	Erwin Yuningsih, S.E.	
20	Tara Satyawati, S.Pd., M.M.	
21	Dr. Muzayanah, S.T., M.T	
22	Muh. Ali Masnun, S.H., M.H.	
23	Dr. Hj. Rr. Nanik Setyowati, M.Si.	
24	Galih Wahyu Pradana, S.AP., M.Si.	
25	Putri Aisyiyah RD, S.Sos., M.Med.Kom.	
26	Septina Alrianingrum, S.S., M.Pd.	
27	Agus Satmoko, S.S., M.Si.	
28	Dian Ayu Larasati, S.Pd., M.Sc.	
29	Agus Trilaksana, M.Hum.	
30	Badrudin Kurniawan, S.AP., M.AP	
31	Nurul Hikmal, L.c., M.Hi.	
32	Pambudi Handoyo, S.Sos., M.A.	
33	Mutiah, S.Sos., M.Ikom.	
34	Ali Imron, S. Sos., M.A.	
35	Dr. Kusnul Khotimah, S.Pd., M.Pd.	

Dokumentasi



Gambar 1. Pemaparan hasil audit PkM

Gambar 2. Diskusi RTL hasil audit PkM



Gambar 3. Diskusi temuan hasil audit PkM

Gambar 4. Diskusi RTL hasil audit PkM



Gambar 5. Diskusi RTL hasil audit PkM



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Kampus Unesa 2, Jalan Kampus Unesa Lidah, Lidah Wetan, Surabaya 60213
+6231- 99421834, 99421835, Faksimil : +6231- 99424002
Laman: <https://lpm.unesa.ac.id>, email: ppm@unesa.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 93610/UN38.18/TU.00.00/2023

Berdasarkan:

1. Kepentingan dinas dan kelancaran tugas di lingkungan Universitas Negeri Surabaya.

Direktur Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Negeri Surabaya memberikan tugas kepada:

No	Nama	NIP	Program Studi yang Diaudit
1.	Supriyanto, S.Pd., M.Pd.	198604142015041002	1. Program Studi S1 Bimbingan dan Konseling 2. Program Studi S2 Bimbingan dan Konseling
2.	Mallevi Agustin Ningrum, S.Pd., M.Pd.	201405037	1. Program Studi S1 Teknologi Pendidikan 2. Program Studi S2 Teknologi Pendidikan
3.	Dr. Ima Widiyanah, M.Pd.	198505282022032001	1. Program Studi S3 Teknologi Pendidikan 2. Program Studi S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini 3. Program Studi S2 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini
4.	Unit Three Kartini, S.T., M.T., Ph.D.	197602212003122001	Program Studi S1 Manajemen Pendidikan
5.	Dra. Sasminta Christina Yuli Hartati, M.Pd.	196107041986032002	Program Studi S2 Ilmu Keolahragaan
6.	Dr. Hitta Alfi Muhimmah, M.Pd.	202210154	1. Program Studi S2 Manajemen Pendidikan 2. Program Studi S1 Pendidikan Luar Sekolah 3. Program Studi S2 Pendidikan Luar Sekolah
7.	Afifan Yulfadinata, S.Pd., M.Pd.	201405035	Program Studi S1 Pendidikan Luar Biasa
8.	Dr. Rofik Jalal Rosyanafi, M.Pd.	202203001	1. Program Studi S3 Manajemen Pendidikan 2. Program Studi S3 Pendidikan Dasar

No	Nama	NIP	Program Studi yang Diaudit
8.	Dr. Fajar Arianto, S.Pd., M.Pd	201405005	Program Studi S2 Pendidikan Luar Biasa
9.	Wulan Patria Saroinsong, S.Psi., M.Pd., Ph.D.	201405021	1. Program Studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar 2. Program Studi S2 Pendidikan Dasar
10.	Eva Ferdita Yuhantini, S.Pd., M.Kes.	198808162019032017	1. Program Studi S1 Psikologi 2. Program Studi S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga
11.	Dhani Kristiandri, S.Pd., M.Sn.	197903102005011004	1. S1 Desain Komunikasi Visual 2. S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 3. S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa
12.	Respati Retno Utami, S.Pd., M.Pd.	199112192019032018	1. S1 Pendidikan Bahasa Inggris 2. S1 Pendidikan Bahasa Jepang 3. S1 Pendidikan Bahasa Jerman 4. S3 Pendidikan Bahasa dan Sastra
13.	Dr. Resdianto Permata Raharjo, M.Pd.	202105079	1. S1 Pendidikan Bahasa Mandarin 2. S1 Pendidikan Seni Drama, Tari Dan Musik 3. S1 Pendidikan Seni Rupa
14.	Yogi Bagus Adhimas, S.Pd., M.A.	199305242022031008	1. S1 Sastra Indonesia 2. S1 Sastra Inggris 3. S1 Sastra Jerman
15.	Ephrilia Noor Fitriana, S.Hum., M.Hum.	202103051	1. S1 Seni Musik 2. S1 Seni Rupa Murni 3. S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra
16.	Prima Vidya Asteria, S.Pd., M.Pd.	198910092015042002	1. S2 Pendidikan Bahasa Indonesia 2. S2 Pendidikan Bahasa Inggris 3. S2 Pendidikan Seni Budaya
17.	Mukhayyarotin N.R.J., M.Pd.	198705202014042001	1. Program Studi S1 Matematika 2. Program Studi S1 Pend Matematika
18.	Guntur Trimulyono, S.Si., M.Sc.	198004092005011002	1. Program Studi S1 Sains Data 2. Program Studi S1 Fisika

No	Nama	NIP	Program Studi yang Diaudit
			3. Program Studi S1 Pend Fisika
19.	Muhamad Arif Mahdiannur, M.Pd.	198901282019031015	1. Program Studi S2 Pend Matematika 2. Program Studi S3 Pend Matematika
20.	Nugrahani Primary Putri, S.Si., M.Si.	197609012005012001	1. Program Studi S1 Kimia 2. Program Studi S1 Pend Kimia 3. Program Studi S2 Kimia
21.	Rudianto Artiono, S.Pd., M.Si.	198202112005011001	1. Program Studi S1 Pend Biologi 2. Program Studi S1 Biologi 3. Program Studi S2 Pend Biologi
22.	Dian Novita, ST., M.Pd.	197411192003122001	1. Program Studi S1 Pend Sains 2. Program Studi S2 Pend Sains 3. Program Studi S3 Pend Sains
23.	Putri Aisyiyah Rachma Dewi, S.Sos., M.Med.Kom	198404202014042001	1. Program Studi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 2. Program Studi S2 Pendidikan IPS
24.	Dr. Hj. Rr. Nanik Setyowati, M.Si.	196708251992032001	1. Program Studi S1 Pendidikan Sejarah 2. Program Studi S1 Sosiologi
25.	Muh. Ali Masnun, S.H., M.H.	201405036	1. Program Studi S1 Pendidikan Geografi 2. Program Studi S2 Pendidikan Geografi
26.	Gafih Wahyu Pradana, S.AP., M.Si	199004202015041002	1. Program Studi S1 Ilmu Hukum 2. Program Studi S2 Ilmu Hukum
27.	Dr. Muzayanah, MT.	197012162005012001	1. Program Studi S1 Ilmu Administrasi Negara 2. Program Studi S1 Ilmu Komunikasi
28.	Septina Alrianingrum, S.S., M.Pd.	197209112005012001	1. Program Studi S1 Pendidikan IPS 2. Program Studi S1 Ilmu Politik
29.	Mochamad Arif Irfa'i, S.Pd., M.T.	198102072009121002	1. Program Studi S1 Pendidikan Teknik Elektro

No	Nama	NIP	Program Studi yang Diaudit
			2. Program Studi 1 Pendidikan Teknik Bangunan
30.	Sri Dwiyantri, S.Pd., M.PSDM.	197902062005012003	1. Program Studi S1 Teknik Elektro 2. Program Studi S2 Teknik Elektro
31.	Heri Suryaman, S.Pd., M.Pd.	198712262019031008	1. Program Studi S1 Pendidikan Teknik Mesin 2. Program Studi S1 Teknik Mesin
32.	Yulia Fransisca, S.Pd., M.Pd.	198507162015042002	1. Program Studi S1 Teknik Sipil 2. Program Studi S1 Pendidikan Tata Boga
33.	Pradini Puspitaningayu, S.T., M.T., Ph.D.	198806292015042001	1. Program Studi S1 Pendidikan Teknologi Informasi 2. Studi Program Studi S1 Sistem Informasi
34.	Satwika Arya Pratama, SGz. M.Sc.	202103046	Program Studi S1 Teknik Informatika
35.	Dr. Subuh Isnur Haryudo, S.T., M.T.	197508202008121003	1. Program Studi S1 Pendidikan Tata Busana 2. Program Studi S1 Pendidikan Tata Rias
36.	Anna Noordia, S.TP., M.Kes.	197611012008012009	1. Program Studi S1 Pendidikan Jasmani 2. Program Studi S1 Ilmu Gizi
37.	Bayu Budi Prakoso, S.Pd., M.Pd.	198912292019031013	1. Program Studi S2 Pendidikan Olahraga 2. Program Studi S3 Ilmu Keolahragaan
38.	Dita Yuliasitri, S.Si., M.Kes.	197407252003122001	Program Studi S1 Manajemen Olahraga
39.	Bayu Agung Pramono, S.Pd., M.Kes.	198803302014041002	Program Studi S1 Ilmu keolahragaan
40.	Merlyana Dwindi Yanthi, SE., ST., M.SA., Ak., CA	198707192015042004	1. Program Studi S1 Pendidikan Ekonomi 2. Program Studi S1 Bisnis Digital
41.	Ika Diah Candra Arifah S.E., M.Com, CMA	202103063	1. Program Studi S2 Pendidikan Ekonomi 2. Program Studi S1 Pendidikan Bisnis
42.	Zainur Rahman, S.E., M.Sc	199103222018031001	1. Program Studi S1 Pendidikan Akuntansi 2. Program Studi S1 Ekonomi Islam

No	Nama	NIP	Program Studi yang Diaudit
43.	Rachma Indrarini., SEI., MSEI	199001152015042001	1. Program Studi S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran 2. Program Studi S1 Manajemen
44.	Albrian Fiky Prakoso, S.Pd., M.Pd	198911152015041001	1. Program Studi S2 Manajemen 2. Program Studi S1 Ekonomi
45.	Novi Trisnawati, S.Pd, M.Pd	199011072015042001	1. Program Studi S1 Akuntansi 2. Program Studi S2 Akuntansi
46.	Diah Wulandari, S.T., M.T	197803052006042001	1. Program Studi D4 Desain Grafis 2. Program Studi D4 Administrasi Negara
47.	Salamun Rohman Nudin, S.Kom., M.Kom.	198211022008121001	1. Program Studi D4 Teknik Listrik 2. Program Studi D4 Teknik Mesin
48.	Fifit Yeti Wulandari, S.Pd., M.Pd.	198201172008122001	1. Program Studi D4 Teknik Sipil 2. Program Studi D4 Transportasi
49.	Yuni Lestari, S.AP., M.AP.	198506132014042001	Program Studi D4 Tata Busana
50.	Indarti, S.Pd. M.Sn.	197707112002122001	1. Program Studi D4 Tata Boga 2. Program Studi D4 Manajemen Informatika
51.	Widi Aribowo, S.T., M.T.	198004232006041001	Program Studi D4 Kepelatihan Olahraga
52.	Dr. Rina Harimurti, S.Pd., M.T.	196812171994032002	Program Studi S2 Pendidikan Teknologi Kejuruan
53.	Prof. Dr. Dian Anita Nuswantara, S.E., Ak., M.Si.	197403201999032010	Program Studi S3 Pendidikan Vokasi
54.	dr. Ariesia Dewi Ciptorini, Sp.N.,	198904122022032010	Program Studi S1 Kedokteran
55.	Nur Ilahi Anjani, S.Ked., M.Kes.	202210155	

untuk melaksanakan tugas sebagai **auditor audit mutu internal Standar Penelitian (Standar 13) dan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat (Standar 14)** pada:

hari : Senin s.d. Rabu
tanggal : 06 s.d. 14 November 2023

Dengan ketentuan :

1. Harap dilaksanakan dengan seksama dan penuh tanggung jawab.
2. Selesai melaksanakan tugas agar segera melaporkan ke pimpinan.

Dikeluarkan di : Surabaya

Pada tanggal : 06 November 2023

Direktur Lembaga Penjaminan Mutu,



Dr. Widowati Budijastuti, M.Si.

NIP 196804151994022001

Tembusan:

1. Rektor (sebagai laporan)
2. Yang bersangkutan

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA				No. 9 – 16 – PKM- Rev02			
	BADAN PENJAMINAN MUTU Gedung Rektorat Unesa Kampus Lidah Surabaya							
AUDIT MUTU INTERNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT								
Auditi				Tahap Audit				
Dr. Nugroho Hari Purnomo, M.Si.								
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit				
I4.1.2				14 November 2023				
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota				
1. 2.		M. Ali Masnun		1. 2.				
Distribusi		Auditi		Auditor		BPM	Arsip	

1. HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
17.1 LPPM memiliki panduan hasil pengabdian kepada masyarakat yang menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi.	Adanya panduan hasil pengabdian kepada masyarakat yang menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi.				
	Adanya kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat yang menerapkan mengamalkan, dan membudayakan salah satu aspek: a. pendidikan, b. ilmu pengetahuan, c. sains, d. teknologi, e. olahraga, f. sastra, dan seni				
17.2 LPPM mengupayakan hasil pengabdian kepada masyarakat ditujukan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat.	Adanya kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat yang dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat melalui: a) pemanfaatan teknologi tepat guna, lebih dari 17% b) pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, sains, teknologi, olahraga, sastra, dan seni sebesar 25% c) pengembangan bahan ajar atau modul pelatihan lebih dari 25%				
17.3 Perguruan Tinggi memiliki kebijakan untuk menghasilkan	Adanya lebih dari 7 karya prototipe per tahun yang dapat digunakan industri dari hasil kegiatan PkM				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
suatu karya prototipe industri					
17.4 Prodi melaksanakan analisis hasil kegiatan PkM	Prodi menganalisis hasil kegiatan PkM dengan ketercapain standar prodi dan peta jalan PkM dosen dan mahasiswa	√		https://geo.fish.unesa.ac.id/page/pengabdian-kepada-masyarakat	
	Lebih dari 25% hasil PkM digunakan dalam pembelajaran	√		https://geo.fish.unesa.ac.id/page/modul-buku-ajar	
	Ada lebih dari 25% hasil PkM yang melibatkan mahasiswa	√		https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/swara-bhumi	

2. ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
18.1 LPPM dan Prodi mempunyai peta jalan, standar dan pedoman pelaksanaan PkM	Ada dokumen kebijakan peta jalan, standar dan pedoman pelaksanaan PkM di LPPM dan prodi yang mampu digunakan dalam menjamin mutu isi PkM	√		https://geo.fish.unesa.ac.id/page/roadmap-penelitian-dan-pkm	
18.2 LPPM mengupayakan Isi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada kebutuhan masyarakat	Ada peningkatan hasil pengabdian kepada masyarakat yang berasal dari hasil penelitian sebesar 30% setiap tahun				
	Ada peningkatan jumlah PkM yang mampu memecahkan masalah dan menerapkan teknologi tepat guna sebesar 35% setiap tahun				
	Ada peningkatan jumlah PkM yang diterapkan langsung oleh DU/DI, masyarakat, ataupun pemerintah sebesar 35% setiap tahun.				
18.3 LPPM memiliki pedoman tentang Isi pengabdian kepada	<ul style="list-style-type: none"> Adanya peningkatan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui respon pengguna 				

masyarakat memiliki kedalaman dan keluasan materi	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya peningkatan pencapaian hak kekayaan intelektual 35% setiap tahun 				
	Adanya evaluasi peta map tentang arah pengembangan dari isi pengabdian masyarakat di PT				

3. PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
19.1 LPPM memiliki panduan Proses pengabdian kepada masyarakat terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan sesuai aturan yang berlaku	Adanya pedoman yang memandu kesesuaian dengan Renstra Abdimas LPPM Unesa melalui tahapan: pengajuan proposal, pelaksanaan, dan pelaporan sesuai dengan buku panduan yang berlaku				
	Adanya monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan, dan pelaporan sesuai dengan buku panduan yang berlaku				
19.2 LPPM memiliki panduan Bentuk PKM yang dapat dilakukan	Bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa: <ul style="list-style-type: none"> • pelayanan kepada masyarakat; • penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, sastra, dan seni sesuai dengan bidang keahliannya; • peningkatan kapasitas masyarakat; 				

	<ul style="list-style-type: none"> • pemberdayaan masyarakat 				
19.3 LPPM memiliki panduan Proses pelaksanaan PkM memenuhi standar yang ditetapkan	<ul style="list-style-type: none"> • Proses pelaksanaan PkM hendaknya memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, lingkungan, dan melibatkan mahasiswa dari awal sampai akhir 				
	Adanya dokumen standar mutu pelaksanaan PkM yang dikaji secara berkesinambungan				
	Adanya monev pelaksanaan PkM berdasarkan standar yang ditetapkan				
19.4 LPPM memiliki panduan Proses PkM oleh mahasiswa yang terarah dan terevaluasi	Proses PkM mahasiswa dilaksanakan secara terprogram dan terarah sesuai dengan buku panduan yang berlaku				
	Adanya dokumen standar mutu pelaksanaan PkM mahasiswa yang dikaji secara kontinyu				
	Adanya monev pelaksanaan PkM mahasiswa berdasarkan standar yang ditetapkan				
19.5 Kegiatan PkM dosen, tenaga pendidikan dan mahasiswa wajib diimplementasikan dalam industri dan pembelajaran di PT serta diusahakan pengurusan haki paten	Adanya kegiatan pembelajaran dari hasil Kegiatan PkM dosen, tenaga pendidikan dan mahasiswa setidaknya sejumlah dosen pada tiga tahun	√		https://geo.fish.unesa.ac.id/page/modul-buku-ajar	
	Adanya penerapan implementasi proses hasil kegiatan PkM dosen, tenaga pendidikan dan mahasiswa pada industri yang sesuai dengan bidangnya				
	Adanya kenaikan haki dan paten setiap tahun dengan jumlah 20% dari sejumlah kegiatan PkM yang ada di PT				

4. PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
20.1 LPPM memiliki pedoman Penilaian PkM yang dilakukan dengan prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan sesuai aturan yang berlaku	Penilaian PkM memenuhi ketentuan dan tahapan yang ditentukan: a) laporan kemajuan, b) monitoring dan evaluasi, c) seminar hasil				
20.2 LPPM melakukan Penilaian PkM mengacu pada kriteria minimal	Penilaian memenuhi a. tingkat kepuasan masyarakat; b. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; c. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, sastra, dan seni di masyarakat secara berkelanjutan; d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta				

	<p>pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau</p> <p>e. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan</p>				
20.3 LPPM melakukan evaluasi kegiatan penilaian hasil PkM dalam menjaga mutu proses kegiatan secara kontinyu	Ada kegiatan evaluasi pada saat melakukan penilaian hasil PkM melalui instrumen yang sah dan akurat sehingga dapat didapatkan hasil evaluasi untuk peningkatan mutu kegiatan PkM				

5. PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
21.1 LPPM memiliki pedoman tentang kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan PkM yang dilaksanakan setiap periode pengajuan Proposal PkM	Tim Pelaksana wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan				
	Pelaksanaan sesuai dengan sasaran, jadwal dan lama pelaksanaan yang direncanakan				
	Pelaksanaan dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.				
	Pelaksanaan PkM memberikan kontribusi terhadap pengembangan wilayah, inovasi dan alih teknologi, solusi persoalan masyarakat, pengentasan kemiskinan, dan pemberdayaan masyarakat.				
21.2 Pelaksana pengabdian kepada masyarakat	Adanya CV pengabdian yang memuat kualifikasi akademik dan hasil penelitian yang pernah dilakukan				

sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan: a. kualifikasi akademik; dan b. hasil pengabdian kepada masyarakat berdasarkan ketentuan yang berlaku	Adanya monitoring dan evaluasi yang dapat memantau dengan baik, terjadwal dan konsisten				
	Hasil PkM dikembangkan sesuai kualifikasi akademik, dilakukan tindak lanjut, mengintegrasikan hasil pada pembelajaran dan dipublikasikan sekurangnya melalui seminar regional				
	Pelaksanaan PKM difasilitasi lembaga dengan baik, ada dukungan kerjasama sarpras, ada penghargaan bagi pelaksana PkM berprestasi				
21.3 Dalam melaksanakan PkM, DTSP melibatkan mahasiswa PS	Lebih dari 25% PkM DTSP melibatkan mahasiswa dalam 3 tahun terakhir				

6. SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
22.1 Perguruan Tinggi Wajib memiliki kebijakan menyediakan fasilitas Sarana dan prasarana PkM memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat setiap tahun sesuai dengan Renstra	Adanya SOP yang mengatur peningkatan layanan fasilitas sarpras oleh lembaga yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses PkM dalam rangka memenuhi hasil PkM				
	Adanya dokumen inventaris yang baik dan lengkap dalam memenuhi kebutuhan kegiatan PkM				
22.2 Perguruan Tinggi wajib memberikan ijin penggunaan fasilitas Sarana dan Prasarana	Adanya ijin dari perguruan tinggi untuk menggunakan fasilitas; a. terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola				

guna mendukung keterlaksanaan Kegiatan PkM yang diadakan setiap tahunnya.	perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan; b. proses pembelajaran; dan kegiatan penelitian				
22.3 Perguruan Tinggi wajib menjamin pemenuhan standar pada Sarana dan prasarana sesuai aturan yang berlaku	Sarana dan prasarana PkM memenuhi unsur keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pengabdian, masyarakat, dan lingkungan				
22.4 Prodi wajib memberikan dukungan fasilitas sarana dan prasarana jika LPPM telah memberikan izin	Adanya dokumen penggunaan sarana dan prasarana kegiatan PkM di prodi	√		https://geo.fish.unesa.ac.id/post/pengabdian-kepada-masyarakat-pkm-bersama-mgmp-geografi-kota-surabaya	
	Adanya catatan keterlibatan prodi dalam pelaksanaan kegiatan PkM sesuai dengan peta jalan kegiatan PkM di prodi	√		https://geo.fish.unesa.ac.id/page/roadmap-penelitian-dan-pkm	
22.5 PT melakukan survey kepuasan pelanggan secara berkala	Ada instrumen survei kepuasan pelanggan yang sah				
	Ada hasil analisis survei kepuasan pelanggan tentang fasilitas sarana dan prasarana				

7. PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
23.1 Perguruan Tinggi memiliki kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan.	1. Kegiatan PkM memiliki kriteria kesesuaian dengan <ol style="list-style-type: none"> a. Renstra Abdimas LPPM Unesa b. Road map dengan PkM kemenristekdikti c. Kriteria minimal pengelolaan PkM yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, dan pelaporan 2. Adanya Surat Perintah Kerja (SPK)				

	<p>3. Adanya prosedur mutu, pemantauan, dan evaluasi</p> <p>4. Adanya Laporan kegiatan yang sesuai</p>				
<p>23.2 Perguruan Tinggi Wajib membentuk Unit Pengelola PkM yang bertugas untuk melakukan Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya</p>	<p>Pengelolaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dikelola dengan baik sesuai dengan OTK.</p>				
<p>23.3 Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Perguruan wajib melakukan pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>Adanya sinergi yang terlembaga dengan baik antara LPPM dengan Pusat Pengembangan sebagai unit kerja pendukung</p>				
<p>23.4 LPPM memiliki kebijakan tertulis pimpinan PT (Rektor, Dekan, atau Ketua prodi) tentang pengabdian kepada masyarakat (renstra, pembuatan peta jalan PkM, dan pelaksana PkM di PT atau UPPS)</p>	<p>Adanya peraturan, panduan, dan sistem Penjaminan mutu internal kegiatan PkM; memiliki RENSTRA PkM yang merupakan RENSTRA universitas dengan ketentuan</p> <p>a. Memiliki kriteria dan prosedur penilaian PkM paling sedikit menyangkut aspek hasil PkM dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan</p>				

	<p>kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa;</p> <p>b. Peningkatan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi PkM dalam menjalankan program PkM secara berkelanjutan;</p> <p>c. Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana PkM dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM;</p> <p>d. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah dan jenis PkM;</p> <p>e. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program PkM paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.</p> <p>f. Tersedia dokumen lengkap kebijakan pimpinan PT (Rektor, Dekan, atau Koorprodi) tentang PkM, dan telah disosialisasikan, dilaksanakan, dievaluasi dan ditindaklanjuti</p>				
--	---	--	--	--	--

8. PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
24.1 Perguruan Tinggi wajib menyediakan Pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada	Adanya pedoman mekanisme pendanaan kegiatan PkM				
	Adanya pelaksanaan penjaminan mutu mekanisme pendanaan kegiatan PkM				

masyarakat berdasarkan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang telah disusun sesuai peraturan yang berlaku					
24.2 Perguruan tinggi wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat berdasarkan peraturan yang berlaku	Adanya RBA atau sumber dana lain yang mendukung keterlaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat				
24.3 Perguruan Tinggi dapat memberikan fasilitas Pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari DRPM, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat	Adanya sumber dana lain dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat				
24.4 Perguruan Tinggi mengalokasikan pendanaan khusus untuk kegiatan	Adanya pengalokasian dana untuk membiayai: a. perencanaan, b. pelaksanaan,				

pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dialokasikan sesuai dengan panduan	<ul style="list-style-type: none"> c. pengendalian, pemantauan dan d. evaluasi, e. pelaporan, serta f. diseminasi hasil 				
24.5 Perguruan Tinggi wajib mengatur mekanisme pendanaan dalam kegiatan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat	<p>Adanya pengelolaan manajemen dan peningkatan kapasitas pengelola dengan tugas</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) mengatur pengeluaran dana 2) mengatur pembiayaan yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; dan b. peningkatan kapasitas pelaksana 				
24.6 Perguruan Tinggi wajib melakukan pengawasan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat	Semua kegiatan PkM yang terdanai memiliki laporan kemajuan dan pertanggungjawaban kegiatan tentang penyerapan dana selama 70% dan 100% kegiatan				
	Semua kegiatan PkM yang terdanai memiliki laporan hasil audit oleh satuan pengawas internal				
24.7 Perguruan tinggi melaksanakan respon pengguna tentang pelayanan pendanaan kegiatan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun	Ada laporan respon pengguna tentang layanan pendanaan kegiatan pembiayaan secara berkelanjutan dan konsisten pada setiap tahun				

24.8 LPPM memiliki rekapitulasi kegiatan PkM yang relevan dengan bidang keahlian program studi minimal 1 kali dalam 1 tahun, baik dengan pembiayaan PT/mandiri, pembiayaan dalam negeri, maupun pembiayaan luar	Terpenuhinya jumlah PkM dosen yang melibatkan mahasiswa $\geq 25\%$ di setiap prodi				
---	---	--	--	--	--

Keterangan: iya / tidak* = jika 'ya' maka perlu menambahkan bukti pendukung

Ada / tidak* = jika 'ada' maka perlu menambahkan bukti pendukung

L* = Lebih (melebihi Standar Mutu Unesa)

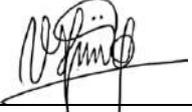
Surabaya, November 2023

Auditor : M. Ali Masnun
Auditi : Dr. Nugroho Hari Purnomo, M.Si



	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	No : KKA-S.....-01
	BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Ringkasan Kondisi Audit	

Auditi				Kriteria					
Dr. Nugroho Hari Purnomo, M.Si.				Standar Pengabdian kepada Masyarakat 17-24					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
I4.1.2				14 November 2023					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
		M. Ali Masnun							
Distribusi		Auditi		Auditor		BPM		Arsip	
No Kondisi	Diskripsi Kondisi						Kategori (OB / KTS)		
1									
2									
dst									

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Nugroho Hari Purnomo, M.Si.		Ketua Auditor	M. Ali Masnun	

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA				No. 9 – 16 – PKM- Rev02					
	BADAN PENJAMINAN MUTU Gedung Rektorat Unesa Kampus Lidah Surabaya									
AUDIT MUTU INTERNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT										
Auditi					Tahap Audit					
Dr. Sukma Perdana Prasetya, M.T.										
Lokasi			Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
https://meet.google.com/vis-fpxu-pcq						15 November 2023				
Wakil Auditi			Auditor Ketua			Auditor Anggota				
1. 2.			M. Ali Masnun			1. 2.				
Distribusi			Auditi		Auditor		BPM		Arsip	

1. HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
17.1 LPPM memiliki panduan hasil pengabdian kepada masyarakat yang menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi.	Adanya panduan hasil pengabdian kepada masyarakat yang menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi.				
	Adanya kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat yang menerapkan mengamalkan, dan membudayakan salah satu aspek: a. pendidikan, b. ilmu pengetahuan, c. sains, d. teknologi, e. olahraga, f. sastra, dan seni				
17.2 LPPM mengupayakan hasil pengabdian kepada masyarakat ditujukan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat.	Adanya kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat yang dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat melalui: a) pemanfaatan teknologi tepat guna, lebih dari 17% b) pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, sains, teknologi, olahraga, sastra, dan seni sebesar 25% c) pengembangan bahan ajar atau modul pelatihan lebih dari 25%				
17.3 Perguruan Tinggi memiliki kebijakan untuk menghasilkan	Adanya lebih dari 7 karya prototipe per tahun yang dapat digunakan industri dari hasil kegiatan PkM				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
suatu karya prototipe industri					
17.4 Prodi melaksanakan analisis hasil kegiatan PkM	Prodi menganalisis hasil kegiatan PkM dengan ketercapain standar prodi dan peta jalan PkM dosen dan mahasiswa	√		Ada dokumen analisis hasil kegiatan PkM	
	Lebih dari 25% hasil PkM digunakan dalam pembelajaran	√			
	Ada lebih dari 25% hasil PkM yang melibatkan mahasiswa	√		Pelibatan mahasiswa sebagai peserta PKM, karena sasaran PKM rata-rata adalah guru. Sementara untuk profil mahasiswa S2 Pendidikan Geografi mayoritas adalah guru	

2. ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
18.1 LPPM dan Prodi mempunyai peta jalan, standar dan pedoman pelaksanaan PkM	Ada dokumen kebijakan peta jalan, standar dan pedoman pelaksanaan PkM di LPPM dan prodi yang mampu digunakan dalam menjamin mutu isi PkM	√		Ada dokumen peta jalan PkM	
18.2 LPPM mengupayakan Isi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada kebutuhan masyarakat	Ada peningkatan hasil pengabdian kepada masyarakat yang berasal dari hasil penelitian sebesar 30% setiap tahun				
	Ada peningkatan jumlah PkM yang mampu memecahkan masalah dan menerapkan teknologi tepat guna sebesar 35% setiap tahun				
	Ada peningkatan jumlah PkM yang diterapkan langsung oleh DU/DI, masyarakat, ataupun pemerintah sebesar 35% setiap tahun.				
18.3 LPPM memiliki pedoman tentang Isi	<ul style="list-style-type: none"> Adanya peningkatan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui 				

pengabdian kepada masyarakat memiliki kedalaman dan keluasan materi	respon pengguna				
	<ul style="list-style-type: none"> Adanya peningkatan pencapaian hak kekayaan intelektual 35% setiap tahun 				
	Adanya evaluasi peta map tentang arah pengembangan dari isi pengabdian masyarakat di PT				

3. PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
19.1 LPPM memiliki panduan Proses pengabdian kepada masyarakat terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan sesuai aturan yang berlaku	Adanya pedoman yang memandu kesesuaian dengan Renstra Abdimas LPPM Unesa melalui tahapan: pengajuan proposal, pelaksanaan, dan pelaporan sesuai dengan buku panduan yang berlaku				
	Adanya monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan, dan pelaporan sesuai dengan buku panduan yang berlaku				
19.2 LPPM memiliki panduan Bentuk PkM yang dapat dilakukan	Bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa: <ul style="list-style-type: none"> • pelayanan kepada masyarakat; • penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, sastra, dan seni sesuai dengan bidang keahliannya; 				

	<ul style="list-style-type: none"> • peningkatan kapasitas masyarakat; • pemberdayaan masyarakat 				
19.3 LPPM memiliki panduan Proses pelaksanaan PkM memenuhi standar yang ditetapkan	<ul style="list-style-type: none"> • Proses pelaksanaan PkM hendaknya memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, lingkungan, dan melibatkan mahasiswa dari awal sampai akhir 				
	Adanya dokumen standar mutu pelaksanaan PkM yang dikaji secara berkesinambungan				
	Adanya monev pelaksanaan PkM berdasarkan standar yang ditetapkan				
19.4 LPPM memiliki panduan Proses PkM oleh mahasiswa yang terarah dan terevaluasi	Proses PkM mahasiswa dilaksanakan secara terprogram dan terarah sesuai dengan buku panduan yang berlaku				
	Adanya dokumen standar mutu pelaksanaan PkM mahasiswa yang dikaji secara kontinyu				
	Adanya monev pelaksanaan PkM mahasiswa berdasarkan standar yang ditetapkan				
19.5 Kegiatan PkM dosen, tenaga pendidikan dan mahasiswa wajib diimplementasikan dalam industri dan pembelajaran di PT serta diusahakan pengurusan hak paten	Adanya kegiatan pembelajaran dari hasil Kegiatan PkM dosen, tenaga pendidikan dan mahasiswa setidaknya sejumlah dosen pada tiga tahun	√			
	Adanya penerapan implementasi proses hasil kegiatan PkM dosen, tenaga pendidikan dan mahasiswa pada industri yang sesuai dengan bidangnya				
	Adanya kenaikan hak dan paten setiap tahun dengan jumlah 20% dari sejumlah kegiatan PkM yang ada di PT				

4. PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
20.1 LPPM memiliki pedoman Penilaian PkM yang dilakukan dengan prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan sesuai aturan yang berlaku	Penilaian PkM memenuhi ketentuan dan tahapan yang ditentukan: a) laporan kemajuan, b) monitoring dan evaluasi, c) seminar hasil				
20.2 LPPM melakukan Penilaian PkM mengacu pada kriteria minimal	Penilaian memenuhi a. tingkat kepuasan masyarakat; b. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; c. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, sastra, dan seni di masyarakat secara berkelanjutan; d. terciptanya pengayaan sumber belajar				

	<p>dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau</p> <p>e. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan</p>				
20.3 LPPM melakukan evaluasi kegiatan penilaian hasil PkM dalam menjaga mutu proses kegiatan secara kontinyu	Ada kegiatan evaluasi pada saat melakukan penilaian hasil PkM melalui instrumen yang sah dan akurat sehingga dapat didapatkan hasil evaluasi untuk peningkatan mutu kegiatan PkM				

5. PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
21.1 LPPM memiliki pedoman tentang kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan PkM yang dilaksanakan setiap periode pengajuan Proposal PkM	Tim Pelaksana wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan				
	Pelaksanaan sesuai dengan sasaran, jadwal dan lama pelaksanaan yang direncanakan				
	Pelaksanaan dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.				
	Pelaksanaan PkM memberikan kontribusi terhadap pengembangan wilayah, inovasi dan alih teknologi, solusi persoalan masyarakat, pengentasan kemiskinan, dan pemberdayaan masyarakat.				
21.2 Pelaksana pengabdian kepada masyarakat	Adanya CV pengabdian yang memuat kualifikasi akademik dan hasil penelitian yang pernah dilakukan				

sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan: a. kualifikasi akademik; dan b. hasil pengabdian kepada masyarakat berdasarkan ketentuan yang berlaku	Adanya monitoring dan evaluasi yang dapat memantau dengan baik, terjadwal dan konsisten				
	Hasil PkM dikembangkan sesuai kualifikasi akademik, dilakukan tindak lanjut, mengintegrasikan hasil pada pembelajaran dan dipublikasikan sekurangnya melalui seminar regional				
	Pelaksanaan PKM difasilitasi lembaga dengan baik, ada dukungan kerjasama sarpras, ada penghargaan bagi pelaksana PkM berprestasi				
21.3 Dalam melaksanakan PkM, DTSPS melibatkan mahasiswa PS	Lebih dari 25% PkM DTSPS melibatkan mahasiswa dalam 3 tahun terakhir				

6. SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
22.1 Perguruan Tinggi Wajib memiliki kebijakan menyediakan fasilitas Sarana dan prasarana PkM memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat setiap tahun sesuai dengan Renstra	Adanya SOP yang mengatur peningkatan layanan fasilitas sarpras oleh lembaga yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses PkM dalam rangka memenuhi hasil PkM				
	Adanya dokumen inventaris yang baik dan lengkap dalam memenuhi kebutuhan kegiatan PkM				
22.2 Perguruan Tinggi wajib memberikan ijin penggunaan fasilitas Sarana dan Prasarana	Adanya ijin dari perguruan tinggi untuk menggunakan fasilitas; a. terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola				

guna mendukung keterlaksanaan Kegiatan PkM yang diadakan setiap tahunnya.	perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan; b. proses pembelajaran; dan kegiatan penelitian				
22.3 Perguruan Tinggi wajib menjamin pemenuhan standar pada Sarana dan prasarana sesuai aturan yang berlaku	Sarana dan prasarana PkM memenuhi unsur keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pengabdian, masyarakat, dan lingkungan				
22.4 Prodi wajib memberikan dukungan fasilitas sarana dan prasarana jika LPPM telah memberikan izin	Adanya dokumen penggunaan sarana dan prasarana kegiatan PkM di prodi	√			
	Adanya catatan keterlibatan prodi dalam pelaksanaan kegiatan PkM sesuai dengan peta jalan kegiatan PkM di prodi	√			
22.5 PT melakukan survey kepuasan pelanggan secara berkala	Ada instrumen survei kepuasan pelanggan yang sah				
	Ada hasil analisis survei kepuasan pelanggan tentang fasilitas sarana dan prasarana				

7. PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
23.1 Perguruan Tinggi memiliki kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan PkM memiliki kriteria kesesuaian dengan <ol style="list-style-type: none"> a. Renstra Abdimas LPPM Unesa b. Road map dengan PkM kemenristekdikti c. Kriteria minimal pengelolaan PkM yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, dan pelaporan 2. Adanya Surat Perintah Kerja (SPK) 3. Adanya prosedur mutu, pemantauan, dan evaluasi 4. Adanya Laporan kegiatan yang sesuai 				
23.2 Perguruan Tinggi Wajib membentuk	Pengelolaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dikelola dengan baik				

<p>Unit Pengelola PkM yang bertugas untuk melakukan Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya</p>	<p>sesuai dengan OTK.</p>				
<p>23.3 Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Perguruan wajib melakukan pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>Adanya sinergi yang terlembaga dengan baik antara LPPM dengan Pusat Pengembangan sebagai unit kerja pendukung</p>				
<p>23.4 LPPM memiliki kebijakan tertulis pimpinan PT (Rektor, Dekan, atau Ketua prodi) tentang pengabdian kepada masyarakat (renstra, pembuatan peta jalan PkM, dan pelaksana PkM di PT atau UPPS)</p>	<p>Adanya peraturan, panduan, dan sistem Penjaminan mutu internal kegiatan PkM; memiliki RENSTRA PkM yang merupakan RENSTRA universitas dengan ketentuan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki kriteria dan prosedur penilaian PkM paling sedikit menyangkut aspek hasil PkM dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa; b. Peningkatan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi PkM dalam menjalankan program PkM secara berkelanjutan; c. Memiliki panduan tentang kriteria 				

	<p>pelaksana PkM dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM;</p> <p>d. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah dan jenis PkM;</p> <p>e. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program PkM paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.</p> <p>f. Tersedia dokumen lengkap kebijakan pimpinan PT (Rektor, Dekan, atau Koorprodi) tentang PkM, dan telah disosialisasikan, dilaksanakan, dievaluasi dan ditindaklanjuti</p>				
--	--	--	--	--	--

8. PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
24.1 Perguruan Tinggi wajib menyediakan Pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan	Adanya pedoman mekanisme pendanaan kegiatan PkM				
	Adanya pelaksanaan penjaminan mutu mekanisme pendanaan kegiatan PkM				

<p>pengabdian kepada masyarakat yang telah disusun sesuai peraturan yang berlaku</p>					
<p>24.2 Perguruan tinggi wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat berdasarkan peraturan yang berlaku</p>	<p>Adanya RBA atau sumber dana lain yang mendukung keterlaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat</p>				
<p>24.3 Perguruan Tinggi dapat memberikan fasilitas Pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari DRPM, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat</p>	<p>Adanya sumber dana lain dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat</p>				
<p>24.4 Perguruan Tinggi mengalokasikan pendanaan khusus untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dialokasikan sesuai dengan panduan</p>	<p>Adanya pengalokasian dana untuk membiayai:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perencanaan, b. pelaksanaan, c. pengendalian, pemantauan dan d. evaluasi, e. pelaporan, serta f. diseminasi hasil 				
<p>24.5 Perguruan Tinggi</p>	<p>Adanya pengelolaan manajemen dan</p>				

wajib mengatur mekanisme pendanaan dalam kegiatan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat	<p>peningkatan kapasitas pengelola dengan tugas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) mengatur pengeluaran dana 2) mengatur pembiayaan yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; dan b. peningkatan kapasitas pelaksana 				
24.6 Perguruan Tinggi wajib melakukan pengawasan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat	Semua kegiatan PkM yang terdanai memiliki laporan kemajuan dan pertanggungjawaban kegiatan tentang penyerapan dana selama 70% dan 100% kegiatan				
	Semua kegiatan PkM yang terdanai memiliki laporan hasil audit oleh satuan pengawas internal				
24.7 Perguruan tinggi melaksanakan respon pengguna tentang pelayanan pendanaan kegiatan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun	Ada laporan respon pengguna tentang layanan pendanaan kegiatan pembiayaan secara berkelanjutan dan konsisten pada setiap tahun				
24.8 LPPM memiliki rekapitulasi kegiatan PkM yang relevan dengan bidang keahlian program studi minimal 1 kali	Terpenuhinya jumlah PkM dosen yang melibatkan mahasiswa $\geq 25\%$ di setiap prodi				

dalam 1 tahun, baik dengan pembiayaan PT/mandiri, pembiayaan dalam negeri, maupun pembiayaan luar					
---	--	--	--	--	--

Keterangan: iya / tidak* = jika 'ya' maka perlu menambahkan bukti pendukung

Ada / tidak* = jika 'ada' maka perlu menambahkan bukti pendukung

L* = Lebih (melebihi Standar Mutu Unesa)

Surabaya, 15 November 2023

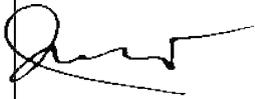
Auditor : M. Ali Masnun

Auditi : Dr. Sukma Perdana Prasetya, M.T.



	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	No : KKA-S.....-01
	BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Ringkasan Kondisi Audit	

Auditi				Kriteria					
Dr. Sukma Perdana Prasetya, M.T.				Standar Pengabdian kepada Masyarakat 17-24					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
https://meet.google.com/vis-fpxu-pcq				15 November 2023					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
		M. Ali Masnun							
Distribusi		Auditi		Auditor		BPM		Arsip	
No Kondisi	Diskripsi Kondisi							Kategori (OB / KTS)	
1									
2									
dst									

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Sukma Perdana Prasetya, M.T.		Ketua Auditor	M. Ali Masnun	

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA				No. 9 – 16 – PKM- Rev02			
	BADAN PENJAMINAN MUTU Gedung Rektorat Unesa Kampus Lidah Surabaya							
AUDIT MUTU INTERNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT								
Auditi				Tahap Audit				
Maya Mustika Kartika Sari, S.Sos., M.IP								
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit				
R. Dosen Prodi PPKN, Gedung i-1 FISH				13 November 2023				
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota				
1. 2.		Putri Aisyiyah RD		1. 2.				
Distribusi		Auditi		Auditor		BPM	Arsip	

1. HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
17.1 LPPM memiliki panduan hasil pengabdian kepada masyarakat yang menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi.	Adanya panduan hasil pengabdian kepada masyarakat yang menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi.				
	Adanya kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat yang menerapkan mengamalkan, dan membudayakan salah satu aspek: a. pendidikan, b. ilmu pengetahuan, c. sains, d. teknologi, e. olahraga, f. sastra, dan seni				
17.2 LPPM mengupayakan hasil pengabdian kepada masyarakat ditujukan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat.	Adanya kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat yang dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat melalui: a) pemanfaatan teknologi tepat guna, lebih dari 17% b) pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, sains, teknologi, olahraga, sastra, dan seni sebesar 25% c) pengembangan bahan ajar atau modul pelatihan lebih dari 25%				
17.3 Perguruan Tinggi memiliki kebijakan	Adanya lebih dari 7 karya prototipe per tahun yang dapat digunakan industri dari				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
untuk menghasilkan suatu karya prototipe industri	hasil kegiatan PkM				
17.4 Prodi melaksanakan analisis hasil kegiatan PkM	Prodi menganalisis hasil kegiatan PkM dengan ketercapaian standar prodi dan peta jalan PkM dosen dan mahasiswa	v		terlampir	
	Lebih dari 25% hasil PkM digunakan dalam pembelajaran	v		Terlampir (ppt perkuliahan)	Sebagai referensi dalam pembelajaran, misal dalam mata kuliah: Pendidikan Kesadaran Hukum, Pendidikan anti korupsi, studi masyarakat Indonesia
	Ada lebih dari 25% hasil PkM yang melibatkan mahasiswa	v		Lampiran nama-nama mahasiswa	

2. ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
18.1 LPPM dan Prodi mempunyai peta jalan, standar dan pedoman pelaksanaan PkM	Ada dokumen kebijakan peta jalan, standar dan pedoman pelaksanaan PkM di LPPM dan prodi yang mampu digunakan dalam menjamin mutu isi PkM	v		terlampir	
18.2 LPPM mengupayakan Isi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada kebutuhan masyarakat	Ada peningkatan hasil pengabdian kepada masyarakat yang berasal dari hasil penelitian sebesar 30% setiap tahun				
	Ada peningkatan jumlah PkM yang mampu memecahkan masalah dan menerapkan teknologi tepat guna sebesar 35% setiap tahun				
	Ada peningkatan jumlah PkM yang diterapkan langsung oleh DU/DI, masyarakat, ataupun pemerintah sebesar 35% setiap tahun.				

18.3 LPPM memiliki pedoman tentang Isi pengabdian kepada masyarakat memiliki kedalaman dan keluasan materi	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya peningkatan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui respon pengguna • Adanya peningkatan pencapaian hak kekayaan intelektual 35% setiap tahun 				
	Adanya evaluasi peta map tentang arah pengembangan dari isi pengabdian masyarakat di PT				

3. PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
19.1 LPPM memiliki panduan Proses pengabdian kepada masyarakat terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan sesuai aturan yang berlaku	Adanya pedoman yang memandu kesesuaian dengan Renstra Abdimas LPPM Unesa melalui tahapan: pengajuan proposal, pelaksanaan, dan pelaporan sesuai dengan buku panduan yang berlaku				
	Adanya monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan, dan pelaporan sesuai dengan buku panduan yang berlaku				
19.2 LPPM memiliki panduan Bentuk PkM yang dapat dilakukan	Bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa: <ul style="list-style-type: none"> • pelayanan kepada masyarakat; 				

	<ul style="list-style-type: none"> • penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, sastra, dan seni sesuai dengan bidang keahliannya; • peningkatan kapasitas masyarakat; • pemberdayaan masyarakat 				
19.3 LPPM memiliki panduan Proses pelaksanaan PkM memenuhi standar yang ditetapkan	<ul style="list-style-type: none"> • Proses pelaksanaan PkM hendaknya memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, lingkungan, dan melibatkan mahasiswa dari awal sampai akhir 				
	Adanya dokumen standar mutu pelaksanaan PkM yang dikaji secara berkesinambungan				
	Adanya monev pelaksanaan PkM berdasarkan standar yang ditetapkan				
19.4 LPPM memiliki panduan Proses PkM oleh mahasiswa yang terarah dan terevaluasi	Proses PkM mahasiswa dilaksanakan secara terprogram dan terarah sesuai dengan buku panduan yang berlaku				
	Adanya dokumen standar mutu pelaksanaan PkM mahasiswa yang dikaji secara kontinyu				
	Adanya monev pelaksanaan PkM mahasiswa berdasarkan standar yang ditetapkan				
19.5 Kegiatan PkM dosen, tenaga pendidikan dan mahasiswa wajib diimplementasikan dalam industri dan	Adanya kegiatan pembelajaran dari hasil Kegiatan PkM dosen, tenaga pendidikan dan mahasiswa setidaknya sejumlah dosen pada tiga tahun	v		terlampir	
	Adanya penerapan implementasi proses hasil kegiatan PkM dosen, tenaga				

pembelajaran di PT serta diusahakan pengurusan hak paten	pendidikan dan mahasiswa pada industri yang sesuai dengan bidangnya				
	Adanya kenaikan hak paten setiap tahun dengan jumlah 20% dari sejumlah kegiatan PkM yang ada di PT				

4. PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
20.1 LPPM memiliki pedoman Penilaian PkM yang dilakukan dengan prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan sesuai aturan yang berlaku	Penilaian PkM memenuhi ketentuan dan tahapan yang ditentukan: a) laporan kemajuan, b) monitoring dan evaluasi, c) seminar hasil				
20.2 LPPM melakukan Penilaian PkM mengacu pada kriteria minimal	Penilaian memenuhi a. tingkat kepuasan masyarakat; b. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;				

	<p>c. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, sastra, dan seni di masyarakat secara berkelanjutan;</p> <p>d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau</p> <p>e. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan</p>				
20.3 LPPM melakukan evaluasi kegiatan penilaian hasil PkM dalam menjaga mutu proses kegiatan secara kontinyu	Ada kegiatan evaluasi pada saat melakukan penilaian hasil PkM melalui instrumen yang sah dan akurat sehingga dapat didapatkan hasil evaluasi untuk peningkatan mutu kegiatan PkM				

5. PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
21.1 LPPM memiliki pedoman tentang kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan PkM yang dilaksanakan setiap periode pengajuan Proposal PkM	Tim Pelaksana wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan				
	Pelaksanaan sesuai dengan sasaran, jadwal dan lama pelaksanaan yang direncanakan				
	Pelaksanaan dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.				
	Pelaksanaan PkM memberikan kontribusi terhadap pengembangan wilayah, inovasi dan alih teknologi, solusi persoalan				

	masyarakat, pengentasan kemiskinan, dan pemberdayaan masyarakat.				
21.2 Pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan: a. kualifikasi akademik; dan b. hasil pengabdian kepada masyarakat berdasarkan ketentuan yang berlaku	Adanya CV pengabdian yang memuat kualifikasi akademik dan hasil penelitian yang pernah dilakukan				
	Adanya monitoring dan evaluasi yang dapat memantau dengan baik, terjadwal dan konsisten				
	Hasil PkM dikembangkan sesuai kualifikasi akademik, dilakukan tindak lanjut, mengintegrasikan hasil pada pembelajaran dan dipublikasikan sekurangnya melalui seminar regional				
	Pelaksanaan PKM difasilitasi lembaga dengan baik, ada dukungan kerjasama sarpras, ada penghargaan bagi pelaksana PkM berprestasi				
21.3 Dalam melaksanakan PkM, DTSPS melibatkan mahasiswa PS	Lebih dari 25% PkM DTSPS melibatkan mahasiswa dalam 3 tahun terakhir				

6. SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
22.1 Perguruan Tinggi Wajib memiliki kebijakan menyediakan fasilitas Sarana dan prasarana PkM memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat setiap tahun sesuai dengan Renstra	Adanya SOP yang mengatur peningkatan layanan fasilitas sarpras oleh lembaga yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses PkM dalam rangka memenuhi hasil PkM				
	Adanya dokumen inventaris yang baik dan lengkap dalam memenuhi kebutuhan kegiatan PkM				

22.2 Perguruan Tinggi wajib memberikan ijin penggunaan fasilitas Sarana dan Prasarana guna mendukung keterlaksanaan Kegiatan PkM yang diadakan setiap tahunnya.	Adanya ijin dari perguruan tinggi untuk menggunakan fasilitas; a. terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan; b. proses pembelajaran; dan kegiatan penelitian				
22.3 Perguruan Tinggi wajib menjamin pemenuhan standar pada Sarana dan prasarana sesuai aturan yang berlaku	Sarana dan prasarana PkM memenuhi unsur keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pengabdian, masyarakat, dan lingkungan				
22.4 Prodi wajib memberikan dukungan fasilitas sarana dan prasarana jika LPPM telah memberikan ijin	Adanya dokumen penggunaan sarana dan prasarana kegiatan PkM di prodi	v		Tidak ada bukti pendukung	PKM tentang kesadaran gender pada anak SMP, menggunakan ruang seminar Prodi PPKN
	Adanya catatan keterlibatan prodi dalam pelaksanaan kegiatan PkM sesuai dengan peta jalan kegiatan PkM di prodi	v		Terlampir (laporan penelitian)	
22.5 PT melakukan survey kepuasan pelanggan secara berkala	Ada instrumen survei kepuasan pelanggan yang sah				
	Ada hasil analisis survei kepuasan pelanggan tentang fasilitas sarana dan prasarana				

7. PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
23.1 Perguruan Tinggi memiliki kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan	1. Kegiatan PkM memiliki kriteria kesesuaian dengan <ol style="list-style-type: none"> a. Renstra Abdimas LPPM Unesa b. Road map dengan PkM kemenristekdikti c. Kriteria minimal pengelolaan PkM yang terdiri atas perencanaan, 				

<p>evaluasi, serta pelaporan kegiatan.</p>	<p>pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, dan pelaporan 2. Adanya Surat Perintah Kerja (SPK) 3. Adanya prosedur mutu, pemantauan, dan evaluasi 4. Adanya Laporan kegiatan yang sesuai</p>				
<p>23.2 Perguruan Tinggi Wajib membentuk Unit Pengelola PkM yang bertugas untuk melakukan Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya</p>	<p>Pengelolaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dikelola dengan baik sesuai dengan OTK.</p>				
<p>23.3 Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Perguruan wajib melakukan pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>Adanya sinergi yang terlembaga dengan baik antara LPPM dengan Pusat Pengembangan sebagai unit kerja pendukung</p>				
<p>23.4 LPPM memiliki kebijakan tertulis pimpinan PT (Rektor, Dekan, atau Ketua prodi) tentang pengabdian kepada masyarakat (renstra,</p>	<p>Adanya peraturan, panduan, dan sistem Penjaminan mutu internal kegiatan PkM; memiliki RENSTRA PkM yang merupakan RENSTRA universitas dengan ketentuan a. Memiliki kriteria dan prosedur penilaian PkM paling sedikit menyangkut aspek hasil PkM dalam menerapkan, mengamalkan, dan</p>				

<p>pembuatan peta jalan PkM, dan pelaksana PkM di PT atau UPPS)</p>	<p>membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa;</p> <p>b. Peningkatan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi PkM dalam menjalankan program PkM secara berkelanjutan;</p> <p>c. Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana PkM dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM;</p> <p>d. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah dan jenis PkM;</p> <p>e. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program PkM paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.</p> <p>f. Tersedia dokumen lengkap kebijakan pimpinan PT (Rektor, Dekan, atau Koorprodi) tentang PkM, dan telah disosialisasikan, dilaksanakan, dievaluasi dan ditindaklanjuti</p>				
---	--	--	--	--	--

8. PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
24.1 Perguruan Tinggi wajib menyediakan Pendanaan dan	Adanya pedoman mekanisme pendanaan kegiatan PkM				
	Adanya pelaksanaan penjaminan mutu mekanisme pendanaan kegiatan PkM				

<p>pembiayaan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang telah disusun sesuai peraturan yang berlaku</p>					
<p>24.2 Perguruan tinggi wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat berdasarkan peraturan yang berlaku</p>	<p>Adanya RBA atau sumber dana lain yang mendukung keterlaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat</p>				
<p>24.3 Perguruan Tinggi dapat memberikan fasilitas Pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari DRPM, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat</p>	<p>Adanya sumber dana lain dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat</p>				
<p>24.4 Perguruan Tinggi mengalokasikan</p>	<p>Adanya pengalokasian dana untuk membiayai:</p>				

pendanaan khusus untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dialokasikan sesuai dengan panduan	<ul style="list-style-type: none"> a. perencanaan, b. pelaksanaan, c. pengendalian, pemantauan dan d. evaluasi, e. pelaporan, serta f. diseminasi hasil 				
24.5 Perguruan Tinggi wajib mengatur mekanisme pendanaan dalam kegiatan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat	<p>Adanya pengelolaan manajemen dan peningkatan kapasitas pengelola dengan tugas</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) mengatur pengeluaran dana 2) mengatur pembiayaan yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; dan b. peningkatan kapasitas pelaksana 				
24.6 Perguruan Tinggi wajib melakukan pengawasan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat	Semua kegiatan PkM yang terdanai memiliki laporan kemajuan dan pertanggungjawaban kegiatan tentang penyerapan dana selama 70% dan 100% kegiatan				
	Semua kegiatan PkM yang terdanai memiliki laporan hasil audit oleh satuan pengawas internal				
24.7 Perguruan tinggi melaksanakan respon pengguna tentang pelayanan pendanaan kegiatan pembiayaan pengabdian kepada	Ada laporan respon pengguna tentang layanan pendanaan kegiatan pembiayaan secara berkelanjutan dan konsisten pada setiap tahun				

masyarakat pada setiap tahun					
24.8 LPPM memiliki rekapitulasi kegiatan PkM yang relevan dengan bidang keahlian program studi minimal 1 kali dalam 1 tahun, baik dengan pembiayaan PT/mandiri, pembiayaan dalam negeri, maupun pembiayaan luar	Terpenuhinya jumlah PkM dosen yang melibatkan mahasiswa $\geq 25\%$ di setiap prodi				

Keterangan: iya / tidak* = jika 'ya' maka perlu menambahkan bukti pendukung

Ada / tidak* = jika 'ada' maka perlu menambahkan bukti pendukung

L* = Lebih (melebihi Standar Mutu Unesa)

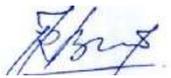
Surabaya, 13 November 2023

Auditor : Putri Aisyiyah Rachma Dewi

Auditi : Maya Mustika Kartika Sari, S.Sos., M.IP

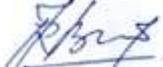
	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	No : KKA-S.....-01
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Ringkasan Kondisi Audit		

Auditi				Kriteria			
Maya Mustika Kartika Sari, S.Sos., M.IP				Standar Pengabdian kepada Masyarakat 17-24			
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit			
R. Korprodi PPKN, i5 FISH				13 November 2023			
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota			
		Putri Aisyiyah R.D					
Distribusi		Auditi		Auditor		BPM	Arsip
No Kondisi	Diskripsi Kondisi						Kategori (OB / KTS)
1	Tidak ada temuan						
2							
dst							

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Maya Mustika Kartika Sari, S.Sos., M.IP		Ketua Auditor	Putri Aisyiyah R.D	

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	No : KKA-S.....-01
	SATUAN PENJAMINAN MUTU	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit		

Auditi				Kriteria			
Maya Mustika Kartika Sari, S.Sos., M.IP				Standar Pengabdian kepada Masyarakat 17-24			
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit			
R. Korprodi PPKN, il FISH				13 November 2023			
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota			
-		Putri Aisyiyah RD		-			
Distribusi		Auditi		Auditor		BPM	Arsip

Deskripsi Temuan	Tidak ada temuan					
Kriteria	-					
Akar Penyebab	-					
Akibat	-					
Rekomendasi	-					
Tanggapan Auditi	-					
Rencana Perbaikan	-					
Jadwal Perbaikan	-		<i>Penanggung Jawab</i>			
Rencana Pencegahan	-					
Jadwal Pencegahan	-		<i>Penanggung Jawab</i>			
Tempat Persetujuan						
Pimpinan Auditi	Maya Mustika Kartika Sari, S.Sos., M.IP	Tanda Tangan 	Ketua Auditor	Putri Aisyiyah R.D, S.Sos., M.Med.Kom	Tanda Tangan 	

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA				No. 9 – 16 – PKM- Rev02			
	BADAN PENJAMINAN MUTU Gedung Rektorat Unesa Kampus Lidah Surabaya							
AUDIT MUTU INTERNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT								
Auditi					Tahap Audit			
Lokasi			Ruang Lingkup			Tanggal Audit		
17.01.06						10 November 2023		
Wakil Auditi			Auditor Ketua			Auditor Anggota		
1.						1.		
2.						2.		
Distribusi			Auditi		Auditor		BPM	Arsip

1. HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
17.1 LPPM memiliki panduan hasil pengabdian kepada masyarakat yang menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi.	Adanya panduan hasil pengabdian kepada masyarakat yang menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi.				
	Adanya kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat yang menerapkan mengamalkan, dan membudayakan salah satu aspek: a. pendidikan, b. ilmu pengetahuan, c. sains, d. teknologi, e. olahraga, f. sastra, dan seni				
17.2 LPPM mengupayakan hasil pengabdian kepada masyarakat ditujukan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat.	Adanya kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat yang dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat melalui: a) pemanfaatan teknologi tepat guna, lebih dari 17% b) pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, sains, teknologi, olahraga, sastra, dan seni sebesar 25% c) pengembangan bahan ajar atau modul pelatihan lebih dari 25%				
17.3 Perguruan Tinggi memiliki kebijakan untuk menghasilkan	Adanya lebih dari 7 karya prototipe per tahun yang dapat digunakan industri dari hasil kegiatan PkM				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
suatu karya prototipe industri					
17.4 Prodi melaksanakan analisis hasil kegiatan PkM	Prodi menganalisis hasil kegiatan PkM dengan ketercapain standar prodi dan peta jalan PkM dosen dan mahasiswa	v			Dokumen menyusul
	Lebih dari 25% hasil PkM digunakan dalam pembelajaran	v			Dokumen menyusul
	Ada lebih dari 25% hasil PkM yang melibatkan mahasiswa	v			Dokumen menyusul

2. ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
18.1 LPPM dan Prodi mempunyai peta jalan, standar dan pedoman pelaksanaan PkM	Ada dokumen kebijakan peta jalan, standar dan pedoman pelaksanaan PkM di LPPM dan prodi yang mampu digunakan dalam menjamin mutu isi PkM	v			Dokumen menyusul
18.2 LPPM mengupayakan Isi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada kebutuhan masyarakat	Ada peningkatan hasil pengabdian kepada masyarakat yang berasal dari hasil penelitian sebesar 30% setiap tahun				
	Ada peningkatan jumlah PkM yang mampu memecahkan masalah dan menerapkan teknologi tepat guna sebesar 35% setiap tahun				
	Ada peningkatan jumlah PkM yang diterapkan langsung oleh DU/DI, masyarakat, ataupun pemerintah sebesar 35% setiap tahun.				
18.3 LPPM memiliki pedoman tentang Isi pengabdian kepada masyarakat memiliki kedalaman dan keluasan materi	<ul style="list-style-type: none"> Adanya peningkatan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui respon pengguna Adanya peningkatan pencapaian hak kekayaan intelektual 35% setiap tahun 				
	Adanya evaluasi peta map tentang arah pengembangan dari isi pengabdian masyarakat di PT				

3. PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
19.1 LPPM memiliki panduan Proses pengabdian kepada masyarakat terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan sesuai aturan yang berlaku	Adanya pedoman yang memandu kesesuaian dengan Renstra Abdimas LPPM Unesa melalui tahapan: pengajuan proposal, pelaksanaan, dan pelaporan sesuai dengan buku panduan yang berlaku				
	Adanya monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan, dan pelaporan sesuai dengan buku panduan yang berlaku				
19.2 LPPM memiliki panduan Bentuk PkM yang dapat dilakukan	Bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa: <ul style="list-style-type: none"> • pelayanan kepada masyarakat; • penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, sastra, dan seni sesuai dengan bidang keahliannya; • peningkatan kapasitas masyarakat; • pemberdayaan masyarakat 				
19.3 LPPM memiliki panduan Proses pelaksanaan PkM	<ul style="list-style-type: none"> • Proses pelaksanaan PkM hendaknya memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, 				

memenuhi standar yang ditetapkan	lingkungan, dan melibatkan mahasiswa dari awal sampai akhir				
	Adanya dokumen standar mutu pelaksanaan PkM yang dikaji secara berkesinambungan				
	Adanya monev pelaksanaan PkM berdasarkan standar yang ditetapkan				
19.4 LPPM memiliki panduan Proses PkM oleh mahasiswa yang terarah dan terevaluasi	Proses PkM mahasiswa dilaksanakan secara terprogram dan terarah sesuai dengan buku panduan yang berlaku				
	Adanya dokumen standar mutu pelaksanaan PkM mahasiswa yang dikaji secara kontinyu				
	Adanya monev pelaksanaan PkM mahasiswa berdasarkan standar yang ditetapkan				
19.5 Kegiatan PkM dosen, tenaga pendidikan dan mahasiswa wajib diimplementasikan dalam industri dan pembelajaran di PT serta diusahakan pengurusan haki paten	Adanya kegiatan pembelajaran dari hasil Kegiatan PkM dosen, tenaga pendidikan dan mahasiswa setidaknya sejumlah dosen pada tiga tahun	v			Dokumen menyusul
	Adanya penerapan implementasi proses hasil kegiatan PkM dosen, tenaga pendidikan dan mahasiswa pada industri yang sesuai dengan bidangnya				
	Adanya kenaikan haki dan paten setiap tahun dengan jumlah 20% dari sejumlah kegiatan PkM yang ada di PT				

4. PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
20.1 LPPM memiliki pedoman Penilaian PkM yang dilakukan dengan prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan sesuai aturan yang berlaku	Penilaian PkM memenuhi ketentuan dan tahapan yang ditentukan: a) laporan kemajuan, b) monitoring dan evaluasi, c) seminar hasil				
20.2 LPPM melakukan Penilaian PkM mengacu pada kriteria minimal	Penilaian memenuhi a. tingkat kepuasan masyarakat; b. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; c. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, sastra, dan seni di masyarakat secara berkelanjutan; d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau e. teratasinya masalah sosial dan				

	rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan				
20.3 LPPM melakukan evaluasi kegiatan penilaian hasil PkM dalam menjaga mutu proses kegiatan secara kontinyu	Ada kegiatan evaluasi pada saat melakukan penilaian hasil PkM melalui instrumen yang sah dan akurat sehingga dapat didapatkan hasil evaluasi untuk peningkatan mutu kegiatan PkM				

5. PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
21.1 LPPM memiliki pedoman tentang kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan PkM yang dilaksanakan setiap periode pengajuan Proposal PkM	Tim Pelaksana wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan				
	Pelaksanaan sesuai dengan sasaran, jadwal dan lama pelaksanaan yang direncanakan				
	Pelaksanaan dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.				
	Pelaksanaan PkM memberikan kontribusi terhadap pengembangan wilayah, inovasi dan alih teknologi, solusi persoalan masyarakat, pengentasan kemiskinan, dan pemberdayaan masyarakat.				
21.2 Pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan: a. kualifikasi akademik; dan b. hasil pengabdian	Adanya CV pengabdian yang memuat kualifikasi akademik dan hasil penelitian yang pernah dilakukan				
	Adanya monitoring dan evaluasi yang dapat memantau dengan baik, terjadwal dan konsisten				
	Hasil PkM dikembangkan sesuai kualifikasi akademik, dilakukan tindak				

kepada masyarakat berdasarkan ketentuan yang berlaku	lanjut, mengintegrasikan hasil pada pembelajaran dan dipublikasikan sekurangnya melalui seminar regional				
	Pelaksanaan PKM difasilitasi lembaga dengan baik, ada dukungan kerjasama sarpras, ada penghargaan bagi pelaksana PkM berprestasi				
21.3 Dalam melaksanakan PkM, DTSPS melibatkan mahasiswa PS	Lebih dari 25% PkM DTSPS melibatkan mahasiswa dalam 3 tahun terakhir				

6. SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
22.1 Perguruan Tinggi Wajib memiliki kebijakan menyediakan fasilitas Sarana dan prasarana PkM memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat setiap tahun sesuai dengan Renstra	Adanya SOP yang mengatur peningkatan layanan fasilitas sarpras oleh lembaga yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses PkM dalam rangka memenuhi hasil PkM				
	Adanya dokumen inventaris yang baik dan lengkap dalam memenuhi kebutuhan kegiatan PkM				
22.2 Perguruan Tinggi wajib memberikan ijin penggunaan fasilitas Sarana dan Prasarana guna mendukung keterlaksanaan Kegiatan PkM yang diadakan setiap tahunnya.	Adanya ijin dari perguruan tinggi untuk menggunakan fasilitas; a. terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan; b. proses pembelajaran; dan kegiatan penelitian				
22.3 Perguruan Tinggi wajib menjamin pemenuhan standar	Sarana dan prasarana PkM memenuhi unsur keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pengabdian,				

pada Sarana dan prasarana sesuai aturan yang berlaku	masyarakat, dan lingkungan				
22.4 Podi wajib memberikan dukungan fasilitas sarana dan prasarana jika LPPM telah memberikan ijin	Adanya dokumen penggunaan sarana dan prasarana kegiatan PkM di prodi	v		Laboratorium	
	Adanya catatan keterlibatan prodi dalam pelaksanaan kegiatan PkM sesuai dengan peta jalan kegiatan PkM di prodi	v			Dokumen menyusul
22.5 PT melakukan survey kepuasan pelanggan secara berkala	Ada instrumen survei kepuasan pelanggan yang sah				
	Ada hasil analisis survei kepuasan pelanggan tentang fasilitas sarana dan prasarana				

7. PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
23.1 Perguruan Tinggi memiliki kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan PkM memiliki kriteria kesesuaian dengan <ol style="list-style-type: none"> a. Renstra Abdimas LPPM Unesa b. Road map dengan PkM kemenristekdikti c. Kriteria minimal pengelolaan PkM yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, dan pelaporan 2. Adanya Surat Perintah Kerja (SPK) 3. Adanya prosedur mutu, pemantauan, dan evaluasi 4. Adanya Laporan kegiatan yang sesuai 				
23.2 Perguruan Tinggi Wajib membentuk Unit Pengelola PkM yang bertugas untuk melakukan Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya	Pengelolaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dikelola dengan baik sesuai dengan OTK.				

23.3 Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Perguruan wajib melakukan pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Adanya sinergi yang terlembaga dengan baik antara LPPM dengan Pusat Pengembangan sebagai unit kerja pendukung				
23.4 LPPM memiliki kebijakan tertulis pimpinan PT (Rektor, Dekan, atau Ketua prodi) tentang pengabdian kepada masyarakat (renstra, pembuatan peta jalan PkM, dan pelaksana PkM di PT atau UPPS)	<p>Adanya peraturan, panduan, dan sistem Penjaminan mutu internal kegiatan PkM; memiliki RENSTRA PkM yang merupakan RENSTRA universitas dengan ketentuan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki kriteria dan prosedur penilaian PkM paling sedikit menyangkut aspek hasil PkM dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa; b. Peningkatan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi PkM dalam menjalankan program PkM secara berkelanjutan; c. Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana PkM dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM; d. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah dan jenis PkM; e. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian 				

	<p>kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program PkM paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.</p> <p>f. Tersedia dokumen lengkap kebijakan pimpinan PT (Rektor, Dekan, atau Koorprodi) tentang PkM, dan telah disosialisasikan, dilaksanakan, dievaluasi dan ditindaklanjuti</p>				
--	---	--	--	--	--

8. PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
24.1 Perguruan Tinggi wajib menyediakan Pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang telah disusun sesuai peraturan yang berlaku	Adanya pedoman mekanisme pendanaan kegiatan PkM				
	Adanya pelaksanaan penjaminan mutu mekanisme pendanaan kegiatan PkM				
24.2 Perguruan tinggi wajib menyediakan	Adanya RBA atau sumber dana lain yang mendukung keterlaksanaan kegiatan				

dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat berdasarkan peraturan yang berlaku	pengabdian kepada masyarakat				
24.3 Perguruan Tinggi dapat memberikan fasilitas Pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari DRPM, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat	Adanya sumber dana lain dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat				
24.4 Perguruan Tinggi mengalokasikan pendanaan khusus untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dialokasikan sesuai dengan panduan	Adanya pengalokasian dana untuk membiayai: <ul style="list-style-type: none"> a. perencanaan, b. pelaksanaan, c. pengendalian, pemantauan dan d. evaluasi, e. pelaporan, serta f. diseminasi hasil 				
24.5 Perguruan Tinggi wajib mengatur mekanisme pendanaan dalam kegiatan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat	Adanya pengelolaan manajemen dan peningkatan kapasitas pengelola dengan tugas <ol style="list-style-type: none"> 1) mengatur pengeluaran dana 2) mengatur pembiayaan yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi 				

	<p>proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; dan</p> <p>b. peningkatan kapasitas pelaksana</p>				
24.6 Perguruan Tinggi wajib melakukan pengawasan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat	Semua kegiatan PkM yang terdani memiliki laporan kemajuan dan pertanggungjawaban kegiatan tentang penyerapan dana selama 70% dan 100% kegiatan				
	Semua kegiatan PkM yang terdani memiliki laporan hasil audit oleh satuan pengawas internal				
24.7 Perguruan tinggi melaksanakan respon pengguna tentang pelayanan pendanaan kegiatan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun	Ada laporan respon pengguna tentang layanan pendanaan kegiatan pembiayaan secara berkelanjutan dan konsisten pada setiap tahun				
24.8 LPPM memiliki rekapitulasi kegiatan PkM yang relevan dengan bidang keahlian program studi minimal 1 kali dalam 1 tahun, baik dengan pembiayaan PT/mandiri, pembiayaan dalam negeri, maupun pembiayaan luar	Terpenuhinya jumlah PkM dosen yang melibatkan mahasiswa $\geq 25\%$ di setiap prodi				

Keterangan: iya / tidak* = jika 'ya' maka perlu menambahkan bukti pendukung
Ada / tidak* = jika 'ada' maka perlu menambahkan bukti pendukung
L* = Lebih (melebihi Standar Mutu Unesa)

Surabaya, 10 November 2023

Auditor :
Auditi : Dr. Wisnu,M,Hum.

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	No : KKA-S.....-01
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Ringkasan Kondisi Audit		

Auditi				Kriteria			
Dr. Wisnu, M.Hum.				Standar Pengabdian kepada Masyarakat 17-24			
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit			
I7.01.06		S1 Pend Sejarah		10 November 2023			
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota			
		Dr Rr Nanik Setyowati, M.Si					
Distribusi		Auditi		Auditor		BPM	Arsip
No Kondisi	Diskripsi Kondisi						Kategori (OB / KTS)
1	-						
2	-						
dst	-						

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Wisnu, M.Hum.		Ketua Auditor	Dr. Rr Nanik Setyowati, M.Si	

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	No : KKA-S.....-01
	SATUAN PENJAMINAN MUTU	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit		

Auditi		Kriteria			
Dr. Wisnu,M.Hum.		Standar Pengabdian kepada Masyarakat 17-24			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit			
17.01.06	S1 Pend Sejarah	10 November 2023			
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota			
	Dr. Rr Nanik Setyowati, M.Si	-			
Distribusi	Auditi	Auditor	BPM	Arsip	

Deskripsi Temuan	-					
Kriteria						
Akar Penyebab	-					
Akibat	-					
Rekomendasi	-					
Tanggapan Auditi	-					
Rencana Perbaikan						
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>				
Rencana Pencegahan						
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>				
Tempat Persetujuan						
Pimpinan Auditi	Dr. Wisnu,M.Hum		Ketua Auditor	Dr. Rr Nanik Setyowati, M.Si	Tanda Tangan	

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA				No. 9 – 16 – PKM- Rev02				
	BADAN PENJAMINAN MUTU Gedung Rektorat Unesa Kampus Lidah Surabaya								
AUDIT MUTU INTERNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT									
Auditi				Tahap Audit					
S1 IAN									
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
1.					1.				
2.					2.				
Distribusi		Auditi		Auditor		BPM		Arsip	

1. HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
17.1 LPPM memiliki panduan hasil pengabdian kepada masyarakat yang menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi.	Adanya panduan hasil pengabdian kepada masyarakat yang menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi.				
	Adanya kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat yang menerapkan mengamalkan, dan membudayakan salah satu aspek: a. pendidikan, b. ilmu pengetahuan, c. sains, d. teknologi, e. olahraga, f. sastra, dan seni				
17.2 LPPM mengupayakan hasil pengabdian kepada masyarakat ditujukan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat.	Adanya kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat yang dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat melalui: a) pemanfaatan teknologi tepat guna, lebih dari 17% b) pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, sains, teknologi, olahraga, sastra, dan seni sebesar 25% c) pengembangan bahan ajar atau modul pelatihan lebih dari 25%				
17.3 Perguruan Tinggi memiliki kebijakan untuk menghasilkan	Adanya lebih dari 7 karya prototipe per tahun yang dapat digunakan industri dari hasil kegiatan PkM				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
suatu karya prototipe industri					
17.4 Prodi melaksanakan analisis hasil kegiatan PkM	Prodi menganalisis hasil kegiatan PkM dengan ketercapain standar prodi dan peta jalan PkM dosen dan mahasiswa	√			
	Lebih dari 25% hasil PkM digunakan dalam pembelajaran	√			
	Ada lebih dari 25% hasil PkM yang melibatkan mahasiswa	√			

2. ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
18.1 LPPM dan Prodi mempunyai peta jalan, standar dan pedoman pelaksanaan PkM	Ada dokumen kebijakan peta jalan, standar dan pedoman pelaksanaan PkM di LPPM dan prodi yang mampu digunakan dalam menjamin mutu isi PkM	√			
18.2 LPPM mengupayakan Isi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada kebutuhan masyarakat	Ada peningkatan hasil pengabdian kepada masyarakat yang berasal dari hasil penelitian sebesar 30% setiap tahun				
	Ada peningkatan jumlah PkM yang mampu memecahkan masalah dan menerapkan teknologi tepat guna sebesar 35% setiap tahun				
	Ada peningkatan jumlah PkM yang diterapkan langsung oleh DU/DI, masyarakat, ataupun pemerintah sebesar 35% setiap tahun.				
18.3 LPPM memiliki pedoman tentang Isi pengabdian kepada masyarakat memiliki kedalaman dan keluasan materi	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya peningkatan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui respon pengguna • Adanya peningkatan pencapaian hak kekayaan intelektual 35% setiap tahun 				
	Adanya evaluasi peta map tentang arah pengembangan dari isi pengabdian masyarakat di PT				

3. PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
19.1 LPPM memiliki panduan Proses pengabdian kepada masyarakat terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan sesuai aturan yang berlaku	Adanya pedoman yang memandu kesesuaian dengan Renstra Abdimas LPPM Unesa melalui tahapan: pengajuan proposal, pelaksanaan, dan pelaporan sesuai dengan buku panduan yang berlaku				
	Adanya monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan, dan pelaporan sesuai dengan buku panduan yang berlaku				
19.2 LPPM memiliki panduan Bentuk PkM yang dapat dilakukan	Bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa: <ul style="list-style-type: none"> • pelayanan kepada masyarakat; • penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, sastra, dan seni sesuai dengan bidang keahliannya; • peningkatan kapasitas masyarakat; • pemberdayaan masyarakat 				
19.3 LPPM memiliki panduan Proses pelaksanaan PkM	<ul style="list-style-type: none"> • Proses pelaksanaan PkM hendaknya memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, 				

memenuhi standar yang ditetapkan	lingkungan, dan melibatkan mahasiswa dari awal sampai akhir				
	Adanya dokumen standar mutu pelaksanaan PkM yang dikaji secara berkesinambungan				
	Adanya monev pelaksanaan PkM berdasarkan standar yang ditetapkan				
19.4 LPPM memiliki panduan Proses PkM oleh mahasiswa yang terarah dan terevaluasi	Proses PkM mahasiswa dilaksanakan secara terprogram dan terarah sesuai dengan buku panduan yang berlaku				
	Adanya dokumen standar mutu pelaksanaan PkM mahasiswa yang dikaji secara kontinyu				
	Adanya monev pelaksanaan PkM mahasiswa berdasarkan standar yang ditetapkan				
19.5 Kegiatan PkM dosen, tenaga pendidikan dan mahasiswa wajib diimplementasikan dalam industri dan pembelajaran di PT serta diusahakan pengurusan haki paten	Adanya kegiatan pembelajaran dari hasil Kegiatan PkM dosen, tenaga pendidikan dan mahasiswa setidaknya sejumlah dosen pada tiga tahun	√			
	Adanya penerapan implementasi proses hasil kegiatan PkM dosen, tenaga pendidikan dan mahasiswa pada industri yang sesuai dengan bidangnya				
	Adanya kenaikan haki dan paten setiap tahun dengan jumlah 20% dari sejumlah kegiatan PkM yang ada di PT				

4. PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
20.1 LPPM memiliki pedoman Penilaian PkM yang dilakukan dengan prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan sesuai aturan yang berlaku	Penilaian PkM memenuhi ketentuan dan tahapan yang ditentukan: a) laporan kemajuan, b) monitoring dan evaluasi, c) seminar hasil				
20.2 LPPM melakukan Penilaian PkM mengacu pada kriteria minimal	Penilaian memenuhi a. tingkat kepuasan masyarakat; b. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; c. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, sastra, dan seni di masyarakat secara berkelanjutan; d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau				

	e. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan				
20.3 LPPM melakukan evaluasi kegiatan penilaian hasil PkM dalam menjaga mutu proses kegiatan secara kontinyu	Ada kegiatan evaluasi pada saat melakukan penilaian hasil PkM melalui instrumen yang sah dan akurat sehingga dapat didapatkan hasil evaluasi untuk peningkatan mutu kegiatan PkM				

5. PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
21.1 LPPM memiliki pedoman tentang kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan PkM yang dilaksanakan setiap periode pengajuan Proposal PkM	Tim Pelaksana wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan				
	Pelaksanaan sesuai dengan sasaran, jadwal dan lama pelaksanaan yang direncanakan				
	Pelaksanaan dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.				
	Pelaksanaan PkM memberikan kontribusi terhadap pengembangan wilayah, inovasi dan alih teknologi, solusi persoalan masyarakat, pengentasan kemiskinan, dan pemberdayaan masyarakat.				
21.2 Pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan: a. kualifikasi akademik; dan	Adanya CV pengabdian yang memuat kualifikasi akademik dan hasil penelitian yang pernah dilakukan				
	Adanya monitoring dan evaluasi yang dapat memantau dengan baik, terjadwal dan konsisten				
	Hasil PkM dikembangkan sesuai kualifikasi akademik, dilakukan tindak				

b. hasil pengabdian kepada masyarakat berdasarkan ketentuan yang berlaku	lanjut, mengintegrasikan hasil pada pembelajaran dan dipublikasikan sekurangnya melalui seminar regional				
	Pelaksanaan PKM difasilitasi lembaga dengan baik, ada dukungan kerjasama sarpras, ada penghargaan bagi pelaksana PkM berprestasi				
21.3 Dalam melaksanakan PkM, DTSPS melibatkan mahasiswa PS	Lebih dari 25% PkM DTSPS melibatkan mahasiswa dalam 3 tahun terakhir				

6. SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
22.1 Perguruan Tinggi Wajib memiliki kebijakan menyediakan fasilitas Sarana dan prasarana PkM memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat setiap tahun sesuai dengan Renstra	Adanya SOP yang mengatur peningkatan layanan fasilitas sarpras oleh lembaga yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses PkM dalam rangka memenuhi hasil PkM				
	Adanya dokumen inventaris yang baik dan lengkap dalam memenuhi kebutuhan kegiatan PkM				
22.2 Perguruan Tinggi wajib memberikan ijin penggunaan fasilitas Sarana dan Prasarana guna mendukung keterlaksanaan Kegiatan PkM yang diadakan setiap tahunnya.	Adanya ijin dari perguruan tinggi untuk menggunakan fasilitas; a. terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan; b. proses pembelajaran; dan kegiatan penelitian				
22.3 Perguruan Tinggi wajib menjamin pemenuhan standar	Sarana dan prasarana PkM memenuhi unsur keselamatan kerja, kesehatan,				

pada Sarana dan prasarana sesuai aturan yang berlaku	kenyamanan, dan keamanan pengabdian, masyarakat, dan lingkungan				
22.4 Prodi wajib memberikan dukungan fasilitas sarana dan prasarana jika LPPM telah memberikan ijin	Adanya dokumen penggunaan sarana dan prasarana kegiatan PkM di prodi	√			
	Adanya catatan keterlibatan prodi dalam pelaksanaan kegiatan PkM sesuai dengan peta jalan kegiatan PkM di prodi	√			
22.5 PT melakukan survey kepuasan pelanggan secara berkala	Ada instrumen survei kepuasan pelanggan yang sah				
	Ada hasil analisis survei kepuasan pelanggan tentang fasilitas sarana dan prasarana				

7. PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
23.1 Perguruan Tinggi memiliki kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan PkM memiliki kriteria kesesuaian dengan <ol style="list-style-type: none"> a. Renstra Abdimas LPPM Unesa b. Road map dengan PkM kemenristekdikti c. Kriteria minimal pengelolaan PkM yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, dan pelaporan 2. Adanya Surat Perintah Kerja (SPK) 3. Adanya prosedur mutu, pemantauan, dan evaluasi 4. Adanya Laporan kegiatan yang sesuai 				
23.2 Perguruan Tinggi Wajib membentuk Unit Pengelola PkM yang bertugas untuk melakukan Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya	Pengelolaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dikelola dengan baik sesuai dengan OTK.				

23.3 Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Perguruan wajib melakukan pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Adanya sinergi yang terlembaga dengan baik antara LPPM dengan Pusat Pengembangan sebagai unit kerja pendukung				
23.4 LPPM memiliki kebijakan tertulis pimpinan PT (Rektor, Dekan, atau Ketua prodi) tentang pengabdian kepada masyarakat (renstra, pembuatan peta jalan PkM, dan pelaksana PkM di PT atau UPPS)	<p>Adanya peraturan, panduan, dan sistem Penjaminan mutu internal kegiatan PkM; memiliki RENSTRA PkM yang merupakan RENSTRA universitas dengan ketentuan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki kriteria dan prosedur penilaian PkM paling sedikit menyangkut aspek hasil PkM dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa; b. Peningkatan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi PkM dalam menjalankan program PkM secara berkelanjutan; c. Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana PkM dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM; d. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah dan jenis PkM; e. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada 				

	<p>masyarakat dalam menyelenggarakan program PkM paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.</p> <p>f. Tersedia dokumen lengkap kebijakan pimpinan PT (Rektor, Dekan, atau Koorprodi) tentang PkM, dan telah disosialisasikan, dilaksanakan, dievaluasi dan ditindaklanjuti</p>				
--	--	--	--	--	--

8. PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
<p>24.1 Perguruan Tinggi wajib menyediakan Pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang telah disusun sesuai peraturan yang berlaku</p>	<p>Adanya pedoman mekanisme pendanaan kegiatan PkM</p> <p>Adanya pelaksanaan penjaminan mutu mekanisme pendanaan kegiatan PkM</p>				
<p>24.2 Perguruan tinggi wajib menyediakan dana internal untuk</p>	<p>Adanya RBA atau sumber dana lain yang mendukung keterlaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat</p>				

pengabdian kepada masyarakat berdasarkan peraturan yang berlaku					
24.3 Perguruan Tinggi dapat memberikan fasilitas Pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari DRPM, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat	Adanya sumber dana lain dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat				
24.4 Perguruan Tinggi mengalokasikan pendanaan khusus untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dialokasikan sesuai dengan panduan	Adanya pengalokasian dana untuk membiayai: a. perencanaan, b. pelaksanaan, c. pengendalian, pemantauan dan d. evaluasi, e. pelaporan, serta f. diseminasi hasil				
24.5 Perguruan Tinggi wajib mengatur mekanisme pendanaan dalam kegiatan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat	Adanya pengelolaan manajemen dan peningkatan kapasitas pengelola dengan tugas 1) mengatur pengeluaran dana 2) mengatur pembiayaan yang meliputi: a. manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi,				

	pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; dan b. peningkatan kapasitas pelaksana				
24.6 Perguruan Tinggi wajib melakukan pengawasan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat	Semua kegiatan PkM yang terdanai memiliki laporan kemajuan dan pertanggungjawaban kegiatan tentang penyerapan dana selama 70% dan 100% kegiatan				
	Semua kegiatan PkM yang terdanai memiliki laporan hasil audit oleh satuan pengawas internal				
24.7 Perguruan tinggi melaksanakan respon pengguna tentang pelayanan pendanaan kegiatan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun	Ada laporan respon pengguna tentang layanan pendanaan kegiatan pembiayaan secara berkelanjutan dan konsisten pada setiap tahun				
24.8 LPPM memiliki rekapitulasi kegiatan PkM yang relevan dengan bidang keahlian program studi minimal 1 kali dalam 1 tahun, baik dengan pembiayaan PT/mandiri, pembiayaan dalam negeri, maupun pembiayaan luar	Terpenuhinya jumlah PkM dosen yang melibatkan mahasiswa $\geq 25\%$ di setiap prodi				

Keterangan: iya / tidak* = jika 'ya' maka perlu menambahkan bukti pendukung
Ada / tidak* = jika 'ada' maka perlu menambahkan bukti pendukung
L* = Lebih (melebihi Standar Mutu Unesa)

Surabaya, 7 Nopember 2023

Auditor : Muzayanah

Auditi : Eva Hany Fanida, S.AP., M.AP



	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	No : KKA-S.....-01
	BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Ringkasan Kondisi Audit	

Auditi				Kriteria					
SI AN				Standar Pengabdian kepada Masyarakat 17-24					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
I3				7 Nopember 2023					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Eva Hany Fanida, S.AP., M.AP		Muzayanah							
Distribusi		Auditi		Auditor		BPM		Arsip	
No Kondisi	Diskripsi Kondisi						Kategori (OB / KTS)		
1	-								
2									
dst									

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Eva Hany Fanida, S.AP., M.AP		Ketua Auditor	Muzayanah	



	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA				No. 9 – 16 – PKM- Rev02				
	BADAN PENJAMINAN MUTU Gedung Rektorat Unesa Kampus Lidah Surabaya								
AUDIT MUTU INTERNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT									
Auditi					Tahap Audit				
Lokasi			Ruang Lingkup		Tanggal Audit				
I7.01. 04			Prodi S1 Sosiologi		10 November 2023				
Wakil Auditi			Auditor Ketua		Auditor Anggota				
Dr. Agus Machfud Fauzi, M.Si Pambudi Handoyo, S.Sos.,M.A			Dr. Rr. Nanik Setyowati, M.Si						
Distribusi		Auditi		Auditor		BPM		Arsip	

1. HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
17.1 LPPM memiliki panduan hasil pengabdian kepada masyarakat yang menerapkan ilmu pengetahuan dan	Adanya panduan hasil pengabdian kepada masyarakat yang menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi.				
	Adanya kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat yang menerapkan mengamalkan, dan membudayakan salah				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
teknologi.	satu aspek: a. pendidikan, b. ilmu pengetahuan, c. sains, d. teknologi, e. olahraga, f. sastra, dan seni				
17.2 LPPM mengupayakan hasil pengabdian kepada masyarakat ditujukan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat.	Adanya kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat yang dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat melalui: a) pemanfaatan teknologi tepat guna, lebih dari 17% b) pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, sains, teknologi, olahraga, sastra, dan seni sebesar 25% c) pengembangan bahan ajar atau modul pelatihan lebih dari 25%				
17.3 Perguruan Tinggi memiliki kebijakan untuk menghasilkan suatu karya prototipe industri	Adanya lebih dari 7 karya prototipe per tahun yang dapat digunakan industri dari hasil kegiatan PkM				
17.4 Prodi melaksanakan analisis hasil kegiatan PkM	Prodi menganalisis hasil kegiatan PkM dengan ketercapaian standar prodi dan peta jalan PkM dosen dan mahasiswa	v		Peta jalan penelitian dan PKM Prodi Sosiologi 2010 - 2025	
	Lebih dari 25% hasil PKM digunakan dalam pembelajaran		v		Akan dilaksanakan
	Ada lebih dari 25% hasil PkM yang	v		Cover PKM 2023	

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
	melibatkan mahasiswa				

2. ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
18.1 LPPM dan Prodi mempunyai peta jalan, standar dan pedoman pelaksanaan PkM	Ada dokumen kebijakan peta jalan, standar dan pedoman pelaksanaan PkM di LPPM dan prodi yang mampu digunakan dalam menjamin mutu isi PkM	v		Peta jalan penelitian dan PKM Prodi Sosiologi 2010 - 2025	
18.2 LPPM mengupayakan Isi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada kebutuhan masyarakat	Ada peningkatan hasil pengabdian kepada masyarakat yang berasal dari hasil penelitian sebesar 30% setiap tahun				
	Ada peningkatan jumlah PkM yang mampu memecahkan masalah dan menerapkan teknologi tepat guna sebesar 35% setiap tahun				
	Ada peningkatan jumlah PkM yang diterapkan langsung oleh DU/DI, masyarakat, ataupun pemerintah sebesar 35% setiap tahun.				
18.3 LPPM memiliki pedoman tentang Isi pengabdian kepada masyarakat memiliki kedalaman dan keluasan materi	<ul style="list-style-type: none"> Adanya peningkatan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui respon pengguna Adanya peningkatan pencapaian hak kekayaan intelektual 35% setiap tahun 				
	Adanya evaluasi peta map tentang arah				

	pengembangan dari isi pengabdian masyarakat di PT				
--	---	--	--	--	--

3. PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
19.1 LPPM memiliki panduan Proses pengabdian kepada masyarakat terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan sesuai aturan yang berlaku	Adanya pedoman yang memandu kesesuaian dengan Renstra Abdimas LPPM Unesa melalui tahapan: pengajuan proposal, pelaksanaan, dan pelaporan sesuai dengan buku panduan yang berlaku				
	Adanya monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan, dan pelaporan sesuai dengan buku panduan yang berlaku				
19.2 LPPM memiliki panduan Bentuk PkM yang dapat dilakukan	Bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa: <ul style="list-style-type: none"> • pelayanan kepada masyarakat; • penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, sastra, dan seni sesuai dengan bidang keahliannya; • peningkatan kapasitas masyarakat; • pemberdayaan masyarakat 				
19.3 LPPM memiliki panduan Proses pelaksanaan PkM	<ul style="list-style-type: none"> • Proses pelaksanaan PkM hendaknya memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, 				

memenuhi standar yang ditetapkan	lingkungan, dan melibatkan mahasiswa dari awal sampai akhir				
	Adanya dokumen standar mutu pelaksanaan PkM yang dikaji secara berkesinambungan				
	Adanya monev pelaksanaan PkM berdasarkan standar yang ditetapkan				
19.4 LPPM memiliki panduan Proses PkM oleh mahasiswa yang terarah dan terevaluasi	Proses PkM mahasiswa dilaksanakan secara terprogram dan terarah sesuai dengan buku panduan yang berlaku				
	Adanya dokumen standar mutu pelaksanaan PkM mahasiswa yang dikaji secara kontinyu				
	Adanya monev pelaksanaan PkM mahasiswa berdasarkan standar yang ditetapkan				
19.5 Kegiatan PkM dosen, tenaga pendidikan dan mahasiswa wajib diimplementasikan dalam industri dan pembelajaran di PT serta diusahakan pengurusan haki paten	Adanya kegiatan pembelajaran dari hasil Kegiatan PKM dosen, tenaga pendidikan dan mahasiswa setidaknya sejumlah dosen pada tiga tahun		v		Akan dilaksanakan
	Adanya penerapan implementasi proses hasil kegiatan PkM dosen, tenaga pendidikan dan mahasiswa pada industri yang sesuai dengan bidangnya				
	Adanya kenaikan haki dan paten setiap tahun dengan jumlah 20% dari sejumlah kegiatan PkM yang ada di PT				

4. SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
22.1 Perguruan Tinggi Wajib memiliki kebijakan menyediakan fasilitas Sarana dan prasarana PkM memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat setiap tahun sesuai dengan Renstra	Adanya SOP yang mengatur peningkatan layanan fasilitas sarpras oleh lembaga yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses PkM dalam rangka memenuhi hasil PkM				
	Adanya dokumen inventaris yang baik dan lengkap dalam memenuhi kebutuhan kegiatan PkM				
22.2 Perguruan Tinggi wajib memberikan ijin penggunaan fasilitas Sarana dan Prasarana guna mendukung keterlaksanaan Kegiatan PkM yang diadakan setiap tahunnya.	Adanya ijin dari perguruan tinggi untuk menggunakan fasilitas; a. terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan; b. proses pembelajaran; dan kegiatan penelitian				
22.3 Perguruan Tinggi wajib menjamin pemenuhan standar	Sarana dan prasarana PkM memenuhi unsur keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pengabdian,				

pada Sarana dan prasarana sesuai aturan yang berlaku	masyarakat, dan lingkungan				
22.4 Podi wajib memberikan dukungan fasilitas sarana dan prasarana jika LPPM telah memberikan ijin	Adanya dokumen penggunaan sarana dan prasarana kegiatan PkM di prodi	v			
	Adanya catatan keterlibatan prodi dalam pelaksanaan kegiatan PkM sesuai dengan peta jalan kegiatan PkM di prodi	v			Masih sebatas pembagian jumlah kelompok.
22.5 PT melakukan survey kepuasan pelanggan secara berkala	Ada instrumen survei kepuasan pelanggan yang sah				
	Ada hasil analisis survei kepuasan pelanggan tentang fasilitas sarana dan prasarana				

Keterangan: iya / tidak* = jika 'ya' maka perlu menambahkan bukti pendukung

Ada / tidak* = jika 'ada' maka perlu menambahkan bukti pendukung

L* = Lebih (melebihi Standar Mutu Unesa)

Surabaya, 10 November 2023

Auditor : Dr. Rr Nanik Setyowati, M.Si

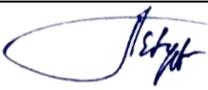


Auditi : Dr. Agus Machfud Fauzi, M.Si.



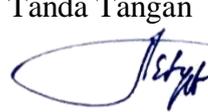
	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	No : KKA-S.....-01
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Ringkasan Kondisi Audit		

Auditi				Kriteria			
				Standar Pengabdian kepada Masyarakat 17-24			
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit			
I7.01.04		S1 Sosiologi		10 November 2023			
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota			
1. Dr. Agus Machfud Fauzi, M.Si 2. Pambudi Handoyo, S.Sos.,M.A		Dr. Rr. Nanik Setyowati, M.Si		-			
Distribusi		Auditi		Auditor		BPM	Arsip
No Kondisi	Diskripsi Kondisi						Kategori (OB / KTS)
1.	Belum ada hasil PKM yang digunakan dalam pembelajaran						KTS
2.	Belum adanya kegiatan pembelajaran dari hasil Kegiatan PKM dosen, tenaga pendidikan dan mahasiswa setidaknya sejumlah dosen pada tiga tahun						KTS

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Agus Machfud Fauzi, M.Si		Ketua Auditor	Dr. Rr. Nanik Setyowati, M.Si	

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	No : KKA-S.....-01
	SATUAN PENJAMINAN MUTU	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit		

Auditi		Kriteria
		Standar Pengabdian kepada Masyarakat 17-24
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
I7.01. 04	S1 Sosiologi	10 November 2023
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
1. Dr. Agus Machfud Fauzi, M.Si 2. Pambudi Handoyo, S.Sos.,M.A	Dr. Rr. Nanik Setyowati, M.Si	-
Distribusi	Auditi	Auditor
	BPM	Arsip

Deskripsi Temuan	Belum ada hasil PKM yang digunakan dalam pembelajaran dan Belum adanya kegiatan pembelajaran dari hasil kegiatan PKM dosen, tenaga pendidikan dan mahasiswa setidaknya sejumlah dosen pada tiga tahun terakhir		
Kriteria	KTS		
Akar Penyebab	Prodi belum melakukan PKM yang hasilnya bisa digunakan dalam pembelajaran dan yang melibatkan dosen dalam 3 tahun terakhir.		
Akibat	Belum ada hasil PKM yang digunakan dalam pembelajaran dan melibatkan dosen dalam 3 tahun terakhir		
Rekomendasi	Segera melakukan rapat evaluasi		
Tanggapan Auditi	Segera melakukan rapat evaluasi		
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan	Semester Genap 2023/2024	Penanggung Jawab	Dr. Agus Machfud Fauzi, M.Si
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan	Semester Genap 2023/2024	Penanggung Jawab	Dr. Agus Machfud Fauzi, M.Si
Tempat Persetujuan			
Pimpinan Auditi	Dr. Agus Machfud Fauzi, M.Si	Tanda Tangan 	Ketua Auditor Dr. Rr. Nanik Setyowati, M.Si
			Tanda Tangan 

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA				No. 9 – 16 – PKM- Rev02		
	BADAN PENJAMINAN MUTU Gedung Rektorat Unesa Kampus Lidah Surabaya						
AUDIT MUTU INTERNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT							
Auditi					Tahap Audit		
Prodi S1 Ilmu Hukum							
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit		
					10 November 2023		
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota		
1. Arinto Nugroho, S.H., S.Pd., M.H. 2.		Galih W. Pradana, S.A.P., M.Si.			1. 2.		
Distribusi		Auditi		Auditor		BPM	Arsip

1. HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
17.1 LPPM memiliki panduan hasil pengabdian kepada masyarakat yang menerapkan ilmu pengetahuan dan	Adanya panduan hasil pengabdian kepada masyarakat yang menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi.				
	Adanya kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat yang menerapkan mengamalkan, dan membudayakan salah				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
teknologi.	satu aspek: a. pendidikan, b. ilmu pengetahuan, c. sains, d. teknologi, e. olahraga, f. sastra, dan seni				
17.2 LPPM mengupayakan hasil pengabdian kepada masyarakat ditujukan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat.	Adanya kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat yang dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat melalui: a) pemanfaatan teknologi tepat guna, lebih dari 17% b) pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, sains, teknologi, olahraga, sastra, dan seni sebesar 25% c) pengembangan bahan ajar atau modul pelatihan lebih dari 25%				
17.3 Perguruan Tinggi memiliki kebijakan untuk menghasilkan suatu karya prototipe industri	Adanya lebih dari 7 karya prototipe per tahun yang dapat digunakan industri dari hasil kegiatan PkM				
17.4 Prodi melaksanakan analisis hasil kegiatan PkM	Prodi menganalisis hasil kegiatan PkM dengan ketercapaian standar prodi dan peta jalan PkM dosen dan mahasiswa	√		Roadmap PKM	Kegiatan PKM disusun berdasarkan kebutuhan dari masyarakat dan menyesuaikan

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
					dengan peta jalan PKM, untuk tingkat mahasiswa terdapat kegiatan yang bernama Law For Dedication
	Lebih dari 25% hasil PkM digunakan dalam pembelajaran	√		RPS dan Buku Saku	Sebagian pengalaman dan data yang diperoleh ketika PKM dimasukkan kedalam materi pembelajaran. Terdapat salah satu kegiatan PKM yang memiliki output buku saku, dan buku saku tersebut digunakan dalam pembelajaran di dalam kelas.
	Ada lebih dari 25% hasil PkM yang melibatkan mahasiswa	√			Semua Kelompok PKM di tingkat prodi melibatkan mahasiswa, rata-rata melibatkan 2 mahasiswa.

2. ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
18.1 LPPM dan Prodi mempunyai peta jalan, standar dan pedoman pelaksanaan PkM	Ada dokumen kebijakan peta jalan, standar dan pedoman pelaksanaan PkM di LPPM dan prodi yang mampu digunakan dalam menjamin mutu isi PkM	√		Peta Jalan PKM	
18.2 LPPM mengupayakan Isi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada kebutuhan masyarakat	Ada peningkatan hasil pengabdian kepada masyarakat yang berasal dari hasil penelitian sebesar 30% setiap tahun				
	Ada peningkatan jumlah PkM yang mampu memecahkan masalah dan menerapkan teknologi tepat guna sebesar 35% setiap tahun				
	Ada peningkatan jumlah PkM yang diterapkan langsung oleh DU/DI, masyarakat, ataupun pemerintah sebesar 35% setiap tahun.				
18.3 LPPM memiliki pedoman tentang Isi pengabdian kepada masyarakat memiliki kedalaman dan keluasan materi	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya peningkatan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui respon pengguna • Adanya peningkatan pencapaian hak kekayaan intelektual 35% setiap tahun 				
	Adanya evaluasi peta map tentang arah pengembangan dari isi pengabdian masyarakat di PT				

3. PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
19.1 LPPM memiliki panduan Proses pengabdian kepada masyarakat terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan sesuai aturan yang berlaku	Adanya pedoman yang memandu kesesuaian dengan Renstra Abdimas LPPM Unesa melalui tahapan: pengajuan proposal, pelaksanaan, dan pelaporan sesuai dengan buku panduan yang berlaku				
	Adanya monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan, dan pelaporan sesuai dengan buku panduan yang berlaku				
19.2 LPPM memiliki panduan Bentuk PkM yang dapat dilakukan	<p>Bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pelayanan kepada masyarakat; • penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, sastra, dan seni sesuai dengan bidang keahliannya; • peningkatan kapasitas masyarakat; • pemberdayaan masyarakat 				
19.3 LPPM memiliki panduan Proses pelaksanaan PkM memenuhi standar yang ditetapkan	<ul style="list-style-type: none"> • Proses pelaksanaan PkM hendaknya memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, lingkungan, dan melibatkan mahasiswa dari awal sampai akhir 				

	Adanya dokumen standar mutu pelaksanaan PkM yang dikaji secara berkesinambungan				
	Adanya monev pelaksanaan PkM berdasarkan standar yang ditetapkan				
19.4 LPPM memiliki panduan Proses PkM oleh mahasiswa yang terarah dan terevaluasi	Proses PkM mahasiswa dilaksanakan secara terprogram dan terarah sesuai dengan buku panduan yang berlaku				
	Adanya dokumen standar mutu pelaksanaan PkM mahasiswa yang dikaji secara kontinyu				
	Adanya monev pelaksanaan PkM mahasiswa berdasarkan standar yang ditetapkan				
19.5 Kegiatan PkM dosen, tenaga pendidikan dan mahasiswa wajib diimplementasikan dalam industri dan pembelajaran di PT serta diusahakan pengurusan haki paten	Adanya kegiatan pembelajaran dari hasil Kegiatan PkM dosen, tenaga pendidikan dan mahasiswa setidaknya sejumlah dosen pada tiga tahun	√			Diberikan dengan memberikan persoalan di lapangan untuk menjadi topik dalam pembelajaran
	Adanya penerapan implementasi proses hasil kegiatan PkM dosen, tenaga pendidikan dan mahasiswa pada industri yang sesuai dengan bidangnya				
	Adanya kenaikan haki dan paten setiap tahun dengan jumlah 20% dari sejumlah kegiatan PkM yang ada di PT				

4. PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
20.1 LPPM memiliki pedoman Penilaian PkM yang dilakukan dengan prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan sesuai aturan yang berlaku	Penilaian PkM memenuhi ketentuan dan tahapan yang ditentukan: a) laporan kemajuan, b) monitoring dan evaluasi, c) seminar hasil				
20.2 LPPM melakukan Penilaian PkM mengacu pada kriteria minimal	Penilaian memenuhi a. tingkat kepuasan masyarakat; b. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; c. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, sastra, dan seni di masyarakat secara berkelanjutan; d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau e. teratasinya masalah sosial dan				

	rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan				
20.3 LPPM melakukan evaluasi kegiatan penilaian hasil PkM dalam menjaga mutu proses kegiatan secara kontinyu	Ada kegiatan evaluasi pada saat melakukan penilaian hasil PkM melalui instrumen yang sah dan akurat sehingga dapat didapatkan hasil evaluasi untuk peningkatan mutu kegiatan PkM				

5. PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
21.1 LPPM memiliki pedoman tentang kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan PkM yang dilaksanakan setiap periode pengajuan Proposal PkM	Tim Pelaksana wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan				
	Pelaksanaan sesuai dengan sasaran, jadwal dan lama pelaksanaan yang direncanakan				
	Pelaksanaan dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.				
	Pelaksanaan PkM memberikan kontribusi terhadap pengembangan wilayah, inovasi dan alih teknologi, solusi persoalan masyarakat, pengentasan kemiskinan, dan pemberdayaan masyarakat.				
21.2 Pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan: a. kualifikasi akademik; dan b. hasil pengabdian	Adanya CV pengabdian yang memuat kualifikasi akademik dan hasil penelitian yang pernah dilakukan				
	Adanya monitoring dan evaluasi yang dapat memantau dengan baik, terjadwal dan konsisten				
	Hasil PkM dikembangkan sesuai kualifikasi akademik, dilakukan tindak				

kepada masyarakat berdasarkan ketentuan yang berlaku	lanjut, mengintegrasikan hasil pada pembelajaran dan dipublikasikan sekurangnya melalui seminar regional				
	Pelaksanaan PKM difasilitasi lembaga dengan baik, ada dukungan kerjasama sarpras, ada penghargaan bagi pelaksana PKM berprestasi				
21.3 Dalam melaksanakan PkM, DTSPS melibatkan mahasiswa PS	Lebih dari 25% PkM DTSPS melibatkan mahasiswa dalam 3 tahun terakhir				

6. SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
22.1 Perguruan Tinggi Wajib memiliki kebijakan menyediakan fasilitas Sarana dan prasarana PkM memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat setiap tahun sesuai dengan Renstra	Adanya SOP yang mengatur peningkatan layanan fasilitas sarpras oleh lembaga yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses PkM dalam rangka memenuhi hasil PkM				
	Adanya dokumen inventaris yang baik dan lengkap dalam memenuhi kebutuhan kegiatan PkM				
22.2 Perguruan Tinggi wajib memberikan ijin penggunaan fasilitas Sarana dan Prasarana guna mendukung keterlaksanaan Kegiatan PkM yang diadakan setiap tahunnya.	Adanya ijin dari perguruan tinggi untuk menggunakan fasilitas; a. terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan; b. proses pembelajaran; dan kegiatan penelitian				
22.3 Perguruan Tinggi wajib menjamin pemenuhan standar	Sarana dan prasarana PkM memenuhi unsur keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pengabdian,				

pada Sarana dan prasarana sesuai aturan yang berlaku	masyarakat, dan lingkungan				
22.4 Podi wajib memberikan dukungan fasilitas sarana dan prasarana jika LPPM telah memberikan ijin	Adanya dokumen penggunaan sarana dan prasarana kegiatan PkM di prodi	√		Surat pengajuan peminjaman sarana dan prasarana (Mic, LCD, dan Kamera)	
	Adanya catatan keterlibatan prodi dalam pelaksanaan kegiatan PkM sesuai dengan peta jalan kegiatan PkM di prodi	√		Surat Permohonan Perizinan	Penyediaan Sarana dan Prasarana, Pengajuan Perizinan untuk kegiatan di luar Kampus, Audiensi Prodi dengan Pihak penerima PKM lokasi.
22.5 PT melakukan survey kepuasan pelanggan secara berkala	Ada instrumen survei kepuasan pelanggan yang sah				
	Ada hasil analisis survei kepuasan pelanggan tentang fasilitas sarana dan prasarana				

7. PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
23.1 Perguruan Tinggi memiliki kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan PkM memiliki kriteria kesesuaian dengan <ol style="list-style-type: none"> a. Renstra Abdimas LPPM Unesa b. Road map dengan PkM kemenristekdikti c. Kriteria minimal pengelolaan PkM yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, dan pelaporan 2. Adanya Surat Perintah Kerja (SPK) 3. Adanya prosedur mutu, pemantauan, dan evaluasi 4. Adanya Laporan kegiatan yang sesuai 				
23.2 Perguruan Tinggi Wajib membentuk Unit Pengelola PkM yang bertugas untuk melakukan Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya	Pengelolaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dikelola dengan baik sesuai dengan OTK.				
23.3 Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Perguruan wajib melakukan pengelolaan Pengabdian Kepada	Adanya sinergi yang terlembaga dengan baik antara LPPM dengan Pusat Pengembangan sebagai unit kerja pendukung				

Masyarakat					
<p>23.4 LPPM memiliki kebijakan tertulis pimpinan PT (Rektor, Dekan, atau Ketua prodi) tentang pengabdian kepada masyarakat (renstra, pembuatan peta jalan PkM, dan pelaksana PkM di PT atau UPPS)</p>	<p>Adanya peraturan, panduan, dan sistem Penjaminan mutu internal kegiatan PkM; memiliki RENSTRA PkM yang merupakan RENSTRA universitas dengan ketentuan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki kriteria dan prosedur penilaian PkM paling sedikit menyangkut aspek hasil PkM dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa; b. Peningkatan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi PkM dalam menjalankan program PkM secara berkelanjutan; c. Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana PkM dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM; d. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah dan jenis PkM; e. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program PkM paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi. f. Tersedia dokumen lengkap kebijakan pimpinan PT (Rektor, Dekan, atau Koorprodi) tentang PkM, dan telah disosialisasikan, dilaksanakan, dievaluasi dan ditindaklanjuti 				

8. PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
24.1 Perguruan Tinggi wajib menyediakan Pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang telah disusun sesuai peraturan yang berlaku	Adanya pedoman mekanisme pendanaan kegiatan PkM				
	Adanya pelaksanaan penjaminan mutu mekanisme pendanaan kegiatan PkM				
24.2 Perguruan tinggi wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat berdasarkan peraturan yang berlaku	Adanya RBA atau sumber dana lain yang mendukung keterlaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat				
24.3 Perguruan Tinggi dapat memberikan fasilitas Pendanaan pengabdian kepada	Adanya sumber dana lain dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat				

masyarakat dapat bersumber dari DRPM, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat					
24.4 Perguruan Tinggi mengalokasikan pendanaan khusus untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dialokasikan sesuai dengan panduan	Adanya pengalokasian dana untuk membiayai: <ul style="list-style-type: none"> a. perencanaan, b. pelaksanaan, c. pengendalian, pemantauan dan d. evaluasi, e. pelaporan, serta f. diseminasi hasil 				
24.5 Perguruan Tinggi wajib mengatur mekanisme pendanaan dalam kegiatan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat	Adanya pengelolaan manajemen dan peningkatan kapasitas pengelola dengan tugas <ol style="list-style-type: none"> 1) mengatur pengeluaran dana 2) mengatur pembiayaan yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; dan b. peningkatan kapasitas pelaksana 				
24.6 Perguruan Tinggi wajib melakukan pengawasan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat	Semua kegiatan PkM yang terdanai memiliki laporan kemajuan dan pertanggungjawaban kegiatan tentang penyerapan dana selama 70% dan 100% kegiatan				
	Semua kegiatan PkM yang terdanai memiliki laporan hasil audit oleh satuan pengawas internal				
24.7 Perguruan tinggi	Ada laporan respon pengguna tentang layanan				

melaksanakan respon pengguna tentang pelayanan pendanaan kegiatan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun	pendanaan kegiatan pembiayaan secara berkelanjutan dan konsisten pada setiap tahun				
24.8 LPPM memiliki rekapitulasi kegiatan PkM yang relevan dengan bidang keahlian program studi minimal 1 kali dalam 1 tahun, baik dengan pembiayaan PT/mandiri, pembiayaan dalam negeri, maupun pembiayaan luar	Terpenuhinya jumlah PkM dosen yang melibatkan mahasiswa $\geq 25\%$ di setiap prodi				

Keterangan: iya / tidak* = jika 'ya' maka perlu menambahkan bukti pendukung

Ada / tidak* = jika 'ada' maka perlu menambahkan bukti pendukung

L* = Lebih (melebihi Standar Mutu Unesa)

Surabaya, 10 November 2023

Auditor : Galih W. Pradana, S.A.P., M.Si.
 Auditi : Arinto Nugroho, S.H., S.Pd., M.H.

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	No : KKA-S.....-01
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Ringkasan Kondisi Audit		

Auditi				Kriteria			
<i>Prodi S1 Ilmu Hukum</i>				Standar Pengabdian kepada Masyarakat 17-24			
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit			
Gedung F2 Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum				10 November 2023			
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota			
Arinto Nugroho, S.H., S.Pd., M.H.		Galih W. Pradana, S.A.P., M.Si.					
Distribusi		Auditi		Auditor		BPM	Arsip
No Kondisi	Diskripsi Kondisi						Kategori (OB / KTS)
1	-						-
2	-						-
dst							

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Arinto Nugroho, S.H., S.Pd., M.H.		Ketua Auditor	Galih W. Pradana, S.A.P., M.Si.	

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	No : KKA-S.....-01
	SATUAN PENJAMINAN MUTU	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit		

Auditi				Kriteria			
Prodi S1 Ilmu Hukum				Standar Pengabdian kepada Masyarakat 17-24			
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit			
Gedung F2 Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum				10 November 2023			
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota			
Arinto Nugroho, S.H., S.Pd., M.H.		Galih W. Pradana, S.A.P., M.Si.		-			
Distribusi		Auditi		Auditor		BPM	Arsip

Deskripsi Temuan	-				
Kriteria	-				
Akar Penyebab	-				
Akibat	-				
Rekomendasi	Pertahankan				
Tanggapan Auditi	-				
Rencana Perbaikan	-				
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>		<i>Koorprodi</i>	
Rencana Pencegahan					
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>			
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Arinto Nugroho, S.H., S.Pd., M.H.	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Galih W. Pradana, S.A.P., M.Si.	Tanda Tangan

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA				No. 9 – 16 – PKM- Rev02					
	BADAN PENJAMINAN MUTU Gedung Rektorat Unesa Kampus Lidah Surabaya									
AUDIT MUTU INTERNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT										
Auditi					Tahap Audit					
S2 Ilmu Hukum										
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit					
					10 November 2023					
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota					
Dr. Pudji Astuti, S.H., M.H.		Galih W. Pradana, S.A.P., M.Si.								
Distribusi		Auditi		Auditor		BPM			Arsip	

1. HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
17.1 LPPM memiliki panduan hasil pengabdian kepada masyarakat yang menerapkan ilmu pengetahuan dan	Adanya panduan hasil pengabdian kepada masyarakat yang menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi.				
	Adanya kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat yang menerapkan mengamalkan, dan membudayakan salah satu aspek:				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
teknologi.	a. pendidikan, b. ilmu pengetahuan, c. sains, d. teknologi, e. olahraga, f. sastra, dan seni				
17.2 LPPM mengupayakan hasil pengabdian kepada masyarakat ditujukan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat.	Adanya kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat yang dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat melalui: a) pemanfaatan teknologi tepat guna, lebih dari 17% b) pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, sains, teknologi, olahraga, sastra, dan seni sebesar 25% c) pengembangan bahan ajar atau modul pelatihan lebih dari 25%				
17.3 Perguruan Tinggi memiliki kebijakan untuk menghasilkan suatu karya prototipe industri	Adanya lebih dari 7 karya prototipe per tahun yang dapat digunakan industri dari hasil kegiatan PkM				
17.4 Prodi melaksanakan analisis hasil kegiatan PkM	Prodi menganalisis hasil kegiatan PkM dengan ketercapaian standar prodi dan peta jalan PkM dosen dan mahasiswa		√	-	S2 Ilmu Hukum tergolong sebagai program studi yang baru berdiri (Mei 2023)
	Lebih dari 25% hasil PkM digunakan dalam pembelajaran		√	-	S2 Ilmu Hukum tergolong sebagai

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
					program studi yang baru berdiri (Mei 2023)
	Ada lebih dari 25% hasil PkM yang melibatkan mahasiswa		√	-	S2 Ilmu Hukum tergolong sebagai program studi yang baru berdiri (Mei 2023)

2. ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
18.1 LPPM dan Prodi mempunyai peta jalan, standar dan pedoman pelaksanaan PkM	Ada dokumen kebijakan peta jalan, standar dan pedoman pelaksanaan PkM di LPPM dan prodi yang mampu digunakan dalam menjamin mutu isi PkM		√	-	S2 Ilmu Hukum tergolong sebagai program studi yang baru berdiri (Mei 2023)
18.2 LPPM mengupayakan Isi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada kebutuhan masyarakat	Ada peningkatan hasil pengabdian kepada masyarakat yang berasal dari hasil penelitian sebesar 30% setiap tahun				
	Ada peningkatan jumlah PkM yang mampu memecahkan masalah dan menerapkan teknologi tepat guna sebesar 35% setiap tahun				
	Ada peningkatan jumlah PkM yang diterapkan langsung oleh DU/DI, masyarakat, ataupun pemerintah sebesar				

	35% setiap tahun.				
18.3 LPPM memiliki pedoman tentang Isi pengabdian kepada masyarakat memiliki kedalaman dan keluasan materi	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya peningkatan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui respon pengguna • Adanya peningkatan pencapaian hak kekayaan intelektual 35% setiap tahun 				
	Adanya evaluasi peta map tentang arah pengembangan dari isi pengabdian masyarakat di PT				

3. PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
19.1 LPPM memiliki panduan Proses pengabdian kepada masyarakat terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan sesuai aturan yang berlaku	Adanya pedoman yang memandu kesesuaian dengan Renstra Abdimas LPPM Unesa melalui tahapan: pengajuan proposal, pelaksanaan, dan pelaporan sesuai dengan buku panduan yang berlaku				
	Adanya monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan, dan pelaporan sesuai dengan buku panduan yang berlaku				
19.2 LPPM memiliki panduan Bentuk PkM yang dapat dilakukan	Bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa: <ul style="list-style-type: none"> • pelayanan kepada masyarakat; 				

	<ul style="list-style-type: none"> • penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, sastra, dan seni sesuai dengan bidang keahliannya; • peningkatan kapasitas masyarakat; • pemberdayaan masyarakat 				
19.3 LPPM memiliki panduan Proses pelaksanaan PkM memenuhi standar yang ditetapkan	<ul style="list-style-type: none"> • Proses pelaksanaan PkM hendaknya memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, lingkungan, dan melibatkan mahasiswa dari awal sampai akhir 				
	Adanya dokumen standar mutu pelaksanaan PkM yang dikaji secara berkesinambungan				
	Adanya monev pelaksanaan PkM berdasarkan standar yang ditetapkan				
19.4 LPPM memiliki panduan Proses PkM oleh mahasiswa yang terarah dan terevaluasi	Proses PkM mahasiswa dilaksanakan secara terprogram dan terarah sesuai dengan buku panduan yang berlaku				
	Adanya dokumen standar mutu pelaksanaan PkM mahasiswa yang dikaji secara kontinyu				
	Adanya monev pelaksanaan PkM mahasiswa berdasarkan standar yang ditetapkan				
19.5 Kegiatan PkM dosen, tenaga pendidikan dan mahasiswa wajib diimplementasikan dalam industri dan pembelajaran di PT	Adanya kegiatan pembelajaran dari hasil Kegiatan PkM dosen, tenaga pendidikan dan mahasiswa setidaknya sejumlah dosen pada tiga tahun		√	-	S2 Ilmu Hukum tergolong sebagai program studi yang baru berdiri (Mei 2023)
	Adanya penerapan implementasi proses hasil kegiatan PkM dosen, tenaga				

serta diusahakan pengurusan hak paten	pendidikan dan mahasiswa pada industri yang sesuai dengan bidangnya				
	Adanya kenaikan hak paten setiap tahun dengan jumlah 20% dari sejumlah kegiatan PkM yang ada di PT				

4. PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
20.1 LPPM memiliki pedoman Penilaian PkM yang dilakukan dengan prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan sesuai aturan yang berlaku	Penilaian PkM memenuhi ketentuan dan tahapan yang ditentukan: a) laporan kemajuan, b) monitoring dan evaluasi, c) seminar hasil				
20.2 LPPM melakukan Penilaian PkM mengacu pada kriteria minimal	Penilaian memenuhi a. tingkat kepuasan masyarakat; b. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; c. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, sastra, dan seni di masyarakat secara berkelanjutan;				

	<p>d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau</p> <p>e. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan</p>				
20.3 LPPM melakukan evaluasi kegiatan penilaian hasil PkM dalam menjaga mutu proses kegiatan secara kontinyu	Ada kegiatan evaluasi pada saat melakukan penilaian hasil PkM melalui instrumen yang sah dan akurat sehingga dapat didapatkan hasil evaluasi untuk peningkatan mutu kegiatan PkM				

5. PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
21.1 LPPM memiliki pedoman tentang kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan PkM yang dilaksanakan setiap periode pengajuan	Tim Pelaksana wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan				
	Pelaksanaan sesuai dengan sasaran, jadwal dan lama pelaksanaan yang direncanakan				

Proposal PkM	Pelaksanaan dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.				
	Pelaksanaan PkM memberikan kontribusi terhadap pengembangan wilayah, inovasi dan alih teknologi, solusi persoalan masyarakat, pengentasan kemiskinan, dan pemberdayaan masyarakat.				
21.2 Pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan: a. kualifikasi akademik; dan b. hasil pengabdian kepada masyarakat berdasarkan ketentuan yang berlaku	Adanya CV pengabdian yang memuat kualifikasi akademik dan hasil penelitian yang pernah dilakukan				
	Adanya monitoring dan evaluasi yang dapat memantau dengan baik, terjadwal dan konsisten				
	Hasil PkM dikembangkan sesuai kualifikasi akademik, dilakukan tindak lanjut, mengintegrasikan hasil pada pembelajaran dan dipublikasikan sekurangnya melalui seminar regional				
	Pelaksanaan PKM difasilitasi lembaga dengan baik, ada dukungan kerjasama sarpras, ada penghargaan bagi pelaksana PkM berprestasi				
21.3 Dalam melaksanakan PkM, DTSP melibatkan mahasiswa PS	Lebih dari 25% PkM DTSP melibatkan mahasiswa dalam 3 tahun terakhir				

6. SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL	DOKUMEN	CATATAN
---------------	------------------------	-------	---------	---------

MUTU/ACUAN		OBSERVASI			KHUSUS
		ADA	TIDAK		
22.1 Perguruan Tinggi Wajib memiliki kebijakan menyediakan fasilitas Sarana dan prasarana PkM memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat setiap tahun sesuai dengan Renstra	Adanya SOP yang mengatur peningkatan layanan fasilitas sarpras oleh lembaga yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses PkM dalam rangka memenuhi hasil PkM				
	Adanya dokumen inventaris yang baik dan lengkap dalam memenuhi kebutuhan kegiatan PkM				
22.2 Perguruan Tinggi wajib memberikan ijin penggunaan fasilitas Sarana dan Prasarana guna mendukung keterlaksanaan Kegiatan PkM yang diadakan setiap tahunnya.	Adanya ijin dari perguruan tinggi untuk menggunakan fasilitas; a. terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan; b. proses pembelajaran; dan kegiatan penelitian				
22.3 Perguruan Tinggi wajib menjamin pemenuhan standar pada Sarana dan prasarana sesuai aturan yang berlaku	Sarana dan prasarana PkM memenuhi unsur keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pengabdian, masyarakat, dan lingkungan				
22.4 Podi wajib memberikan dukungan fasilitas sarana dan prasarana jika LPPM	Adanya dokumen penggunaan sarana dan prasarana kegiatan PkM di prodi		√	-	S2 Ilmu Hukum tergolong sebagai program studi yang baru berdiri (Mei

telah memberikan ijin					2023)
	Adanya catatan keterlibatan prodi dalam pelaksanaan kegiatan PkM sesuai dengan peta jalan kegiatan PkM di prodi		√	-	S2 Ilmu Hukum tergolong sebagai program studi yang baru berdiri (Mei 2023)
22.5 PT melakukan survey kepuasan pelanggan secara berkala	Ada instrumen survei kepuasan pelanggan yang sah				
	Ada hasil analisis survei kepuasan pelanggan tentang fasilitas sarana dan prasarana				

7. PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
23.1 Perguruan Tinggi memiliki kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan.	1. Kegiatan PkM memiliki kriteria kesesuaian dengan <ol style="list-style-type: none"> Renstra Abdimas LPPM Unesa Road map dengan PkM kemenristekdikti Kriteria minimal pengelolaan PkM yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, dan pelaporan 2. Adanya Surat Perintah Kerja (SPK)				

	<p>3. Adanya prosedur mutu, pemantauan, dan evaluasi</p> <p>4. Adanya Laporan kegiatan yang sesuai</p>				
<p>23.2 Perguruan Tinggi Wajib membentuk Unit Pengelola PkM yang bertugas untuk melakukan Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya</p>	<p>Pengelolaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dikelola dengan baik sesuai dengan OTK.</p>				
<p>23.3 Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Perguruan wajib melakukan pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>Adanya sinergi yang terlembaga dengan baik antara LPPM dengan Pusat Pengembangan sebagai unit kerja pendukung</p>				
<p>23.4 LPPM memiliki kebijakan tertulis pimpinan PT (Rektor, Dekan, atau Ketua prodi) tentang pengabdian kepada masyarakat (renstra, pembuatan peta jalan PkM, dan pelaksana PkM di PT atau UPPS)</p>	<p>Adanya peraturan, panduan, dan sistem Penjaminan mutu internal kegiatan PkM; memiliki RENSTRA PkM yang merupakan RENSTRA universitas dengan ketentuan</p> <p>a. Memiliki kriteria dan prosedur penilaian PkM paling sedikit menyangkut aspek hasil PkM dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa;</p>				

	<p>b. Peningkatan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi PkM dalam menjalankan program PkM secara berkelanjutan;</p> <p>c. Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana PkM dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM;</p> <p>d. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah dan jenis PkM;</p> <p>e. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program PkM paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.</p> <p>f. Tersedia dokumen lengkap kebijakan pimpinan PT (Rektor, Dekan, atau Koorprodi) tentang PkM, dan telah disosialisasikan, dilaksanakan, dievaluasi dan ditindaklanjuti</p>				
--	--	--	--	--	--

8. PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
24.1 Perguruan Tinggi wajib menyediakan Pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada	Adanya pedoman mekanisme pendanaan kegiatan PkM				
	Adanya pelaksanaan penjaminan mutu mekanisme pendanaan kegiatan PkM				

<p>masyarakat berdasarkan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang telah disusun sesuai peraturan yang berlaku</p>					
<p>24.2 Perguruan tinggi wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat berdasarkan peraturan yang berlaku</p>	<p>Adanya RBA atau sumber dana lain yang mendukung keterlaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat</p>				
<p>24.3 Perguruan Tinggi dapat memberikan fasilitas Pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari DRPM, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat</p>	<p>Adanya sumber dana lain dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat</p>				
<p>24.4 Perguruan Tinggi mengalokasikan pendanaan khusus untuk kegiatan</p>	<p>Adanya pengalokasian dana untuk membiayai: a. perencanaan, b. pelaksanaan,</p>				

pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dialokasikan sesuai dengan panduan	<ul style="list-style-type: none"> c. pengendalian, pemantauan dan d. evaluasi, e. pelaporan, serta f. diseminasi hasil 				
24.5 Perguruan Tinggi wajib mengatur mekanisme pendanaan dalam kegiatan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat	<p>Adanya pengelolaan manajemen dan peningkatan kapasitas pengelola dengan tugas</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) mengatur pengeluaran dana 2) mengatur pembiayaan yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; dan b. peningkatan kapasitas pelaksana 				
24.6 Perguruan Tinggi wajib melakukan pengawasan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat	<p>Semua kegiatan PkM yang terdananai memiliki laporan kemajuan dan pertanggungjawaban kegiatan tentang penyerapan dana selama 70% dan 100% kegiatan</p> <p>Semua kegiatan PkM yang terdananai memilki laporan hasil audit oleh satuan pengawas internal</p>				
24.7 Perguruan tinggi melaksanakan respon pengguna tentang pelayanan pendanaan kegiatan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun	Ada laporan respon pengguna tentang layanan pendanaan kegiatan pembiayaan secara berkelanjutan dan konsisten pada setiap tahun				
24.8 LPPM memiliki	Terpenuhinya jumlah PkM dosen yang				

rekapitulasi kegiatan PkM yang relevan dengan bidang keahlian program studi minimal 1 kali dalam 1 tahun, baik dengan pembiayaan PT/mandiri, pembiayaan dalam negeri, maupun pembiayaan luar	melibatkan mahasiswa $\geq 25\%$ di setiap prodi				
--	--	--	--	--	--

Keterangan: iya / tidak* = jika 'ya' maka perlu menambahkan bukti pendukung
 Ada / tidak* = jika 'ada' maka perlu menambahkan bukti pendukung
 L* = Lebih (melebihi Standar Mutu Unesa)

Surabaya, 10 November 2023

Auditor : Galih W. Pradana, S.A.P., M.Si.
 Auditi : Dr. Pudji Astuti, S.H., M.H.




DOKUMENTASI



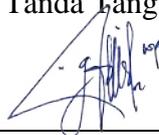
	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	No : KKA-S.....-01
	BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Ringkasan Kondisi Audit	

Auditi				Kriteria			
<i>S2 Ilmu Hukum</i>				Standar Pengabdian kepada Masyarakat 17-24			
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit			
Gedung F2 Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum				10 November 2023			
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota			
Dr. Pudji Astuti, S.H., M.H.		Galih W. Pradana, S.A.P., M.Si.					
Distribusi		Auditi	Auditor	BPM		Arsip	
No Kondisi	Diskripsi Kondisi						Kategori (OB / KTS)
1	Prodi belum menganalisis hasil kegiatan PkM dengan ketercapaian standar prodi dan peta jalan PkM dosen dan mahasiswa						KTS
2	Belum ada lebih dari 25% hasil PkM digunakan dalam pembelajaran						KTS
3	Belum ada lebih dari 25% hasil PkM yang melibatkan mahasiswa						KTS
4	Belum ada dokumen kebijakan peta jalan, standar dan pedoman pelaksanaan PkM di LPPM dan prodi yang mampu digunakan dalam menjamin mutu isi PkM						KTS
5	Belum ada kegiatan pembelajaran dari hasil Kegiatan PkM dosen, tenaga pendidikan dan mahasiswa setidaknya sejumlah dosen pada tiga tahun						KTS
6	Belum Ada dokumen penggunaan sarana dan prasarana kegiatan PkM di prodi						KTS
7	Belum Ada catatan keterlibatan prodi dalam pelaksanaan kegiatan PkM sesuai dengan peta jalan kegiatan PkM di prodi						KTS

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Pudji Astuti, S.H., M.H.		Ketua Auditor	Galih W. Pradana, S.A.P., M.Si.	

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	No : KKA-S.....-01
	SATUAN PENJAMINAN MUTU	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit		

Auditi				Kriteria			
S2 Ilmu Hukum				Standar Pengabdian kepada Masyarakat 17-24			
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit			
Gedung F2 Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum				10 November 2023			
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota			
Dr. Pudji Astuti, S.H., M.H.		Galih W. Pradana, S.A.P., M.Si.		-			
Distribusi		Auditi		Auditor		BPM	Arsip

Deskripsi Temuan	Prodi belum menganalisis hasil kegiatan PkM dengan ketercapaian standar prodi dan peta jalan PkM dosen dan mahasiswa					
Kriteria	KTS					
Akar Penyebab	S2 Ilmu Hukum tergolong sebagai Prodi yang baru saja berdiri (Mei 2023)					
Akibat	Standar Prodi belum tercapai					
Rekomendasi	Segera melakukan rapat evaluasi					
Tanggapan Auditi	<i>Segera melakukan rapat evaluasi</i>					
Rencana Perbaikan	<i>Akhir Semester Genap 2023/2024</i>					
Jadwal Perbaikan	<i>Akhir Semester Genap 2023/2024</i>		Penanggung Jawab		<i>Koorprodi</i>	
Rencana Pencegahan						
Jadwal Pencegahan			Penanggung Jawab			
Tempat Persetujuan						
Pimpinan Auditi	Dr. Pudji Astuti, S.H., M.H.	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Galih W. Pradana, S.A.P., M.Si.	Tanda Tangan	
						

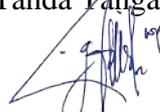
	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	No : KKA-S.....-01
	SATUAN PENJAMINAN MUTU	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit		

Auditi		Kriteria	
S2 Ilmu Hukum		Standar Pengabdian kepada Masyarakat 17-24	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Gedung F2 Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum		10 November 2023	
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota	
Dr. Pudji Astuti, S.H., M.H.	Galih W. Pradana, S.A.P., M.Si.	-	
Distribusi	Auditi	Auditor	BPM Arsip

Deskripsi Temuan	Belum ada lebih dari 25% hasil PKM digunakan dalam pembelajaran			
Kriteria	KTS			
Akar Penyebab	S2 Ilmu Hukum tergolong sebagai Prodi yang baru saja berdiri (Mei 2023)			
Akibat	Hasil PKM belum digunakan dan dimanfaatkan dalam pembelajaran			
Rekomendasi	Segera melakukan rapat evaluasi			
Tanggapan Auditi	<i>Segera melakukan rapat evaluasi</i>			
Rencana Perbaikan	<i>Akhir Semester Genap 2023/2024</i>			
Jadwal Perbaikan	<i>Akhir Semester Genap 2023/2024</i>	Penanggung Jawab	<i>Koorprodi</i>	
Rencana Pencegahan				
Jadwal Pencegahan	Penanggung Jawab			
Tempat Persetujuan				
Pimpinan Auditi	Dr. Pudji Astuti, S.H., M.H.	Tanda Tangan 	Ketua Auditor Galih W. Pradana, S.A.P., M.Si.	Tanda Tangan 

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	No : KKA-S.....-01
	SATUAN PENJAMINAN MUTU	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit		

Auditi		Kriteria
S2 Ilmu Hukum		Standar Pengabdian kepada Masyarakat 17-24
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Gedung F2 Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum		10 November 2023
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Dr. Pudji Astuti, S.H., M.H.	Galih W. Pradana, S.A.P., M.Si.	-
Distribusi	Auditi	Auditor
	BPM	Arsip

Deskripsi Temuan	Belum ada lebih dari 25% hasil PKM yang melibatkan mahasiswa			
Kriteria	KTS			
Akar Penyebab	S2 Ilmu Hukum tergolong sebagai Prodi yang baru saja berdiri (Mei 2023)			
Akibat	Mahasiswa minim pengalaman PKM			
Rekomendasi	Segera melakukan rapat evaluasi			
Tanggapan Auditi	<i>Segera melakukan rapat evaluasi</i>			
Rencana Perbaikan	<i>Akhir Semester Genap 2023/2024</i>			
Jadwal Perbaikan	<i>Akhir Semester Genap 2023/2024</i>	Penanggung Jawab	<i>Koorprodi</i>	
Rencana Pencegahan				
Jadwal Pencegahan	Penanggung Jawab			
Tempat Persetujuan				
Pimpinan Auditi	Dr. Pudji Astuti, S.H., M.H.	Tanda Tangan 	Ketua Auditor Galih W. Pradana, S.A.P., M.Si.	Tanda Tangan 

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	No : KKA-S.....-01
	SATUAN PENJAMINAN MUTU	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit		

Auditi				Kriteria			
S2 Ilmu Hukum				Standar Pengabdian kepada Masyarakat 17-24			
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit			
Gedung F2 Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum				10 November 2023			
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota			
Dr. Pudji Astuti, S.H., M.H.		Galih W. Pradana, S.A.P., M.Si.		-			
Distribusi		Auditi		Auditor		BPM	Arsip

Deskripsi Temuan	Belum ada dokumen kebijakan peta jalan, standar dan pedoman pelaksanaan PkM di LPPM dan prodi yang mampu digunakan dalam menjamin mutu isi PkM					
Kriteria	KTS					
Akar Penyebab	S2 Ilmu Hukum tergolong sebagai Prodi yang baru saja berdiri (Mei 2023)					
Akibat	PKM belum terlaksana secara terarah					
Rekomendasi	Segera melakukan rapat evaluasi					
Tanggapan Auditi	<i>Segera melakukan rapat evaluasi</i>					
Rencana Perbaikan	<i>Akhir Semester Genap 2023/2024</i>					
Jadwal Perbaikan	<i>Akhir Semester Genap 2023/2024</i>		Penanggung Jawab		<i>Koorprodi</i>	
Rencana Pencegahan						
Jadwal Pencegahan			Penanggung Jawab			
Tempat Persetujuan						
Pimpinan Auditi	Dr. Pudji Astuti, S.H., M.H.	Tanda Tangan 	Ketua Auditor	Galih W. Pradana, S.A.P., M.Si.	Tanda Tangan 	

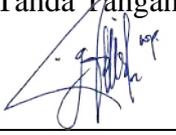
	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	No : KKA-S.....-01
	SATUAN PENJAMINAN MUTU	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit		

Auditi		Kriteria	
S2 Ilmu Hukum		Standar Pengabdian kepada Masyarakat 17-24	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Gedung F2 Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum		10 November 2023	
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota	
Dr. Pudji Astuti, S.H., M.H.	Galih W. Pradana, S.A.P., M.Si.	-	
Distribusi	Auditi	Auditor	BPM Arsip

Deskripsi Temuan	Belum ada kegiatan pembelajaran dari hasil Kegiatan PkM dosen, tenaga pendidikan dan mahasiswa setidaknya sejumlah dosen pada tiga tahun		
Kriteria	KTS		
Akar Penyebab	S2 Ilmu Hukum tergolong sebagai Prodi yang baru saja berdiri (Mei 2023)		
Akibat	Kegiatan PKM belum dimanfaatkan		
Rekomendasi	Segera melakukan rapat evaluasi		
Tanggapan Auditi	<i>Segera melakukan rapat evaluasi</i>		
Rencana Perbaikan	<i>Akhir Semester Genap 2023/2024</i>		
Jadwal Perbaikan	<i>Akhir Semester Genap 2023/2024</i>	Penanggung Jawab	<i>Koorprodi</i>
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	
Tempat Persetujuan			
Pimpinan Auditi	Dr. Pudji Astuti, S.H., M.H.	Tanda Tangan	Tanda Tangan
			
		Ketua Auditor	Galih W. Pradana, S.A.P., M.Si.

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	No : KKA-S.....-01
	SATUAN PENJAMINAN MUTU	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit		

Auditi		Kriteria	
S2 Ilmu Hukum		Standar Pengabdian kepada Masyarakat 17-24	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Gedung F2 Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum		10 November 2023	
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota	
Dr. Pudji Astuti, S.H., M.H.	Galih W. Pradana, S.A.P., M.Si.	-	
Distribusi	Auditi	Auditor	BPM Arsip

Deskripsi Temuan	Belum Ada dokumen penggunaan sarana dan prasarana kegiatan PkM di prodi		
Kriteria	KTS		
Akar Penyebab	S2 Ilmu Hukum tergolong sebagai Prodi yang baru saja berdiri (Mei 2023)		
Akibat	Peralatan penunjang kegiatan sering rusak dan hilang		
Rekomendasi	Segera melakukan rapat evaluasi		
Tanggapan Auditi	<i>Segera melakukan rapat evaluasi</i>		
Rencana Perbaikan	<i>Akhir Semester Genap 2023/2024</i>		
Jadwal Perbaikan	<i>Akhir Semester Genap 2023/2024</i>	Penanggung Jawab	<i>Koorprodi</i>
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	
Tempat Persetujuan			
Pimpinan Auditi	Dr. Pudji Astuti, S.H., M.H.	Tanda Tangan	Tanda Tangan
			
		Ketua Auditor	Galih W. Pradana, S.A.P., M.Si.

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	No : KKA-S.....-01
	SATUAN PENJAMINAN MUTU	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit		

Auditi		Kriteria	
S2 Ilmu Hukum		Standar Pengabdian kepada Masyarakat 17-24	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Gedung F2 Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum		10 November 2023	
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota	
Dr. Pudji Astuti, S.H., M.H.	Galih W. Pradana, S.A.P., M.Si.	-	
Distribusi	Auditi	Auditor	BPM Arsip

Deskripsi Temuan	Belum Ada catatan keterlibatan prodi dalam pelaksanaan kegiatan PkM sesuai dengan peta jalan kegiatan PkM di prodi		
Kriteria	KTS		
Akar Penyebab	S2 Ilmu Hukum tergolong sebagai Prodi yang baru saja berdiri (Mei 2023)		
Akibat	Kontribusi Prodi menjadi tidak terekam		
Rekomendasi	Segera melakukan rapat evaluasi		
Tanggapan Auditi	<i>Segera melakukan rapat evaluasi</i>		
Rencana Perbaikan	<i>Akhir Semester Genap 2023/2024</i>		
Jadwal Perbaikan	<i>Akhir Semester Genap 2023/2024</i>	Penanggung Jawab	<i>Koorprodi</i>
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	
Tempat Persetujuan			
Pimpinan Auditi	Dr. Pudji Astuti, S.H., M.H.	Tanda Tangan	Tanda Tangan
			
		Ketua Auditor	Galih W. Pradana, S.A.P., M.Si.

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA				No. 9 – 16 – PKM- Rev02		
	BADAN PENJAMINAN MUTU Gedung Rektorat Unesa Kampus Lidah Surabaya						
AUDIT MUTU INTERNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT							
Auditi				Tahap Audit			
Dr. Nuansa Bayu Segara, S.Pd., M.Pd							
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit			
R. Korprodi PIPS, Gedung i-1 FISH				13 November 2023			
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota			
1. 2.		Putri Aisyiyah RD		1. 2.			
Distribusi		Auditi		Auditor		BPM	Arsip

1. HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
17.1 LPPM memiliki panduan hasil pengabdian kepada masyarakat yang menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi.	Adanya panduan hasil pengabdian kepada masyarakat yang menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi.				
	Adanya kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat yang menerapkan mengamalkan, dan membudayakan salah satu aspek: a. pendidikan, b. ilmu pengetahuan, c. sains, d. teknologi, e. olahraga, f. sastra, dan seni				
17.2 LPPM mengupayakan hasil pengabdian kepada masyarakat ditujukan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat.	Adanya kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat yang dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat melalui: a) pemanfaatan teknologi tepat guna, lebih dari 17% b) pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, sains, teknologi, olahraga, sastra, dan seni sebesar 25% c) pengembangan bahan ajar atau modul pelatihan lebih dari 25%				
17.3 Perguruan Tinggi memiliki kebijakan untuk menghasilkan	Adanya lebih dari 7 karya prototipe per tahun yang dapat digunakan industri dari hasil kegiatan PkM				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
suatu karya prototipe industri					
17.4 Prodi melaksanakan analisis hasil kegiatan PkM	Prodi menganalisis hasil kegiatan PkM dengan ketercapain standar prodi dan peta jalan PkM dosen dan mahasiswa		v	Tidak ada	
	Lebih dari 25% hasil PkM digunakan dalam pembelajaran	v		Buku-buku hasil PKM sebagai referensi kuliah	
	Ada lebih dari 25% hasil PkM yang melibatkan mahasiswa	v		Lampiran nama-nama mahasiswa	

2. ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
18.1 LPPM dan Prodi mempunyai peta jalan, standar dan pedoman pelaksanaan PkM	Ada dokumen kebijakan peta jalan, standar dan pedoman pelaksanaan PkM di LPPM dan prodi yang mampu digunakan dalam menjamin mutu isi PkM	v		terlampir	
18.2 LPPM mengupayakan Isi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada kebutuhan masyarakat	Ada peningkatan hasil pengabdian kepada masyarakat yang berasal dari hasil penelitian sebesar 30% setiap tahun				
	Ada peningkatan jumlah PkM yang mampu memecahkan masalah dan menerapkan teknologi tepat guna sebesar 35% setiap tahun				
	Ada peningkatan jumlah PkM yang diterapkan langsung oleh DU/DI, masyarakat, ataupun pemerintah sebesar 35% setiap tahun.				
18.3 LPPM memiliki pedoman tentang Isi pengabdian kepada masyarakat memiliki kedalaman dan keluasan materi	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya peningkatan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui respon pengguna • Adanya peningkatan pencapaian hak kekayaan intelektual 35% setiap tahun 				
	Adanya evaluasi peta map tentang arah pengembangan dari isi pengabdian masyarakat di PT				

3. PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
19.1 LPPM memiliki panduan Proses pengabdian kepada masyarakat terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan sesuai aturan yang berlaku	Adanya pedoman yang memandu kesesuaian dengan Renstra Abdimas LPPM Unesa melalui tahapan: pengajuan proposal, pelaksanaan, dan pelaporan sesuai dengan buku panduan yang berlaku				
	Adanya monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan, dan pelaporan sesuai dengan buku panduan yang berlaku				
19.2 LPPM memiliki panduan Bentuk PkM yang dapat dilakukan	Bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa: <ul style="list-style-type: none"> • pelayanan kepada masyarakat; • penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, sastra, dan seni sesuai dengan bidang keahliannya; • peningkatan kapasitas masyarakat; • pemberdayaan masyarakat 				
19.3 LPPM memiliki panduan Proses pelaksanaan PkM	<ul style="list-style-type: none"> • Proses pelaksanaan PkM hendaknya memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, 				

memenuhi standar yang ditetapkan	lingkungan, dan melibatkan mahasiswa dari awal sampai akhir				
	Adanya dokumen standar mutu pelaksanaan PkM yang dikaji secara berkesinambungan				
	Adanya monev pelaksanaan PkM berdasarkan standar yang ditetapkan				
19.4 LPPM memiliki panduan Proses PkM oleh mahasiswa yang terarah dan terevaluasi	Proses PkM mahasiswa dilaksanakan secara terprogram dan terarah sesuai dengan buku panduan yang berlaku				
	Adanya dokumen standar mutu pelaksanaan PkM mahasiswa yang dikaji secara kontinyu				
	Adanya monev pelaksanaan PkM mahasiswa berdasarkan standar yang ditetapkan				
19.5 Kegiatan PkM dosen, tenaga pendidikan dan mahasiswa wajib diimplementasikan dalam industri dan pembelajaran di PT serta diusahakan pengurusan haki paten	Adanya kegiatan pembelajaran dari hasil Kegiatan PkM dosen, tenaga pendidikan dan mahasiswa setidaknya sejumlah dosen pada tiga tahun	v		Terlampir (buku-buku yang telah memiliki HAKI)	
	Adanya penerapan implementasi proses hasil kegiatan PkM dosen, tenaga pendidikan dan mahasiswa pada industri yang sesuai dengan bidangnya				
	Adanya kenaikan haki dan paten setiap tahun dengan jumlah 20% dari sejumlah kegiatan PkM yang ada di PT				

4. PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
20.1 LPPM memiliki pedoman Penilaian PkM yang dilakukan dengan prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan sesuai aturan yang berlaku	Penilaian PkM memenuhi ketentuan dan tahapan yang ditentukan: a) laporan kemajuan, b) monitoring dan evaluasi, c) seminar hasil				
20.2 LPPM melakukan Penilaian PkM mengacu pada kriteria minimal	Penilaian memenuhi a. tingkat kepuasan masyarakat; b. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; c. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, sastra, dan seni di masyarakat secara berkelanjutan; d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau				

	e. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan				
20.3 LPPM melakukan evaluasi kegiatan penilaian hasil PkM dalam menjaga mutu proses kegiatan secara kontinyu	Ada kegiatan evaluasi pada saat melakukan penilaian hasil PkM melalui instrumen yang sah dan akurat sehingga dapat didapatkan hasil evaluasi untuk peningkatan mutu kegiatan PkM				

5. PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
21.1 LPPM memiliki pedoman tentang kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan PkM yang dilaksanakan setiap periode pengajuan Proposal PkM	Tim Pelaksana wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan				
	Pelaksanaan sesuai dengan sasaran, jadwal dan lama pelaksanaan yang direncanakan				
	Pelaksanaan dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.				
	Pelaksanaan PkM memberikan kontribusi terhadap pengembangan wilayah, inovasi dan alih teknologi, solusi persoalan masyarakat, pengentasan kemiskinan, dan pemberdayaan masyarakat.				
21.2 Pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan: a. kualifikasi akademik; dan	Adanya CV pengabdian yang memuat kualifikasi akademik dan hasil penelitian yang pernah dilakukan				
	Adanya monitoring dan evaluasi yang dapat memantau dengan baik, terjadwal dan konsisten				
	Hasil PkM dikembangkan sesuai kualifikasi akademik, dilakukan tindak				

b. hasil pengabdian kepada masyarakat berdasarkan ketentuan yang berlaku	lanjut, mengintegrasikan hasil pada pembelajaran dan dipublikasikan sekurangnya melalui seminar regional				
	Pelaksanaan PKM difasilitasi lembaga dengan baik, ada dukungan kerjasama sarpras, ada penghargaan bagi pelaksana PkM berprestasi				
21.3 Dalam melaksanakan PkM, DTSPS melibatkan mahasiswa PS	Lebih dari 25% PkM DTSPS melibatkan mahasiswa dalam 3 tahun terakhir				

6. SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
22.1 Perguruan Tinggi Wajib memiliki kebijakan menyediakan fasilitas Sarana dan prasarana PkM memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat setiap tahun sesuai dengan Renstra	Adanya SOP yang mengatur peningkatan layanan fasilitas sarpras oleh lembaga yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses PkM dalam rangka memenuhi hasil PkM				
	Adanya dokumen inventaris yang baik dan lengkap dalam memenuhi kebutuhan kegiatan PkM				
22.2 Perguruan Tinggi wajib memberikan ijin penggunaan fasilitas Sarana dan Prasarana guna mendukung keterlaksanaan Kegiatan PkM yang diadakan setiap tahunnya.	Adanya ijin dari perguruan tinggi untuk menggunakan fasilitas; a. terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan; b. proses pembelajaran; dan kegiatan penelitian				
22.3 Perguruan Tinggi wajib menjamin pemenuhan standar	Sarana dan prasarana PkM memenuhi unsur keselamatan kerja, kesehatan,				

pada Sarana dan prasarana sesuai aturan yang berlaku	kenyamanan, dan keamanan pengabdian, masyarakat, dan lingkungan				
22.4 Prodi wajib memberikan dukungan fasilitas sarana dan prasarana jika LPPM telah memberikan ijin	Adanya dokumen penggunaan sarana dan prasarana kegiatan PkM di prodi		v	Tidak ada	
	Adanya catatan keterlibatan prodi dalam pelaksanaan kegiatan PkM sesuai dengan peta jalan kegiatan PkM di prodi	v		Dokumentasi PKM	
22.5 PT melakukan survey kepuasan pelanggan secara berkala	Ada instrumen survei kepuasan pelanggan yang sah				
	Ada hasil analisis survei kepuasan pelanggan tentang fasilitas sarana dan prasarana				

7. PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
23.1 Perguruan Tinggi memiliki kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan PkM memiliki kriteria kesesuaian dengan <ol style="list-style-type: none"> a. Renstra Abdimas LPPM Unesa b. Road map dengan PkM kemenristekdikti c. Kriteria minimal pengelolaan PkM yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, dan pelaporan 2. Adanya Surat Perintah Kerja (SPK) 3. Adanya prosedur mutu, pemantauan, dan evaluasi 4. Adanya Laporan kegiatan yang sesuai 				
23.2 Perguruan Tinggi Wajib membentuk Unit Pengelola PkM yang bertugas untuk melakukan Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya	Pengelolaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dikelola dengan baik sesuai dengan OTK.				

23.3 Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Perguruan wajib melakukan pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Adanya sinergi yang terlembaga dengan baik antara LPPM dengan Pusat Pengembangan sebagai unit kerja pendukung				
23.4 LPPM memiliki kebijakan tertulis pimpinan PT (Rektor, Dekan, atau Ketua prodi) tentang pengabdian kepada masyarakat (renstra, pembuatan peta jalan PkM, dan pelaksana PkM di PT atau UPPS)	<p>Adanya peraturan, panduan, dan sistem Penjaminan mutu internal kegiatan PkM; memiliki RENSTRA PkM yang merupakan RENSTRA universitas dengan ketentuan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki kriteria dan prosedur penilaian PkM paling sedikit menyangkut aspek hasil PkM dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa; b. Peningkatan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi PkM dalam menjalankan program PkM secara berkelanjutan; c. Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana PkM dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM; d. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah dan jenis PkM; e. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada 				

	<p>masyarakat dalam menyelenggarakan program PkM paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.</p> <p>f. Tersedia dokumen lengkap kebijakan pimpinan PT (Rektor, Dekan, atau Koorprodi) tentang PkM, dan telah disosialisasikan, dilaksanakan, dievaluasi dan ditindaklanjuti</p>				
--	--	--	--	--	--

8. PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
24.1 Perguruan Tinggi wajib menyediakan Pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang telah disusun sesuai peraturan yang berlaku	Adanya pedoman mekanisme pendanaan kegiatan PkM				
	Adanya pelaksanaan penjaminan mutu mekanisme pendanaan kegiatan PkM				
24.2 Perguruan tinggi wajib menyediakan dana internal untuk	Adanya RBA atau sumber dana lain yang mendukung keterlaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat				

<p>pengabdian kepada masyarakat berdasarkan peraturan yang berlaku</p>					
<p>24.3 Perguruan Tinggi dapat memberikan fasilitas Pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari DRPM, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat</p>	<p>Adanya sumber dana lain dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat</p>				
<p>24.4 Perguruan Tinggi mengalokasikan pendanaan khusus untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dialokasikan sesuai dengan panduan</p>	<p>Adanya pengalokasian dana untuk membiayai:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perencanaan, b. pelaksanaan, c. pengendalian, pemantauan dan d. evaluasi, e. pelaporan, serta f. diseminasi hasil 				
<p>24.5 Perguruan Tinggi wajib mengatur mekanisme pendanaan dalam kegiatan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat</p>	<p>Adanya pengelolaan manajemen dan peningkatan kapasitas pengelola dengan tugas</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) mengatur pengeluaran dana 2) mengatur pembiayaan yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, 				

	<p>pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; dan</p> <p>b. peningkatan kapasitas pelaksana</p>				
<p>24.6 Perguruan Tinggi wajib melakukan pengawasan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat</p>	<p>Semua kegiatan PkM yang terdanai memiliki laporan kemajuan dan pertanggungjawaban kegiatan tentang penyerapan dana selama 70% dan 100% kegiatan</p>				
	<p>Semua kegiatan PkM yang terdanai memiliki laporan hasil audit oleh satuan pengawas internal</p>				
<p>24.7 Perguruan tinggi melaksanakan respon pengguna tentang pelayanan pendanaan kegiatan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun</p>	<p>Ada laporan respon pengguna tentang layanan pendanaan kegiatan pembiayaan secara berkelanjutan dan konsisten pada setiap tahun</p>				
<p>24.8 LPPM memiliki rekapitulasi kegiatan PkM yang relevan dengan bidang keahlian program studi minimal 1 kali dalam 1 tahun, baik dengan pembiayaan PT/mandiri, pembiayaan dalam negeri, maupun pembiayaan luar</p>	<p>Terpenuhinya jumlah PkM dosen yang melibatkan mahasiswa $\geq 25\%$ di setiap prodi</p>				

Keterangan: iya / tidak* = jika 'ya' maka perlu menambahkan bukti pendukung
Ada / tidak* = jika 'ada' maka perlu menambahkan bukti pendukung
L* = Lebih (melebihi Standar Mutu Unesa)

Surabaya, 13 November 2023

Auditor : Putri Aisyiyah Rachma Dewi



Auditi : Dr. Nuansa Bayu Segara, S.Pd., M.Pd



	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	No : KKA-S.....-01
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Ringkasan Kondisi Audit		

Auditi				Kriteria					
Dr. Nuansa Bayu Segara, S.Pd., M.Pd				Standar Pengabdian kepada Masyarakat 17-24					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
R. Korprodi PIPS, i1 FISH				13 November 2023					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
		Putri Aisyiyah R.D							
Distribusi		Auditi		Auditor		BPM		Arsip	
No Kondisi	Deskripsi Kondisi						Kategori (OB / KTS)		
1	Tidak ada hasil analisis kegiatan PKM oleh Prodi						KTS		
2	Belum ada dokumen penggunaan sarpras prodi untuk PKM						OB		
dst									

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Nuansa Bayu Segara, S.Pd., M.Pd		Ketua Auditor	Putri Aisyiyah R.D	

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	No : KKA-S.....-01
	SATUAN PENJAMINAN MUTU	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit		

Auditi				Kriteria			
Dr. Nuansa Bayu Segara, S.Pd., M.Pd				Standar Pengabdian kepada Masyarakat 17-24			
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit			
R. Korprodi PIPS, i1 FISH				13 November 2023			
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota			
-		Putri Aisyiyah RD		-			
Distribusi	Auditi		Auditor		BPM		Arsip

Deskripsi Temuan	1. Tidak ada hasil analisis kegiatan PKM oleh Prodi 2. Belum ada dokumen penggunaan sarpras prodi untuk PKM					
Kriteria	1. 17.4 2. 22.4					
Akar Penyebab	1. Belum dilakukan 2. Ada, namun belum terdokumentasi dengan baik					
Akibat	1. Tidak ada analisis kegiatan PKM 2. Tidak ada dokumen					
Rekomendasi	1. Melakukan hasil analisis kegiatan PKM oleh Prodi 2. Mengumpulkan dokumen penggunaan sarpras prodi untuk PKM					
Tanggapan Auditi						
Rencana Perbaikan	Desember 2023					
Jadwal Perbaikan	Desember 2023	Penanggung Jawab		Dr. Nuansa Bayu Segara, S.Pd., M.Pd		
Rencana Pencegahan	Januari 2024					
Jadwal Pencegahan	Januari 2024	Penanggung Jawab		Dr. Nuansa Bayu Segara, S.Pd., M.Pd		
Tempat Persetujuan						
Pimpinan Auditi	Dr. Nuansa Bayu Segara, S.Pd., M.Pd	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Putri Aisyiyah R.D, S.Sos., M.Med.Kom	Tanda Tangan	
						

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA				No. 9 – 16 – PKM- Rev02		
	BADAN PENJAMINAN MUTU Gedung Rektorat Unesa Kampus Lidah Surabaya						
AUDIT MUTU INTERNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT							
Auditi				Tahap Audit			
S2 PIPS							
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit			
I.7.01.01		PKM					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota			
1. Dr. Agus Suprijono, S.Pd, M.Si 2.		Septina Alrianingrum, SS, M.Pd		1. 2.			
Distribusi		Auditi		Auditor		BPM	Arsip

1. HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
17.1 LPPM memiliki panduan hasil pengabdian kepada masyarakat yang menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi.	Adanya panduan hasil pengabdian kepada masyarakat yang menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi.				
	Adanya kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat yang menerapkan mengamalkan, dan membudayakan salah satu aspek: a. pendidikan, b. ilmu pengetahuan, c. sains, d. teknologi, e. olahraga, f. sastra, dan seni				
17.2 LPPM mengupayakan hasil pengabdian kepada masyarakat ditujukan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat.	Adanya kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat yang dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat melalui: a) pemanfaatan teknologi tepat guna, lebih dari 17% b) pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, sains, teknologi, olahraga, sastra, dan seni sebesar 25% c) pengembangan bahan ajar atau modul pelatihan lebih dari 25%				
17.3 Perguruan Tinggi memiliki kebijakan untuk menghasilkan	Adanya lebih dari 7 karya prototipe per tahun yang dapat digunakan industri dari hasil kegiatan PkM				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
suatu karya prototipe industri					
17.4 Prodi melaksanakan analisis hasil kegiatan PkM	Prodi menganalisis hasil kegiatan PkM dengan ketercapain standar prodi dan peta jalan PkM dosen dan mahasiswa	V		ada	
	Lebih dari 25% hasil PkM digunakan dalam pembelajaran	V		ada	
	Ada lebih dari 25% hasil PkM yang melibatkan mahasiswa	V		ada	

2. ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
18.1 LPPM dan Prodi mempunyai peta jalan, standar dan pedoman pelaksanaan PkM	Ada dokumen kebijakan peta jalan, standar dan pedoman pelaksanaan PkM di LPPM dan prodi yang mampu digunakan dalam menjamin mutu isi PkM	V		ada	
18.2 LPPM mengupayakan Isi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada kebutuhan masyarakat	Ada peningkatan hasil pengabdian kepada masyarakat yang berasal dari hasil penelitian sebesar 30% setiap tahun				
	Ada peningkatan jumlah PkM yang mampu memecahkan masalah dan menerapkan teknologi tepat guna sebesar 35% setiap tahun				
	Ada peningkatan jumlah PkM yang diterapkan langsung oleh DU/DI, masyarakat, ataupun pemerintah sebesar 35% setiap tahun.				
18.3 LPPM memiliki pedoman tentang Isi pengabdian kepada masyarakat memiliki kedalaman dan keluasan materi	<ul style="list-style-type: none"> Adanya peningkatan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui respon pengguna Adanya peningkatan pencapaian hak kekayaan intelektual 35% setiap tahun 				
	Adanya evaluasi peta map tentang arah pengembangan dari isi pengabdian masyarakat di PT				

3. PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
19.1 LPPM memiliki panduan Proses pengabdian kepada masyarakat terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan sesuai aturan yang berlaku	Adanya pedoman yang memandu kesesuaian dengan Renstra Abdimas LPPM Unesa melalui tahapan: pengajuan proposal, pelaksanaan, dan pelaporan sesuai dengan buku panduan yang berlaku				
	Adanya monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan, dan pelaporan sesuai dengan buku panduan yang berlaku				
19.2 LPPM memiliki panduan Bentuk PkM yang dapat dilakukan	Bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa: <ul style="list-style-type: none"> • pelayanan kepada masyarakat; • penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, sastra, dan seni sesuai dengan bidang keahliannya; • peningkatan kapasitas masyarakat; • pemberdayaan masyarakat 				
19.3 LPPM memiliki panduan Proses pelaksanaan PkM	<ul style="list-style-type: none"> • Proses pelaksanaan PkM hendaknya memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, 				

memenuhi standar yang ditetapkan	lingkungan, dan melibatkan mahasiswa dari awal sampai akhir				
	Adanya dokumen standar mutu pelaksanaan PkM yang dikaji secara berkesinambungan				
	Adanya monev pelaksanaan PkM berdasarkan standar yang ditetapkan				
19.4 LPPM memiliki panduan Proses PkM oleh mahasiswa yang terarah dan terevaluasi	Proses PkM mahasiswa dilaksanakan secara terprogram dan terarah sesuai dengan buku panduan yang berlaku				
	Adanya dokumen standar mutu pelaksanaan PkM mahasiswa yang dikaji secara kontinyu				
	Adanya monev pelaksanaan PkM mahasiswa berdasarkan standar yang ditetapkan				
19.5 Kegiatan PkM dosen, tenaga pendidikan dan mahasiswa wajib diimplementasikan dalam industri dan pembelajaran di PT serta diusahakan pengurusan haki paten	Adanya kegiatan pembelajaran dari hasil Kegiatan PkM dosen, tenaga pendidikan dan mahasiswa setidaknya sejumlah dosen pada tiga tahun		V		
	Adanya penerapan implementasi proses hasil kegiatan PkM dosen, tenaga pendidikan dan mahasiswa pada industri yang sesuai dengan bidangnya				
	Adanya kenaikan haki dan paten setiap tahun dengan jumlah 20% dari sejumlah kegiatan PkM yang ada di PT				

4. PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
20.1 LPPM memiliki pedoman Penilaian PkM yang dilakukan dengan prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan sesuai aturan yang berlaku	Penilaian PkM memenuhi ketentuan dan tahapan yang ditentukan: a) laporan kemajuan, b) monitoring dan evaluasi, c) seminar hasil				
20.2 LPPM melakukan Penilaian PkM mengacu pada kriteria minimal	Penilaian memenuhi a. tingkat kepuasan masyarakat; b. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; c. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, sastra, dan seni di masyarakat secara berkelanjutan; d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau e. teratasinya masalah sosial dan				

	rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan				
20.3 LPPM melakukan evaluasi kegiatan penilaian hasil PkM dalam menjaga mutu proses kegiatan secara kontinyu	Ada kegiatan evaluasi pada saat melakukan penilaian hasil PkM melalui instrumen yang sahih dan akurat sehingga dapat didapatkan hasil evaluasi untuk peningkatan mutu kegiatan PkM				

5. PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
21.1 LPPM memiliki pedoman tentang kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan PkM yang dilaksanakan setiap periode pengajuan Proposal PkM	Tim Pelaksana wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan				
	Pelaksanaan sesuai dengan sasaran, jadwal dan lama pelaksanaan yang direncanakan				
	Pelaksanaan dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.				
	Pelaksanaan PkM memberikan kontribusi terhadap pengembangan wilayah, inovasi dan alih teknologi, solusi persoalan masyarakat, pengentasan kemiskinan, dan pemberdayaan masyarakat.				
21.2 Pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan: a. kualifikasi akademik; dan b. hasil pengabdian	Adanya CV pengabdian yang memuat kualifikasi akademik dan hasil penelitian yang pernah dilakukan				
	Adanya monitoring dan evaluasi yang dapat memantau dengan baik, terjadwal dan konsisten				
	Hasil PkM dikembangkan sesuai kualifikasi akademik, dilakukan tindak				

kepada masyarakat berdasarkan ketentuan yang berlaku	lanjut, mengintegrasikan hasil pada pembelajaran dan dipublikasikan sekurangnya melalui seminar regional				
	Pelaksanaan PKM difasilitasi lembaga dengan baik, ada dukungan kerjasama sarpras, ada penghargaan bagi pelaksana PKM berprestasi				
21.3 Dalam melaksanakan PkM, DTSPS melibatkan mahasiswa PS	Lebih dari 25% PkM DTSPS melibatkan mahasiswa dalam 3 tahun terakhir				

6. SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
22.1 Perguruan Tinggi Wajib memiliki kebijakan menyediakan fasilitas Sarana dan prasarana PkM memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat setiap tahun sesuai dengan Renstra	Adanya SOP yang mengatur peningkatan layanan fasilitas sarpras oleh lembaga yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses PkM dalam rangka memenuhi hasil PkM				
	Adanya dokumen inventaris yang baik dan lengkap dalam memenuhi kebutuhan kegiatan PkM				
22.2 Perguruan Tinggi wajib memberikan izin penggunaan fasilitas Sarana dan Prasarana guna mendukung keterlaksanaan Kegiatan PkM yang diadakan setiap tahunnya.	Adanya izin dari perguruan tinggi untuk menggunakan fasilitas; a. terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan; b. proses pembelajaran; dan kegiatan penelitian				
22.3 Perguruan Tinggi wajib menjamin pemenuhan standar	Sarana dan prasarana PkM memenuhi unsur keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pengabdian,				

pada Sarana dan prasarana sesuai aturan yang berlaku	masyarakat, dan lingkungan				
22.4 Podi wajib memberikan dukungan fasilitas sarana dan prasarana jika LPPM telah memberikan ijin	Adanya dokumen penggunaan sarana dan prasarana kegiatan PkM di prodi	V			
	Adanya catatan keterlibatan prodi dalam pelaksanaan kegiatan PkM sesuai dengan peta jalan kegiatan PkM di prodi	V		ada	
22.5 PT melakukan survey kepuasan pelanggan secara berkala	Ada instrumen survei kepuasan pelanggan yang sah				
	Ada hasil analisis survei kepuasan pelanggan tentang fasilitas sarana dan prasarana				

7. PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
23.1 Perguruan Tinggi memiliki kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan PkM memiliki kriteria kesesuaian dengan <ol style="list-style-type: none"> a. Renstra Abdimas LPPM Unesa b. Road map dengan PkM kemenristekdikti c. Kriteria minimal pengelolaan PkM yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, dan pelaporan 2. Adanya Surat Perintah Kerja (SPK) 3. Adanya prosedur mutu, pemantauan, dan evaluasi 4. Adanya Laporan kegiatan yang sesuai 				
23.2 Perguruan Tinggi Wajib membentuk Unit Pengelola PkM yang bertugas untuk melakukan Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya	Pengelolaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dikelola dengan baik sesuai dengan OTK.				
23.3 Lembaga	Adanya sinergi yang terlembaga dengan				

<p>Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Perguruan wajib melakukan pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>baik antara LPPM dengan Pusat Pengembangan sebagai unit kerja pendukung</p>				
<p>23.4 LPPM memiliki kebijakan tertulis pimpinan PT (Rektor, Dekan, atau Ketua prodi) tentang pengabdian kepada masyarakat (renstra, pembuatan peta jalan PkM, dan pelaksana PkM di PT atau UPPS)</p>	<p>Adanya peraturan, panduan, dan sistem Penjaminan mutu internal kegiatan PkM; memiliki RENSTRA PkM yang merupakan RENSTRA universitas dengan ketentuan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki kriteria dan prosedur penilaian PkM paling sedikit menyangkut aspek hasil PkM dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa; b. Peningkatan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi PkM dalam menjalankan program PkM secara berkelanjutan; c. Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana PkM dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM; d. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah dan jenis PkM; e. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam 				

	<p>menyelenggarakan program PkM paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.</p> <p>f. Tersedia dokumen lengkap kebijakan pimpinan PT (Rektor, Dekan, atau Koorprodi) tentang PkM, dan telah disosialisasikan, dilaksanakan, dievaluasi dan ditindaklanjuti</p>				
--	---	--	--	--	--

8. PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
24.1 Perguruan Tinggi wajib menyediakan Pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang telah disusun sesuai peraturan yang berlaku	Adanya pedoman mekanisme pendanaan kegiatan PkM				
	Adanya pelaksanaan penjaminan mutu mekanisme pendanaan kegiatan PkM				
24.2 Perguruan tinggi wajib menyediakan dana internal untuk	Adanya RBA atau sumber dana lain yang mendukung keterlaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat				

pengabdian kepada masyarakat berdasarkan peraturan yang berlaku					
24.3 Perguruan Tinggi dapat memberikan fasilitas Pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari DRPM, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat	Adanya sumber dana lain dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat				
24.4 Perguruan Tinggi mengalokasikan pendanaan khusus untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dialokasikan sesuai dengan panduan	Adanya pengalokasian dana untuk membiayai: a. perencanaan, b. pelaksanaan, c. pengendalian, pemantauan dan d. evaluasi, e. pelaporan, serta f. diseminasi hasil				
24.5 Perguruan Tinggi wajib mengatur mekanisme pendanaan dalam kegiatan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat	Adanya pengelolaan manajemen dan peningkatan kapasitas pengelola dengan tugas 1) mengatur pengeluaran dana 2) mengatur pembiayaan yang meliputi: a. manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi,				

	pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; dan b. peningkatan kapasitas pelaksana				
24.6 Perguruan Tinggi wajib melakukan pengawasan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat	Semua kegiatan PkM yang terdantai memiliki laporan kemajuan dan pertanggungjawaban kegiatan tentang penyerapan dana selama 70% dan 100% kegiatan				
	Semua kegiatan PkM yang terdantai memiliki laporan hasil audit oleh satuan pengawas internal				
24.7 Perguruan tinggi melaksanakan respon pengguna tentang pelayanan pendanaan kegiatan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun	Ada laporan respon pengguna tentang layanan pendanaan kegiatan pembiayaan secara berkelanjutan dan konsisten pada setiap tahun				
24.8 LPPM memiliki rekapitulasi kegiatan PkM yang relevan dengan bidang keahlian program studi minimal 1 kali dalam 1 tahun, baik dengan pembiayaan PT/mandiri, pembiayaan dalam negeri, maupun pembiayaan luar	Terpenuhinya jumlah PkM dosen yang melibatkan mahasiswa $\geq 25\%$ di setiap prodi				

Keterangan: iya / tidak* = jika 'ya' maka perlu menambahkan bukti pendukung

Ada / tidak* = jika 'ada' maka perlu menambahkan bukti pendukung

L* = Lebih (melebihi Standar Mutu Unesa)

Surabaya,

Auditor : Septina Alrianingrum, SS, M.Pd

Auditi : Dr. Agus Suprijono, S.Pd, M.Si

Handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Agus Suprijono'.

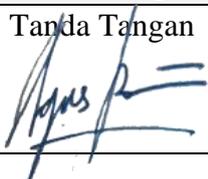
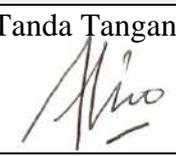
	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	No : KKA-S.....-01
	BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Ringkasan Kondisi Audit	

Auditi				Kriteria			
<i>S2 PIPS</i>				Standar Pengabdian kepada Masyarakat 17-24			
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit			
I.7.01.01		PKM					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota			
Dr. Agus Suprijono, S.Pd, M.Si		Septina Alrianingrum, SS, M.Pd					
Distribusi		Auditi	Auditor	BPM	Arsip		
No Kondisi	Diskripsi Kondisi						Kategori (OB / KTS)
1	Tidak ada dokumen kegiatan pembelajaran dari hasil Kegiatan PkM dosen, tenaga pendidikan dan mahasiswa setidaknya sejumlah dosen pada tiga tahun						KTS
2	-						
dst							

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Agus Suprijono, S.Pd, M.Si		Ketua Auditor	Septina Alrianingrum, SS, M.Pd	

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	No : KKA-S.....-01
	SATUAN PENJAMINAN MUTU	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit		

Auditi				Kriteria			
S2 PIPS				Standar Pengabdian kepada Masyarakat 17-24			
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit			
I.7.01.01		PKM					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota			
Dr. Agus Suprijono, S.Pd, M.Si		Septina Alrianingrum, SS, M.Pd		-			
Distribusi		Auditi		Auditor		BPM	Arsip

Deskripsi Temuan	Tidak ada dokumen kegiatan pembelajaran dari hasil Kegiatan PKM dosen, tenaga pendidikan dan mahasiswa setidaknya sejumlah dosen pada tiga tahun					
Kriteria	KTS					
Akar Penyebab	Belum teradministrasi dengan baik dokumen digital ataupun dokumen fisik					
Akibat	Berkas dokumen tercecer di hasil kegiatan para dosen					
Rekomendasi	Meminta ulang kepada para dosen yang bersangkutan					
Tanggapan Auditi	<i>Siap mendata dan meminta berkas dokumennya</i>					
Rencana Perbaikan	<i>Februari 2024</i>					
Jadwal Perbaikan	<i>Februari 2024</i>		Penanggung Jawab		<i>Koorprodi S2 PIPS</i>	
Rencana Pencegahan	<i>Membuat folder hasil kegiatan</i>					
Jadwal Pencegahan	<i>Juni 2024</i>		Penanggung Jawab		<i>Koorprodi S2 PIPS</i>	
Tempat Persetujuan						
Pimpinan Auditi	Dr. Agus Suprijono, S.Pd, M.Si	Tanda Tangan		Ketua Auditor	Septina Alrianingrum, SS, M.Pd	Tanda Tangan
						

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA				No. 9 – 16 – PKM- Rev02		
	BADAN PENJAMINAN MUTU Gedung Rektorat Unesa Kampus Lidah Surabaya						
AUDIT MUTU INTERNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT							
Auditi					Tahap Audit		
S1 Ilmu Komunikasi							
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit		
https://meet.google.com/ppc-tjyh-gvj					8 September 2023		
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota		
Dr. Anam Miftahul Huda, S.Kom., M.I.Kom.		Muzayanah			1. 2.		
Distribusi		Auditi		Auditor		BPM	Arsip

1. HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
17.1 LPPM memiliki panduan hasil pengabdian kepada masyarakat yang menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi.	Adanya panduan hasil pengabdian kepada masyarakat yang menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi.				
	Adanya kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat yang menerapkan mengamalkan, dan membudayakan salah satu aspek: a. pendidikan, b. ilmu pengetahuan, c. sains, d. teknologi, e. olahraga, f. sastra, dan seni				
17.2 LPPM mengupayakan hasil pengabdian kepada masyarakat ditujukan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat.	Adanya kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat yang dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat melalui: a) pemanfaatan teknologi tepat guna, lebih dari 17% b) pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, sains, teknologi, olahraga, sastra, dan seni sebesar 25% c) pengembangan bahan ajar atau modul pelatihan lebih dari 25%				
17.3 Perguruan Tinggi memiliki kebijakan untuk menghasilkan	Adanya lebih dari 7 karya prototipe per tahun yang dapat digunakan industri dari hasil kegiatan PkM				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
suatu karya prototipe industri					
17.4 Prodi melaksanakan analisis hasil kegiatan PkM	Prodi menganalisis hasil kegiatan PkM dengan ketercapain standar prodi dan peta jalan PkM dosen dan mahasiswa	√			
	Lebih dari 25% hasil PkM digunakan dalam pembelajaran	√			
	Ada lebih dari 25% hasil PkM yang melibatkan mahasiswa	√			

2. ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
18.1 LPPM dan Prodi mempunyai peta jalan, standar dan pedoman pelaksanaan PkM	Ada dokumen kebijakan peta jalan, standar dan pedoman pelaksanaan PkM di LPPM dan prodi yang mampu digunakan dalam menjamin mutu isi PkM	√			
18.2 LPPM mengupayakan Isi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada kebutuhan masyarakat	Ada peningkatan hasil pengabdian kepada masyarakat yang berasal dari hasil penelitian sebesar 30% setiap tahun				
	Ada peningkatan jumlah PkM yang mampu memecahkan masalah dan menerapkan teknologi tepat guna sebesar 35% setiap tahun				
	Ada peningkatan jumlah PkM yang diterapkan langsung oleh DU/DI, masyarakat, ataupun pemerintah sebesar 35% setiap tahun.				
18.3 LPPM memiliki pedoman tentang Isi pengabdian kepada masyarakat memiliki kedalaman dan keluasan materi	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya peningkatan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui respon pengguna • Adanya peningkatan pencapaian hak kekayaan intelektual 35% setiap tahun 				
	Adanya evaluasi peta map tentang arah pengembangan dari isi pengabdian masyarakat di PT				

3. PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
19.1 LPPM memiliki panduan Proses pengabdian kepada masyarakat terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan sesuai aturan yang berlaku	Adanya pedoman yang memandu kesesuaian dengan Renstra Abdimas LPPM Unesa melalui tahapan: pengajuan proposal, pelaksanaan, dan pelaporan sesuai dengan buku panduan yang berlaku				
	Adanya monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan, dan pelaporan sesuai dengan buku panduan yang berlaku				
19.2 LPPM memiliki panduan Bentuk PkM yang dapat dilakukan	Bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa: <ul style="list-style-type: none"> • pelayanan kepada masyarakat; • penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, sastra, dan seni sesuai dengan bidang keahliannya; • peningkatan kapasitas masyarakat; • pemberdayaan masyarakat 				
19.3 LPPM memiliki panduan Proses pelaksanaan PkM	<ul style="list-style-type: none"> • Proses pelaksanaan PkM hendaknya memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, 				

memenuhi standar yang ditetapkan	lingkungan, dan melibatkan mahasiswa dari awal sampai akhir				
	Adanya dokumen standar mutu pelaksanaan PkM yang dikaji secara berkesinambungan				
	Adanya monev pelaksanaan PkM berdasarkan standar yang ditetapkan				
19.4 LPPM memiliki panduan Proses PkM oleh mahasiswa yang terarah dan terevaluasi	Proses PkM mahasiswa dilaksanakan secara terprogram dan terarah sesuai dengan buku panduan yang berlaku				
	Adanya dokumen standar mutu pelaksanaan PkM mahasiswa yang dikaji secara kontinyu				
	Adanya monev pelaksanaan PkM mahasiswa berdasarkan standar yang ditetapkan				
19.5 Kegiatan PkM dosen, tenaga pendidikan dan mahasiswa wajib diimplementasikan dalam industri dan pembelajaran di PT serta diusahakan pengurusan haki paten	Adanya kegiatan pembelajaran dari hasil Kegiatan PkM dosen, tenaga pendidikan dan mahasiswa setidaknya sejumlah dosen pada tiga tahun	√			
	Adanya penerapan implementasi proses hasil kegiatan PkM dosen, tenaga pendidikan dan mahasiswa pada industri yang sesuai dengan bidangnya				
	Adanya kenaikan haki dan paten setiap tahun dengan jumlah 20% dari sejumlah kegiatan PkM yang ada di PT				

4. PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
20.1 LPPM memiliki pedoman Penilaian PkM yang dilakukan dengan prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan sesuai aturan yang berlaku	Penilaian PkM memenuhi ketentuan dan tahapan yang ditentukan: a) laporan kemajuan, b) monitoring dan evaluasi, c) seminar hasil				
20.2 LPPM melakukan Penilaian PkM mengacu pada kriteria minimal	Penilaian memenuhi a. tingkat kepuasan masyarakat; b. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; c. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, sastra, dan seni di masyarakat secara berkelanjutan; d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau				

	e. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan				
20.3 LPPM melakukan evaluasi kegiatan penilaian hasil PkM dalam menjaga mutu proses kegiatan secara kontinyu	Ada kegiatan evaluasi pada saat melakukan penilaian hasil PkM melalui instrumen yang sah dan akurat sehingga dapat didapatkan hasil evaluasi untuk peningkatan mutu kegiatan PkM				

5. PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
21.1 LPPM memiliki pedoman tentang kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan PkM yang dilaksanakan setiap periode pengajuan Proposal PkM	Tim Pelaksana wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan				
	Pelaksanaan sesuai dengan sasaran, jadwal dan lama pelaksanaan yang direncanakan				
	Pelaksanaan dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.				
	Pelaksanaan PkM memberikan kontribusi terhadap pengembangan wilayah, inovasi dan alih teknologi, solusi persoalan masyarakat, pengentasan kemiskinan, dan pemberdayaan masyarakat.				
21.2 Pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan: a. kualifikasi akademik; dan	Adanya CV pengabdian yang memuat kualifikasi akademik dan hasil penelitian yang pernah dilakukan				
	Adanya monitoring dan evaluasi yang dapat memantau dengan baik, terjadwal dan konsisten				
	Hasil PkM dikembangkan sesuai kualifikasi akademik, dilakukan tindak				

b. hasil pengabdian kepada masyarakat berdasarkan ketentuan yang berlaku	lanjut, mengintegrasikan hasil pada pembelajaran dan dipublikasikan sekurangnya melalui seminar regional				
	Pelaksanaan PKM difasilitasi lembaga dengan baik, ada dukungan kerjasama sarpras, ada penghargaan bagi pelaksana PkM berprestasi				
21.3 Dalam melaksanakan PkM, DTSPS melibatkan mahasiswa PS	Lebih dari 25% PkM DTSPS melibatkan mahasiswa dalam 3 tahun terakhir				

6. SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
22.1 Perguruan Tinggi Wajib memiliki kebijakan menyediakan fasilitas Sarana dan prasarana PkM memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat setiap tahun sesuai dengan Renstra	Adanya SOP yang mengatur peningkatan layanan fasilitas sarpras oleh lembaga yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses PkM dalam rangka memenuhi hasil PkM				
	Adanya dokumen inventaris yang baik dan lengkap dalam memenuhi kebutuhan kegiatan PkM				
22.2 Perguruan Tinggi wajib memberikan ijin penggunaan fasilitas Sarana dan Prasarana guna mendukung keterlaksanaan Kegiatan PkM yang diadakan setiap tahunnya.	Adanya ijin dari perguruan tinggi untuk menggunakan fasilitas; a. terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan; b. proses pembelajaran; dan kegiatan penelitian				
22.3 Perguruan Tinggi wajib menjamin pemenuhan standar	Sarana dan prasarana PkM memenuhi unsur keselamatan kerja, kesehatan,				

pada Sarana dan prasarana sesuai aturan yang berlaku	kenyamanan, dan keamanan pengabdian, masyarakat, dan lingkungan				
22.4 Prodi wajib memberikan dukungan fasilitas sarana dan prasarana jika LPPM telah memberikan ijin	Adanya dokumen penggunaan sarana dan prasarana kegiatan PkM di prodi	√			
	Adanya catatan keterlibatan prodi dalam pelaksanaan kegiatan PkM sesuai dengan peta jalan kegiatan PkM di prodi	√			
22.5 PT melakukan survey kepuasan pelanggan secara berkala	Ada instrumen survei kepuasan pelanggan yang sah				
	Ada hasil analisis survei kepuasan pelanggan tentang fasilitas sarana dan prasarana				

7. PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
23.1 Perguruan Tinggi memiliki kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan PkM memiliki kriteria kesesuaian dengan <ol style="list-style-type: none"> a. Renstra Abdimas LPPM Unesa b. Road map dengan PkM kemenristekdikti c. Kriteria minimal pengelolaan PkM yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, dan pelaporan 2. Adanya Surat Perintah Kerja (SPK) 3. Adanya prosedur mutu, pemantauan, dan evaluasi 4. Adanya Laporan kegiatan yang sesuai 				
23.2 Perguruan Tinggi Wajib membentuk Unit Pengelola PkM yang bertugas untuk melakukan Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya	Pengelolaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dikelola dengan baik sesuai dengan OTK.				

<p>23.3 Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Perguruan wajib melakukan pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>Adanya sinergi yang terlembaga dengan baik antara LPPM dengan Pusat Pengembangan sebagai unit kerja pendukung</p>				
<p>23.4 LPPM memiliki kebijakan tertulis pimpinan PT (Rektor, Dekan, atau Ketua prodi) tentang pengabdian kepada masyarakat (renstra, pembuatan peta jalan PkM, dan pelaksana PkM di PT atau UPPS)</p>	<p>Adanya peraturan, panduan, dan sistem Penjaminan mutu internal kegiatan PkM; memiliki RENSTRA PkM yang merupakan RENSTRA universitas dengan ketentuan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki kriteria dan prosedur penilaian PkM paling sedikit menyangkut aspek hasil PkM dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa; b. Peningkatan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi PkM dalam menjalankan program PkM secara berkelanjutan; c. Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana PkM dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM; d. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah dan jenis PkM; e. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada 				

	<p>masyarakat dalam menyelenggarakan program PkM paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.</p> <p>f. Tersedia dokumen lengkap kebijakan pimpinan PT (Rektor, Dekan, atau Koorprodi) tentang PkM, dan telah disosialisasikan, dilaksanakan, dievaluasi dan ditindaklanjuti</p>				
--	--	--	--	--	--

8. PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
24.1 Perguruan Tinggi wajib menyediakan Pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang telah disusun sesuai peraturan yang berlaku	Adanya pedoman mekanisme pendanaan kegiatan PkM				
	Adanya pelaksanaan penjaminan mutu mekanisme pendanaan kegiatan PkM				
24.2 Perguruan tinggi wajib menyediakan dana internal untuk	Adanya RBA atau sumber dana lain yang mendukung keterlaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat				

pengabdian kepada masyarakat berdasarkan peraturan yang berlaku					
24.3 Perguruan Tinggi dapat memberikan fasilitas Pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari DRPM, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat	Adanya sumber dana lain dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat				
24.4 Perguruan Tinggi mengalokasikan pendanaan khusus untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dialokasikan sesuai dengan panduan	Adanya pengalokasian dana untuk membiayai: a. perencanaan, b. pelaksanaan, c. pengendalian, pemantauan dan d. evaluasi, e. pelaporan, serta f. diseminasi hasil				
24.5 Perguruan Tinggi wajib mengatur mekanisme pendanaan dalam kegiatan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat	Adanya pengelolaan manajemen dan peningkatan kapasitas pengelola dengan tugas 1) mengatur pengeluaran dana 2) mengatur pembiayaan yang meliputi: a. manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi,				

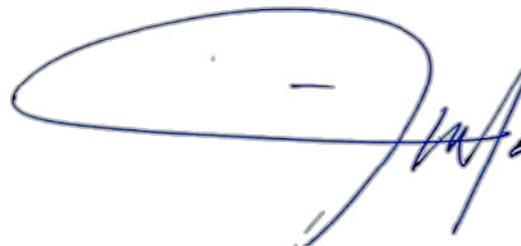
	<p>pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; dan</p> <p>b. peningkatan kapasitas pelaksana</p>				
<p>24.6 Perguruan Tinggi wajib melakukan pengawasan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat</p>	<p>Semua kegiatan PkM yang terdanai memiliki laporan kemajuan dan pertanggungjawaban kegiatan tentang penyerapan dana selama 70% dan 100% kegiatan</p>				
	<p>Semua kegiatan PkM yang terdanai memiliki laporan hasil audit oleh satuan pengawas internal</p>				
<p>24.7 Perguruan tinggi melaksanakan respon pengguna tentang pelayanan pendanaan kegiatan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun</p>	<p>Ada laporan respon pengguna tentang layanan pendanaan kegiatan pembiayaan secara berkelanjutan dan konsisten pada setiap tahun</p>				
<p>24.8 LPPM memiliki rekapitulasi kegiatan PkM yang relevan dengan bidang keahlian program studi minimal 1 kali dalam 1 tahun, baik dengan pembiayaan PT/mandiri, pembiayaan dalam negeri, maupun pembiayaan luar</p>	<p>Terpenuhinya jumlah PkM dosen yang melibatkan mahasiswa $\geq 25\%$ di setiap prodi</p>				

Keterangan: iya / tidak* = jika 'ya' maka perlu menambahkan bukti pendukung
Ada / tidak* = jika 'ada' maka perlu menambahkan bukti pendukung
L* = Lebih (melebihi Standar Mutu Unesa)

Surabaya, * September 2023

Auditor : Muzayanah

Auditi : Dr. Anam Miftahul Huda, S.Kom., M.I.Kom.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized loop followed by several vertical strokes, positioned to the right of the text for Dr. Anam Miftahul Huda.

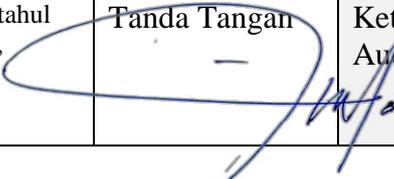
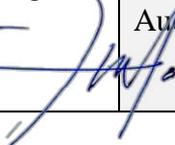
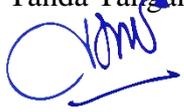
	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	No : KKA-S.....-01
	BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Ringkasan Kondisi Audit	

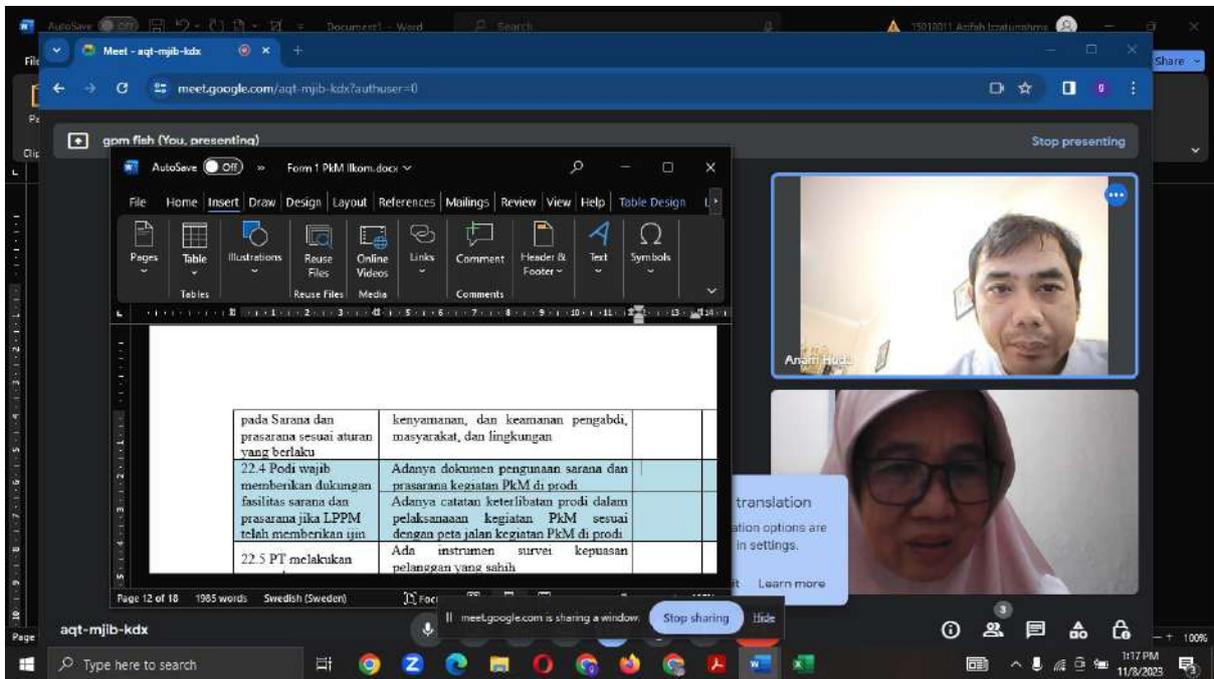
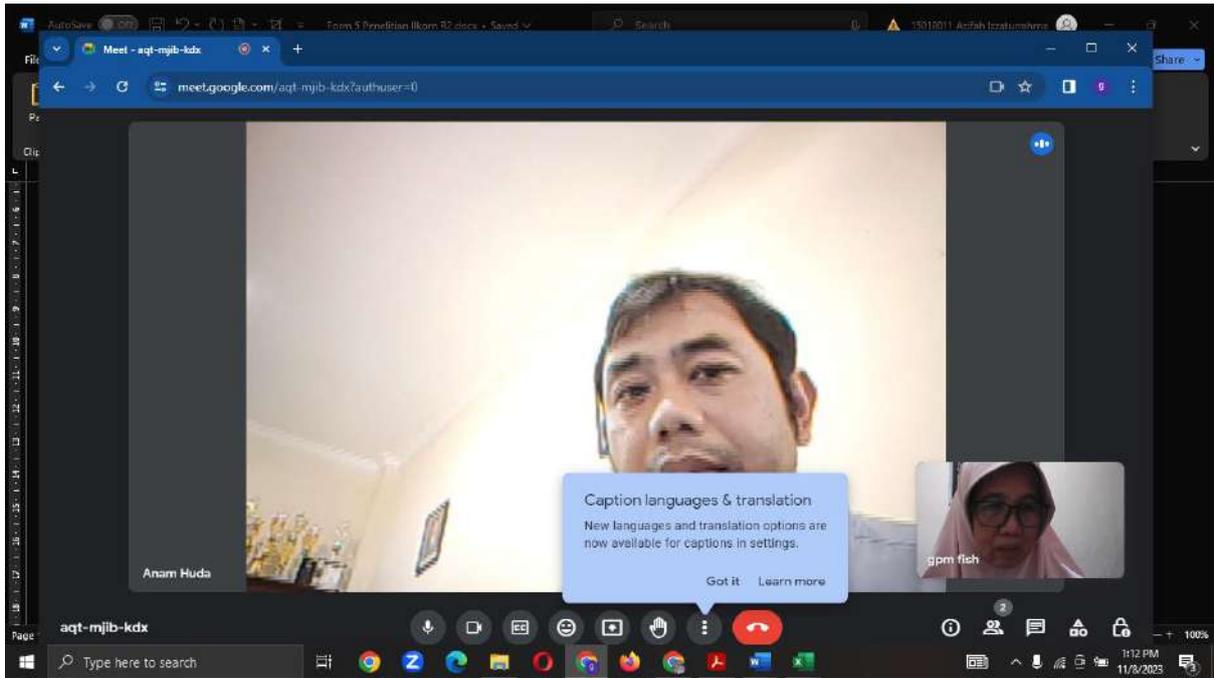
Auditi				Kriteria			
<i>Ilmu Komunikasi</i>				Standar Pengabdian kepada Masyarakat 17-24			
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit			
https://meet.google.com/ppc-tjyh-gvj				8 September 2023			
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota			
Dr. Anam Miftahul Huda, S.Kom., M.I.Kom.		Muzayanah					
Distribusi		Auditi		Auditor		BPM	Arsip
No Kondisi	Diskripsi Kondisi						Kategori (OB / KTS)
1	-						
2							
dst							

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Anam Miftahul Huda, S.Kom., M.I.Kom.		Ketua Auditor	Muzayanah	

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	No : KKA-S.....-01
	SATUAN PENJAMINAN MUTU	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit		

Auditi				Kriteria			
S1 Ilmu Komunikasi				Standar Penelitian 9-16			
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit			
https://meet.google.com/ppc-tjyh-gvj				8 September 2023			
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota			
Dr. Anam Miftahul Huda, S.Kom., M.I.Kom		Muzayannah		-			
Distribusi		Auditi		Auditor		BPM	Arsip

Deskripsi Temuan	Program studi mempunyai dana dari penelitian dari sumber dana nasional sekurang-kurangnya 2 proposal dan sumber dana internasional 1 proposal					
Kriteria	KTS					
Akar Penyebab	Belum ada jaringan internasional					
Akibat	Belum ada pendanaan penelitian dari luar negeri					
Rekomendasi	Menjalin jejaring internasional					
Tanggapan Auditi	setuju					
Rencana Perbaikan	Memperluas jejaring penelitian internasional					
Jadwal Perbaikan	2024	Penanggung Jawab				
Rencana Pencegahan	<i>Menyarankan dosen muda untuk mendapatkan beasiswa melanjutkan studi ke luar negeri shg bisa memperluas jejaring internasional</i>					
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab		Koorprod		
Tempat Persetujuan						
Pimpinan Auditi	Dr. Anam Miftahul Huda, S.Kom., M.I.Kom	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Muzayannah	Tanda Tangan	
						



	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA				No. 9 – 16 – PKM- Rev02				
	BADAN PENJAMINAN MUTU Gedung Rektorat Unesa Kampus Lidah Surabaya								
AUDIT MUTU INTERNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT									
Auditi					Tahap Audit				
S1 Ilmu Politik									
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
I.5.01.01		PKM			20 November 2023				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
1. Dr. Moch. Mubarak Muharram, S.IP, M.IP 2.		Septina Alrianingrum, SS, M.Pd			1. 2.				
Distribusi		Auditi		Auditor		BPM		Arsip	

1. HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
17.1 LPPM memiliki panduan hasil pengabdian kepada masyarakat yang menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi.	Adanya panduan hasil pengabdian kepada masyarakat yang menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi.				
	Adanya kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat yang menerapkan mengamalkan, dan membudayakan salah satu aspek: a. pendidikan, b. ilmu pengetahuan, c. sains, d. teknologi, e. olahraga, f. sastra, dan seni				
17.2 LPPM mengupayakan hasil pengabdian kepada masyarakat ditujukan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat.	Adanya kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat yang dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat melalui: a) pemanfaatan teknologi tepat guna, lebih dari 17% b) pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, sains, teknologi, olahraga, sastra, dan seni sebesar 25% c) pengembangan bahan ajar atau modul pelatihan lebih dari 25%				
17.3 Perguruan Tinggi memiliki kebijakan untuk menghasilkan	Adanya lebih dari 7 karya prototipe per tahun yang dapat digunakan industri dari hasil kegiatan PkM				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
suatu karya prototipe industri					
17.4 Prodi melaksanakan analisis hasil kegiatan PkM	Prodi menganalisis hasil kegiatan PkM dengan ketercapain standar prodi dan peta jalan PkM dosen dan mahasiswa		V		
	Lebih dari 25% hasil PkM digunakan dalam pembelajaran		V		
	Ada lebih dari 25% hasil PkM yang melibatkan mahasiswa		V		

2. ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
18.1 LPPM dan Prodi mempunyai peta jalan, standar dan pedoman pelaksanaan PkM	Ada dokumen kebijakan peta jalan, standar dan pedoman pelaksanaan PkM di LPPM dan prodi yang mampu digunakan dalam menjamin mutu isi PkM		V		
18.2 LPPM mengupayakan Isi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada kebutuhan masyarakat	Ada peningkatan hasil pengabdian kepada masyarakat yang berasal dari hasil penelitian sebesar 30% setiap tahun				
	Ada peningkatan jumlah PkM yang mampu memecahkan masalah dan menerapkan teknologi tepat guna sebesar 35% setiap tahun				
	Ada peningkatan jumlah PkM yang diterapkan langsung oleh DU/DI, masyarakat, ataupun pemerintah sebesar 35% setiap tahun.				
18.3 LPPM memiliki pedoman tentang Isi pengabdian kepada masyarakat memiliki kedalaman dan keluasan materi	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya peningkatan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui respon pengguna • Adanya peningkatan pencapaian hak kekayaan intelektual 35% setiap tahun 				
	Adanya evaluasi peta map tentang arah pengembangan dari isi pengabdian masyarakat di PT				

3. PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
19.1 LPPM memiliki panduan Proses pengabdian kepada masyarakat terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan sesuai aturan yang berlaku	Adanya pedoman yang memandu kesesuaian dengan Renstra Abdimas LPPM Unesa melalui tahapan: pengajuan proposal, pelaksanaan, dan pelaporan sesuai dengan buku panduan yang berlaku				
	Adanya monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan, dan pelaporan sesuai dengan buku panduan yang berlaku				
19.2 LPPM memiliki panduan Bentuk PkM yang dapat dilakukan	Bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa: <ul style="list-style-type: none"> • pelayanan kepada masyarakat; • penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, sastra, dan seni sesuai dengan bidang keahliannya; • peningkatan kapasitas masyarakat; • pemberdayaan masyarakat 				
19.3 LPPM memiliki panduan Proses pelaksanaan PkM	<ul style="list-style-type: none"> • Proses pelaksanaan PkM hendaknya memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, 				

memenuhi standar yang ditetapkan	lingkungan, dan melibatkan mahasiswa dari awal sampai akhir				
	Adanya dokumen standar mutu pelaksanaan PkM yang dikaji secara berkesinambungan				
	Adanya monev pelaksanaan PkM berdasarkan standar yang ditetapkan				
19.4 LPPM memiliki panduan Proses PkM oleh mahasiswa yang terarah dan terevaluasi	Proses PkM mahasiswa dilaksanakan secara terprogram dan terarah sesuai dengan buku panduan yang berlaku				
	Adanya dokumen standar mutu pelaksanaan PkM mahasiswa yang dikaji secara kontinyu				
	Adanya monev pelaksanaan PkM mahasiswa berdasarkan standar yang ditetapkan				
19.5 Kegiatan PkM dosen, tenaga pendidikan dan mahasiswa wajib diimplementasikan dalam industri dan pembelajaran di PT serta diusahakan pengurusan haki paten	Adanya kegiatan pembelajaran dari hasil Kegiatan PkM dosen, tenaga pendidikan dan mahasiswa setidaknya sejumlah dosen pada tiga tahun		V		
	Adanya penerapan implementasi proses hasil kegiatan PkM dosen, tenaga pendidikan dan mahasiswa pada industri yang sesuai dengan bidangnya				
	Adanya kenaikan haki dan paten setiap tahun dengan jumlah 20% dari sejumlah kegiatan PkM yang ada di PT				

4. PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
20.1 LPPM memiliki pedoman Penilaian PkM yang dilakukan dengan prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan sesuai aturan yang berlaku	Penilaian PkM memenuhi ketentuan dan tahapan yang ditentukan: a) laporan kemajuan, b) monitoring dan evaluasi, c) seminar hasil		v		
20.2 LPPM melakukan Penilaian PkM mengacu pada kriteria minimal	Penilaian memenuhi a. tingkat kepuasan masyarakat; b. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; c. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, sastra, dan seni di masyarakat secara berkelanjutan; d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau		v		

	e. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan				
20.3 LPPM melakukan evaluasi kegiatan penilaian hasil PkM dalam menjaga mutu proses kegiatan secara kontinyu	Ada kegiatan evaluasi pada saat melakukan penilaian hasil PkM melalui instrumen yang sah dan akurat sehingga dapat didapatkan hasil evaluasi untuk peningkatan mutu kegiatan PkM				

5. PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
21.1 LPPM memiliki pedoman tentang kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan PkM yang dilaksanakan setiap periode pengajuan Proposal PkM	Tim Pelaksana wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan				
	Pelaksanaan sesuai dengan sasaran, jadwal dan lama pelaksanaan yang direncanakan				
	Pelaksanaan dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.				
	Pelaksanaan PkM memberikan kontribusi terhadap pengembangan wilayah, inovasi dan alih teknologi, solusi persoalan masyarakat, pengentasan kemiskinan, dan pemberdayaan masyarakat.				
21.2 Pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan:	Adanya CV pengabdi yang memuat kualifikasi akademik dan hasil penelitian yang pernah dilakukan				
	Adanya monitoring dan evaluasi yang dapat memantau dengan baik, terjadwal dan konsisten				

a. kualifikasi akademik; dan b. hasil pengabdian kepada masyarakat berdasarkan ketentuan yang berlaku	Hasil PkM dikembangkan sesuai kualifikasi akademik, dilakukan tindak lanjut, mengintegrasikan hasil pada pembelajaran dan dipublikasikan sekurangnya melalui seminar regional				
	Pelaksanaan PKM difasilitasi lembaga dengan baik, ada dukungan kerjasama sarpras, ada penghargaan bagi pelaksana PkM berprestasi				
21.3 Dalam melaksanakan PkM, DTSP melibatkan mahasiswa PS	Lebih dari 25% PkM DTSP melibatkan mahasiswa dalam 3 tahun terakhir				

6. SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
22.1 Perguruan Tinggi Wajib memiliki kebijakan menyediakan fasilitas Sarana dan prasarana PkM memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat setiap tahun sesuai dengan Renstra	Adanya SOP yang mengatur peningkatan layanan fasilitas sarpras oleh lembaga yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses PkM dalam rangka memenuhi hasil PkM				
	Adanya dokumen inventaris yang baik dan lengkap dalam memenuhi kebutuhan kegiatan PkM				
22.2 Perguruan Tinggi wajib memberikan ijin penggunaan fasilitas Sarana dan Prasarana guna mendukung keterlaksanaan Kegiatan PkM yang	Adanya ijin dari perguruan tinggi untuk menggunakan fasilitas; a. terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan; b. proses pembelajaran; dan kegiatan penelitian				

diadakan setiap tahunnya.					
22.3 Perguruan Tinggi wajib menjamin pemenuhan standar pada Sarana dan prasarana sesuai aturan yang berlaku	Sarana dan prasarana PkM memenuhi unsur keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pengabdian, masyarakat, dan lingkungan				
22.4 PkM wajib memberikan dukungan fasilitas sarana dan prasarana jika LPPM telah memberikan ijin	Adanya dokumen penggunaan sarana dan prasarana kegiatan PkM di prodi		V		
	Adanya catatan keterlibatan prodi dalam pelaksanaan kegiatan PkM sesuai dengan peta jalan kegiatan PkM di prodi		V		
22.5 PT melakukan survey kepuasan pelanggan secara berkala	Ada instrumen survei kepuasan pelanggan yang sah				
	Ada hasil analisis survei kepuasan pelanggan tentang fasilitas sarana dan prasarana				

7. PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
23.1 Perguruan Tinggi memiliki kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan PkM memiliki kriteria kesesuaian dengan <ol style="list-style-type: none"> a. Renstra Abdimas LPPM Unesa b. Road map dengan PkM kemenristekdikti c. Kriteria minimal pengelolaan PkM yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, dan pelaporan 2. Adanya Surat Perintah Kerja (SPK) 3. Adanya prosedur mutu, pemantauan, dan evaluasi 4. Adanya Laporan kegiatan yang sesuai 				
23.2 Perguruan Tinggi Wajib membentuk Unit Pengelola PkM yang bertugas untuk melakukan	Pengelolaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dikelola dengan baik sesuai dengan OTK.				

<p>Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya</p>					
<p>23.3 Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Perguruan wajib melakukan pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>Adanya sinergi yang terlembaga dengan baik antara LPPM dengan Pusat Pengembangan sebagai unit kerja pendukung</p>				
<p>23.4 LPPM memiliki kebijakan tertulis pimpinan PT (Rektor, Dekan, atau Ketua prodi) tentang pengabdian kepada masyarakat (renstra, pembuatan peta jalan PkM, dan pelaksana PkM di PT atau UPPS)</p>	<p>Adanya peraturan, panduan, dan sistem Penjaminan mutu internal kegiatan PkM; memiliki RENSTRA PkM yang merupakan RENSTRA universitas dengan ketentuan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki kriteria dan prosedur penilaian PkM paling sedikit menyangkut aspek hasil PkM dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa; b. Peningkatan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi PkM dalam menjalankan program PkM secara berkelanjutan; c. Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana PkM dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM; 				

	<p>d. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah dan jenis PkM;</p> <p>e. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program PkM paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.</p> <p>f. Tersedia dokumen lengkap kebijakan pimpinan PT (Rektor, Dekan, atau Koorprodi) tentang PkM, dan telah disosialisasikan, dilaksanakan, dievaluasi dan ditindaklanjuti</p>				
--	---	--	--	--	--

8. PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
24.1 Perguruan Tinggi wajib menyediakan Pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang telah	Adanya pedoman mekanisme pendanaan kegiatan PkM				
	Adanya pelaksanaan penjaminan mutu mekanisme pendanaan kegiatan PkM				

disusun sesuai peraturan yang berlaku					
24.2 Perguruan tinggi wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat berdasarkan peraturan yang berlaku	Adanya RBA atau sumber dana lain yang mendukung keterlaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat				
24.3 Perguruan Tinggi dapat memberikan fasilitas Pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari DRPM, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat	Adanya sumber dana lain dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat				
24.4 Perguruan Tinggi mengalokasikan pendanaan khusus untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dialokasikan sesuai dengan panduan	Adanya pengalokasian dana untuk membiayai: <ul style="list-style-type: none"> a. perencanaan, b. pelaksanaan, c. pengendalian, pemantauan dan d. evaluasi, e. pelaporan, serta f. diseminasi hasil 				
24.5 Perguruan Tinggi wajib mengatur mekanisme pendanaan	Adanya pengelolaan manajemen dan peningkatan kapasitas pengelola dengan tugas				

dalam kegiatan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat	<p>1) mengatur pengeluaran dana</p> <p>2) mengatur pembiayaan yang meliputi:</p> <p>a. manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; dan</p> <p>b. peningkatan kapasitas pelaksana</p>				
24.6 Perguruan Tinggi wajib melakukan pengawasan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat	Semua kegiatan PkM yang terdanai memiliki laporan kemajuan dan pertanggungjawaban kegiatan tentang penyerapan dana selama 70% dan 100% kegiatan				
	Semua kegiatan PkM yang terdanai memiliki laporan hasil audit oleh satuan pengawas internal				
24.7 Perguruan tinggi melaksanakan respon pengguna tentang pelayanan pendanaan kegiatan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun	Ada laporan respon pengguna tentang layanan pendanaan kegiatan pembiayaan secara berkelanjutan dan konsisten pada setiap tahun				
24.8 LPPM memiliki rekapitulasi kegiatan PkM yang relevan dengan bidang keahlian program studi minimal 1 kali dalam 1 tahun, baik dengan pembiayaan	Terpenuhinya jumlah PkM dosen yang melibatkan mahasiswa $\geq 25\%$ di setiap prodi				

PT/mandiri, pembiayaan dalam negeri, maupun pembiayaan luar					
--	--	--	--	--	--

Keterangan: iya / tidak* = jika 'ya' maka perlu menambahkan bukti pendukung

Ada / tidak* = jika 'ada' maka perlu menambahkan bukti pendukung

L* = Lebih (melebihi Standar Mutu Unesa)

Surabaya, 20 November 2023

Auditor : Septina Alrianingrum, SS, M.Pd

Auditi : Dr. Moch. Mubarak Muharram, S.IP, M.IP



	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	No : KKA-S.....-01
	BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Ringkasan Kondisi Audit	

Auditi				Kriteria					
<i>S2 PIPS</i>				Standar Pengabdian kepada Masyarakat 17-24					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
I.5.01.01		PKM		20 November 2023					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Dr. Moch. Mubarak Muharram, S.IP, M.IP		Septina Alrianingrum, SS, M.Pd							
Distribusi		Auditi		Auditor		BPM		Arsip	
No Kondisi	Diskripsi Kondisi							Kategori (OB / KTS)	
1	-								
2	-								
dst									

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Moch. Mubarak Muharram, S.IP, M.IP		Ketua Auditor	Septina Alrianingrum, SS, M.Pd	

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	No : KKA-S.....-01
	SATUAN PENJAMINAN MUTU	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit		

Auditi				Kriteria			
S1 Ilmu Politik				Standar Pengabdian kepada Masyarakat 17-24			
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit			
I.5.01.01		PKM		20 November 2023			
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota			
Dr. Moch. Mubarak Muharram, S.IP, M.IP		Septina Alrianingrum, SS, M.Pd		-			
Distribusi		Auditi		Auditor		BPM	Arsip

Deskripsi Temuan	Tidak ada					
Kriteria	-					
Akar Penyebab	S1 Ilmu Politik merupakan program studi baru yang dibuka mulai tahun ajaran baru semester gasal 2023/2024					
Akibat	Semua dosen belum mengikuti kompetisi PKM					
Rekomendasi	-					
Tanggapan Auditi	-					
Rencana Perbaikan	-					
Jadwal Perbaikan	-		<i>Penanggung Jawab</i>		-	
Rencana Pencegahan	-					
Jadwal Pencegahan	-		<i>Penanggung Jawab</i>		-	
Tempat Persetujuan						
Pimpinan Auditi	Dr. Moch. Mubarak Muharram, S.IP, M.IP	Tanda Tangan 	Ketua Auditor	Septina Alrianingrum, SS, M.Pd	Tanda Tangan 	

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA				No. 9 – 16 – PKM- Rev02					
	SATUAN PENJAMINAN MUTU Gedung Rektorat Unesa Kampus Lidah Surabaya									
AUDIT MUTU INTERNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT										
Auditi					Tahap Audit					
Lokasi			Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Wakil Auditi			Auditor Ketua		Auditor Anggota					
1.					1.					
2.					2.					
Distribusi			Auditi		Auditor		LPPM		Arsip	

1. HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
17.1 LPPM memiliki panduan hasil pengabdian kepada masyarakat yang menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi.	Adanya panduan hasil pengabdian kepada masyarakat yang menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi.				
	Adanya kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat yang menerapkan mengamalkan, dan membudayakan salah satu aspek: a. pendidikan, b. ilmu pengetahuan, c. sains, d. teknologi, e. olahraga, f. sastra, dan seni				
17.2 LPPM mengupayakan hasil pengabdian kepada masyarakat ditujukan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat.	Adanya kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat yang dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat melalui: a) pemanfaatan teknologi tepat guna, dan b) pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, sains, teknologi, olahraga, sastra, dan seni, pengembangan bahan ajar atau modul pelatihan				
17.3 Perguruan Tinggi memiliki kebijakan untuk menghasilkan suatu karya prototipe	Adanya sekurang kurangnya 5 karya prototipe per tahun yang dapat digunakan industri dari hasil kegiatan PkM				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
industri					
17.4 Prodi melaksanakan analisis hasil kegiatan PkM	Prodi menganalisa hasil kegiatan PkM dengan ketercapain standar prodi dan peta jalan PkM dosen dan mahasiswa				
	Ada pemanfaatan hasil PkM Dosen tetap yang digunakan dalam pembelajaran sekurang-kurang tiga hasil PkM dalam setiap tahun.				
	Ada keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan PkM				

2. ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
18.1 LPPM dan Prodi mempunyai peta jalan, standar dan pedoman pelaksanaan PkM	Ada dokumen kebijakan peta jalan, standar dan pedoman pelaksanaan PkM di LPPM dan prodi yang mampu digunakan dalam menjamin mutu isi PkM				
18.2 LPPM mengupayakan Isi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada kebutuhan masyarakat	Ada peningkatan hasil pengabdian kepada masyarakat yang berasal dari hasil penelitian sebesar 30% setiap tahun				
	Ada peningkatan jumlah PkM yang mampu memecahkan masalah dan menerapkan teknologi tepat guna sebesar 35% setiap tahun				
	Ada peningkatan jumlah PkM yang diterapkan langsung oleh DU/DI, masyarakat, ataupun pemerintah sebesar 35% setiap tahun.				
18.3 LPPM memiliki pedoman tentang Isi pengabdian kepada masyarakat memiliki kedalaman dan keluasan materi	<ul style="list-style-type: none"> Adanya peningkatan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui respon pengguna Adanya peningkatan pencapaian hak kekayaan intelektual 35% setiap tahun 				
	Adanya evaluasi road map tentang arah pengembangan dari isi pengabdian				

	masyarakat di PT				
--	------------------	--	--	--	--

3. PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
19.1 LPPM memiliki panduan Proses pengabdian kepada masyarakat terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan sesuai aturan yang berlaku	Adanya pedoman yang memandu kesesuaian dengan Renstra Abdimas LPPM Unesa melalui tahapan: pengajuan proposal, pelaksanaan, dan pelaporan sesuai dengan buku panduan yang berlaku				
	Adanya monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan, dan pelaporan sesuai dengan buku panduan yang berlaku				
19.2 LPPM memiliki panduan Bentuk PkM yang dapat dilakukan	Bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa: <ul style="list-style-type: none"> • pelayanan kepada masyarakat; • penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, sastra, dan seni sesuai dengan bidang keahliannya; • peningkatan kapasitas masyarakat; atau pemberdayaan masyarakat				
19.3 LPPM memiliki	<ul style="list-style-type: none"> • Proses pelaksanaan PkM hendaknya memenuhi standar mutu, keselamatan 				

panduan Proses pelaksanaan PkM memenuhi standar yang ditetapkan	kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, lingkungan, dan melibatkan mahasiswa dari awal sampai akhir				
	Adanya dokumen standar mutu pelaksanaan PkM yang dikaji secara kontinyu.				
	Adanya monev pelaksanaan PkM berdasarkan standar yang ditetapkan				
19.4 LPPM memiliki panduan Proses PkM oleh mahasiswa yang terarah dan terevaluasi	Proses PkM mahasiswa dilaksanakan secara terprogram dan terarah sesuai dengan buku panduan yang berlaku				
	Adanya dokumen standar mutu pelaksanaan PkM mahasiswa yang dikaji secara kontinyu				
	Adanya monev pelaksanaan PkM mahasiswa berdasarkan standar yang ditetapkan				
19.5 Kegiatan PkM dosen, tenaga pendidikan dan mahasiswa wajib diimplementasikan dalam industri dan pembelajaran di PT serta diusahakan pengurusan hak paten	Adanya kegiatan pembelajaran dari hasil Kegiatan PkM dosen, tenaga pendidikan dan mahasiswa setidaknya sejumlah dosen pada tiga tahun				
	Adanya penerapan implementasi proses hasil kegiatan Kegiatan PkM dosen, tenaga pendidikan dan mahasiswa pada industri yang sesuai dengan bidangnya				
	Adanya kenaikan hak dan paten setiap tahun dengan jumlah 20% dari sejumlah kegiatan PkM yang ada di PT				

4. PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
20.1 LPPM memiliki pedoman Penilaian PkM yang dilakukan dengan prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan sesuai aturan yang berlaku	Penilaian PkM memenuhi ketentuan dan tahapan yang ditentukan: a) laporan kemajuan, b) monitoring dan evaluasi, c) seminar hasil				
20.2 LPPM melakukan Penilaian PkM mengacu pada kriteria minimal	Penilaian memenuhi a. tingkat kepuasan masyarakat; b. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; c. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, sastra, dan seni di masyarakat secara berkelanjutan; d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau e. teratasinya masalah sosial dan				

	rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan				
20.3 LPPM melakukan evaluasi kegiatan penilaian hasil PkM dalam menjaga mutu proses kegiatan secara kontinyu	Ada kegiatan evaluasi pada saat melakukan penilaian hasil PkM melalui instrumen yang sah dan akurat sehingga dapat didapatkan hasil evaluasi untuk peningkatan mutu kegiatan PkM				

5. PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
21.1 LPPM memiliki pedoman tentang kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan PkM yang dilaksanakan setiap periode pengajuan Proposal PkM	Tim Pelaksana wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan				
	Pelaksanaan sesuai dengan sasaran, jadwal dan lama pelaksanaan yang direncanakan				
	Pelaksanaan dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.				
	Pelaksanaan PkM memberikan kontribusi terhadap pengembangan wilayah, inovasi dan alih teknologi, solusi persoalan masyarakat, pengentasan kemiskinan, dan pemberdayaan masyarakat.				
21.2 Pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan:	Adanya CV pengabdian yang memuat kualifikasi akademik dan hasil penelitian yang pernah dilakukan				
	Adanya monitoring dan evaluasi yang dapat memantau dengan baik, terjadwal dan konsisten				

a. kualifikasi akademik; dan b. hasil pengabdian kepada masyarakat berdasarkan ketentuan yang berlaku	Hasil pengabdian masyarakat dikembangkan sesuai kualifikasi akademik, dilakukan tindak lanjut, mengintegrasikan hasil pada pembelajaran dan dipublikasikan sekurangnya melalui seminar regional				
	Pelaksanaan PKM difasilitasi lembaga dengan baik, ada dukungan kerjasama sarpras, ada penghargaan bagi pelaksana PkM berprestasi				

6. SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
22.1 Perguruan Tinggi Wajib memiliki kebijakan menyediakan fasilitas Sarana dan prasarana PkM memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat setiap tahun sesuai dengan Renstra	Adanya POS dalam meningkatkan layanan fasilitas sarpras oleh lembaga yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat				
	Adanya dokumen inventaris yang baik dan lengkap dalam memenuhi kebutuhan kegiatan PkM				
22.2 Perguruan Tinggi wajib memberikan ijin penggunaan fasilitas Sarana dan Prasarana guna mendukung keterlaksanaan Kegiatan PkM yang diadakan setiap tahunnya.	Adanya ijin dari perguruan tinggi untuk menggunakan fasilitas; a. terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan; b. proses pembelajaran; dan kegiatan penelitian				
22.3 Perguruan Tinggi wajib menjamin pemenuhan standar	Sarana dan prasarana PkM memenuhi unsur keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pengabdi,				

pada Sarana dan prasarana sesuai aturan yang berlaku	masyarakat, dan lingkungan				
22.4 Podi wajib memberikan dukungan fasilitas sarana dan prasarana jika LPPM telah memberikan izin	Adanya dokumen penggunaan sarana dan prasarana kegiatan PkM di prodi				
	Adanya catatan keterlibatan prodi dalam pelaksanaan kegiatan PkM sesuai dengan road map kegiatan PkM di prodi				
22.5 PT melakukan survey kepuasan pelanggan secara berkala	Ada instrumen survey kepuasan pelanggan yang sah				
	Ada hasil analisis survey kepuasan pelanggan tentang fasilitas sarana dan prasarana				

7. PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
23.1 Perguruan Tinggi memiliki kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan.	a) Kegiatan PkM memiliki kriteria kesesuaian dengan. <ol style="list-style-type: none"> 1. Renstra Abdimas LPPM Unesa 2. Road map dengan PkM kemenristekdikti, 3. Kriteria minimal pengelolaan PkM yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, dan pelaporan b) Adanya Surat Perintah Kerja (SPK), c) Adanya prosedur mutu, pemantauan, dan evaluasi, d) Adanya Laporan kegiatan yang sesuai				
23.2 Perguruan Tinggi Wajib membentuk Unit Pengelola PkM yang bertugas untuk melakukan Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya	Pengelolaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dikelola dengan baik sesuai dengan OTK.				
23.3 Lembaga	Adanya sinergi yang terlembaga dengan				

<p>Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Perguruan wajib melakukan pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>baik antara LPPM dengan Pusat Pengembangan sebagai unit kerja pendukung</p>				
	<p>Adanya peraturan, panduan, dan sistem Penjaminan mutu internal kegiatan PkM; memiliki RENSTRA PkM yang merupakan RENSTRA Perguruan Tinggi dengan ketentuan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kriteria dan prosedur penilaian PkM paling sedikit menyangkut aspek hasil PkM dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa; 2. Peningkatan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi PkM dalam menjalankan program PkM secara berkelanjutan; 3. Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana PkM dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM; 4. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah dan jenis PkM; dan 5. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program PkM paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi. 				

8. PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
24.1 Perguruan Tinggi wajib menyediakan Pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang telah disusun sesuai peraturan yang berlaku	Adanya pedoman mekanisme pendanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat				
	Adanya pelaksanaan penjaminan mutu mekanisme pendanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat				
24.2 Perguruan tinggi wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat berdasarkan peraturan yang berlaku	Adanya RBA atau sumber dana lain yang mendukung keterlaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat				
24.3 Perguruan Tinggi dapat memberikan fasilitas Pendanaan pengabdian kepada	Adanya sumber dana lain dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat				

masyarakat dapat bersumber dari DRPM, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat					
24.4 Perguruan Tinggi mengalokasikan pendanaan khusus untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dialokasikan sesuai dengan panduan	Adanya pengalokasian dana untuk membiayai: perencanaan, <ul style="list-style-type: none"> a. pelaksanaan, b. pengendalian, pemantauan dan c. evaluasi, d. pelaporan, serta e. diseminasi hasil 				
24.5 Perguruan Tinggi wajib mengatur mekanisme pendanaan dalam kegiatan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat	Adanya pengelolaan manajemen dan peningkatan kapasitas pengelola dengan tugas <ul style="list-style-type: none"> 1) mengatur pengeluaran dana 2) mengatur pembiayaan yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; dan b. peningkatan kapasitas pelaksana 				
24.6 Perguruan Tinggi wajib melakukan pengawasan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada	Semua kegiatan PkM yang terdantai memiliki laporan kemajuan dan pertanggungjawaban kegiatan tentang penyerapan dana selama 70% dan 100% kegiatan				
	Semua kegiatan PkM yang terdantai				

masyarakat	memiliki laporan hasil audit oleh satuan pengawas internal				
24.7 Perguruan tinggi melaksanakan respon pengguna tentang pelayanan pendanaan kegiatan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun	Ada laporan respon pengguna tentang layanan pendanaan kegiatan pembiayaan secara kontinyu dan konsisten pada setiap tahun				

Keterangan: iya / tidak* = jika ‘ya’ maka perlu menambahkan bukti pendukung

Ada / tidak* = jika ‘ada’ maka perlu menambahkan bukti pendukung

L* = Lebih (melebihi Standar Mutu Unesa)

Surabaya,

Auditor :

Auditi :